ANALISIS POLITIK RUANG TERBUKA HIJAU

(Studi Kasus Pada Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABDILLAH QOMARU ZAMAN

NIM. I01217001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J U R U S A N I L M U P O L I T I K

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

2021

PERNYATAAN

Bismillahirahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdillah Qomaru Zaman

NIM : I01217001

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : ANALISIS POLITIK RUANG TERBUKA HIJAU (Studi Kasus Pada Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan di lembaga pendidikan manapun guna memperoleh gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini merupakan hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti ataupun bisaa dibuktikan hasil dari plagiasi, saya sanggup menanggung semua konsekuensi hukum yang terjadi.

Lamongan, 6 Juni, 2021

Yang menyatakan

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Abdillah Qomaru Zaman

NIM : I01217001

Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul : ANALISIS POLITIK RUANG TERBUKA HIJAU (Studi Kasus Pada Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dalam Bidang Ilmu Politik.

Lamongan, 6 Juni 2021

Pembimbing

Zimamul Khaq, S.Pd, M. Si
NIP : 198212022015031002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Abdillah Qomaru Zaman dengan judul ANALISIS POLITIK RUANG TERBUKA HIJAU (Studi Kasus Pada Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan) telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 24 Juni 2021

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I	Penguji II
Zimamul Khaq, S.Pd, M. Si	**Dr. Khoirul Yahya, M. Si**
NIP. 198212022015031002	**NIP. 197202062007101003**

Penguji III	Penguji IV
Dr. H. M. Ismail. S. Sos, M. H., M.Si	**Holillah, S. Ag, M. Si**
NIP. 196005211986081001	**NIP. 197610182008012008**

Surabaya, 29 Juni 2021

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

NIP : 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdillah Qomaru Zaman
NIM : I01217001
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Politik
E-mail address : abdillahqzz@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS POLITIK RUANG TERBUKA HIJAU

(Studi Kasus Pada Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

Abdillah Qomaru Zaman

ABSTRAK

Abdillah Qomaru Zaman, 2021. ANALISIS POLITIK RUANG TERBUKA HIJAU (Studi Kasus Pada Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan), Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan: (1) Bagaimana politik lingkungan dalam wujud pengembangan ruang terbuka hijau di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan (2) Bagaimana dinamika kepentingan antar aktor dalam praktik pengembangan RTH.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam memilih sampelnya menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kebutuhan penelitian. Teori yang digunakan menggunakan konsepGreen politics oleh Eckersley.

Hasil penelitiannya bisa dijelaskan yakni: (1) Pengembangan RTH di Kec. Lamongan, Kab. Lamongan sampai saat ini masih belum maksimal, kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam program pengelolaan lingkungan amat rendah, hal tersebut berpengaruh pada fungsi RTH yang belum begitu dirasakan oleh masyarakat dan berpengaruh pada segi pemeliharaan yang tidak mendapat perhatian secara penug. Dari hasil penelitian, pengembanganRTH Kab. Lamongan masih di dominasi dengan RTH privat yang lebih dari 90%. Sementara alokasi untuk pemanfaatan lahan jalur hijau, Taman dan tempat rekreasi masih kurang maksimal. Jika kita hubungkan dengan Permen PU No 5 Tahun 2008 maka hal ini sangat jauh dari yang diharapkan karena perbandingan RTH ialah 30 persen dari total luas wilayah Lamongan yang mencapai 1.782 km2 (2) Pemerintahan Kab. Lamongan saat ini masih fokus terhadap isu ekonomi dan mengesampingkan tentang isu lingkungan khususnya RTH oleh karena itu sustainable development (pembangunan berkelanjutan) sangat sulit di jalankan dengan maksimal di Kec. Lamongan Kab. Lamongan. Pemerintah dalam membuat tata ruang sekedar berfokus pada kepentingan kapitalis dan lebih banyak menyiapkan ruang dan tempat bagi para pemodal.

Kata Kunci: *Politik, Lingkungan, Lamongan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Abdillah Qomaru Zaman, 2021. POLITICAL ANALYSIS OF GREEN OPEN SPACE (Case Study in Lamongan District, Lamongan Regency), Thesis of Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, State Islamic University Sunan Ampel Surabaya.

This study seeks to explain: (1) How is environmental politics in the form of green open space development in Lamongan distict, Lamongan Regency (2) How is the dynamics of interests between actors in the practice of green open space development.

This studies makes use of a qualitative methodthroughgatheringfactsthe use of observation, interviews, and documentation. The studies informants had beendecided onthe use of the purposive sampling methodprimarily based totallyat thestudies needs. The theoretical idea used is Green politics through Eckersley.

The results that can be conveyed are (1) Development of green open space in Lamongan district until now is still not optimal; the ability of the community to actively participate in environmental management programs is very small. This condition has an impact on the function of green open space that has not been felt by the community and has an impact on aspects of maintenance that are not given attention. From the research results, the development of Green open space in Lamongan district is still dominated by private green open space which is more than 90%. Meanwhile, the allocation for green belt land use, parks and recreation areas is still not maximal. If we connect with the Minister of Public Works Regulation No. 5 of 2008, this is very far from expected because the ratio of green open space is 30 percent of the total area of Lamongan which reaches 1,782 km2 (2) District Government. Lamongan is currently still focusing on economic issues and putting aside environmental issues, especially green open space, therefore sustainable development is very difficult to carry out optimally in Lamongan district. The government in making spatial planning only prioritizes capitalist interests, and or more provides *space* andonly for investors.

Keywords: *Politics, Environment, Lamongan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN i
LEMBAR PENGESAHAN ii
MOTTO iii
PERSEMBAHAN iv
PERNYATAAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TABEL xiv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Definisi Konseptual 9
1. Green Political Theory (Teori Politik Hijau) 9
F. Sistematika Pembahasan 14
BAB II 17
KAJIAN TEORITIK 17
A. Penelitian Terdahulu 17
B. Kerangka Teori 36
1. Pengertian RTH 36
2. Good Environtmental Governance 39
3. Kabupaten Lamongan 41
BAB III 42
METODE PENELITIAN 42
A. Jenis Penelitian 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. LokasiPenelitian 42
C. Pemilihan subyek penelitian 43
D. Profil Informan 44
E. Tahap-tahap Penelitian 46
F. Teknik Pengumpulan Data 47
G. Teknik Analisis Data 50
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 51
I. Jadwal Penelitian 53
BAB IV 53
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 54
A. Gambaran umum Kab. Lamongan 54
B. Penetapan kawasan strategis lamongan 62
C. Kecamatan Lamongan 76
D. Profil DLH 87
E. Profil Badan Perencanaan Pembangungan Daerah (BAPPEDA) 93
F. Deskripsi hasil 99
G. Data dan Analisis 100
1. Pengembangan Terbuka Hijau di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan 100
2. Kebijakan Pengelolahan RTH di Kec. Lamongan 104
3. Program Lamongan Green and Clear 105
4. Dinamika kepentingan antar aktor dalam praktik pengembangan RTH 112
BAB V 132
PENUTUP 132
A. Kesimpulan 132
B. Saran 133
DAFTAR PUSTAKA 134
LAMPIRAN 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Klasifikasi Ruang Terbuka (Open Space).....13
Gambar 4.1 : Letak Administrasi Wilayah Kabupaten Lamongan 55
Gambar 4.2 : Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Lamongan 60
Gambar 4.3 : Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi 63
Gambar 4.4 : Lamongan Shorebase (LS)..... 64
Gambar 4.5 : Kawasan Strategis Pelabuhan 66
Gambar 4.6 : Wisata Bahari Lamongan yang merupakan Obyek Kawasan Strategis Ekonomi 66
Gambar 4.7 : Pelabuhan ASDP Paciran..... 67
Gambar 4.8 : Kawasan Strategis Perdagangan dan Jasa 68
Gambar 4.9 : Kawasan Strategis Sosial Budaya 69
Gambar 4.10 : Makam Sunan Drajat..... 70
Gambar 4.11 : Monumen Van Der Wijck..... 71
Gambar 4.12 : Makam Nyai Ratu Andongsari 72
Gambar 4.13 : Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan hidup 73
Gambar 4.14 : Aliran Sungai Bengawan Solo 74
Gambar 4.15 : Waduk Gondang..... 75
Gambar 4.16 : Waduk Prijaten..... 75
Gambar 4.17 : Peta kawasan strategis Kab. Lamongan 76
Gambar 4.18 : Jalur Hijau 78
Gambar 4.19 : Taman Rotonde 79
Gambar 4.20 : Taman Monumen 80
Gambar 4.21 : Taman Kadet suwoko..... 81
Gambar 4 22 : Taman Terminal 82
Gambar 4.23 : Taman Kombespol 82
Gambar 4.24 : Taman adipura..... 83
Gambar 4.25 : Hutan Kota 84
Gambar 4.26 : Alun-Alun Lamongan 85
Gambar 4.27 : Telaga Bandung 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.28 : Taman Makam 86
Gambar 4.29 : Taman Makam 87
Gambar 4.30 : Profil Dinas Lingkungan Hidup 88
Gambar 4.31 : Struktur Organisasi DLHKab. Lamongan..... 90
Gambar 4.32 : Profil BAPPEDA Kabupaten Lamongan 93
Gambar 4.33 : Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 98
Gambar 4.34 : Gambar peta Kabupaten Lamongan..... 101
Gambar 4.35 : Dokumentasi program LGC 106
Gambar 4.36 : Dokumentasi kegiatan daur ulang sampah..... 107
Gambar 4.37 : Dokumentasi RTH Kab. Lamongan..... 107
Gambar 4.38 : Tata guna lahan 108
Gambar 4.39 : Capaian iklim 109
Gambar 4.40 : Presentase RTH di Kabupaten Lamongan 110
Gambar 4.41 : Foto kondisi sentral PKL andansari 115
Gambar 4.42 : Foto kondisi pasar ikan lamongan..... 116
Gambar 4.43 : Pedoman teknis kawasan industri 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1Tata guna kawasan pada Kabupaten Lamongan 15
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....17
Tabel 3.1 Daftar nama narasumber pada penelitian ini.....43
Tabel 3.2 Jadwal penelitian.....53
Tabel 4.1 Jumlah penduduk di Kab. Lamongan Sampai akhir tahun 2019 57
Tabel 4.2 Jumlah Desa, Kelurahan, serta Luas Wilayah Per Kecamatan di Kab. Lamongan..... 58
Tabel 4.3 Luas Ruang Terbuka Hijau di Kec. Lamongan..... 77
Tabel 4.4 Luas Ruang Terbuka Hijau di Kec. Lamongan Perkelurahan 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik lingkungan ialah politik yang terfokus pada manajemen sumber daya alam. Dalam politik lingkungan pemerintah diharuskan untuk merancang kebijakan yang sesuai dalam mengatasi problem lingkungan dan politik lingkungan memberikan bermacam cara yang alternatif dan opsi yang bisa digunakan dalam menejemen pengelolaan sumber daya alam.[1] Menurut Kraft ada 6 tahapan kebijakan agar bisa merancang peraturan yang sesuai yaitu agenda setting, formulasi kebijakan, kebijakan legimitasi, kebijakan implementasi, kebijakan dan program evaluasi dan yang terakhir, kebijakan perubahan. Ada pula tiga sudut pandang pada politik lingkungan adalah sudut pandang ilmu pengetahuan, sudut pandang ekonomi dan sudut pandang etika lingkungan. Pada sudut pandang ilmu pengetahuan, politik lingkungan wajib mengangkat dan menerapkan keabsahan yang disetujui oleh kelompok akademisi. Etika lingkungan digunakan sebagai wadah pada politik lingkungan untuk beraspirasi oleh rimbawan, nelayan, dan masyarakat adat tersangkut kerusakan lingkungan dikarenakan kekuasaan anthroposentrisme. Etika lingkungan melingkupi filsafat lingkungan yang meneliti sifat manusia yang serakah pada sumber daya alam. ilmu digunakan untuk awal bagi peralihan ke dalam kerangka berpikir yang baru.[2]

Pembudidayaan dan pemanfaatan asas pengembangan lingkungan wajib dilaksanakan dengan baik untuk kelimpahan rakyat yang berkeadilan, baik di wilayah perdesaan maupun wilayah perkotaan. Pembangunan bertahap adalah gagasan

---

[1]Verdinand Robertua Siahaan,''*POLITIKLINGKUNGAN INDONESIATEORI & STUDI KASUS''* SBN:978 –623 –7256 –62 –5, Jakarta: UKI Press, Tahun 2020, Halaman 6

[2]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan yang diinginkan untuk perdesaan dan perkotaan di Indonesia. Maka dari itu, politik hijau yang bertahap wajib berasas perjuangan agar supaya mengabulkan penataan ruang, sejak proses perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pengendalian, sampai pada peran masyarakat, dan kebijakan teknis lainnya. Maka dari itu, hal paling penting untuk pengelolaan masalah lingkungan hidup adalah penentuan terhadap pengelolaan ruang, yang mengarah pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada hierarki tata ruang Nasional/Provinsi/Kota/Kabupaten. Politik Hijau ialah politik pembangunan bertahap berasas atas kepentingan pokok rakyat untuk hidup di lingkungan yang di nsungi dengan sehat dan berkualitas, agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan kondusif.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) ialah suatu ruang yang luas/jalur dan kadang kala berkelompok, memiliki ciri terbuka, dan merupakan wadah tumbuh tanamansecara alami ataupun tidak. Selanjutnya dijelaskan kembali oleh Punomohadi, Ruang Terbuka Hijau ialah sepetak ruang yang tidak memiliki batas, sepetak ruang yang memiliki ukuran, rupa, dan geografis serta berisi tumbuhan berkayu dan berumur tahunan, pepohonan yang merupakan ciri utama dan tumbuhan lainnya, untuk melengkapi, serta beberapa barang barang yang melengkapi dan menunjang fungsi RTH yang dimaksud. Ruang terbuka hijau meruapakan daerah tumbuhnya tumbuhan atau tanaman hijau yang bertujuan untuk perlindungan kota, perlindungan habitat tertentu, pengamanan saranana prasarana, runga publik, dan sebagainya. Ruang publik adalah tempat masyarakat untuk beraktivitas dan menciptakan demokrasi.Melalui ruang public diharap terbentuk hubungan dan interaksi yang baik diantara masyaraka dan pemerintah.[3]

[3]Cici jeny pramita, *''Fungsi ekonomi dan politik pembangunan Ruang terbuka hijau di kabupaten banyuwangi'' (*Surabaya: Unair, 20019), Hal. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun fungsi RTH ialah berfungsi intrinsik dan ekstrinsik (Dirjentaru, 2008). Jika ditelusuri lebih dalam fungsi intrinsik memiliki hirarki yaitu budaya dan sosial jika dilihat dari ektrinsiknya, ekonomi, serta estetika dan ekologi. Di kawasan metropolitan, kombinasi antara keempat fungsi ini dapat berjalan dengan baik untuk pembangunan yang berkelanjutan karena selaras dengan berbagai aspek seperti pelestarian tumbuhan, proteksi tata air, serta keseimbangan ekologi. Oleh karena itu tiga fungsi dasar dari ruang terbuka hijau itu sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan khususnya di kota metropolitan yang memiliki banyak permaslahan lingkungan agar memiliki keseimbangan antara ekonomi dan ekologi.[4]

Perubahan yang dialami perkotaan menuju kota industri modern yang mana hal itu menjadi daya tarik para investor untuk pengembangan dan pembangunan fasilitas umum seperti alun-alun, ruang publik, hotel dll ialah salah satu bentuk investasi dengan tujuan ekonomi global. Oleh karena itu di harapkan pendekatan go green politics mampu memberikan solusi antara masyarakat, pemerintah, dan pengembang serta permaslahan lainnya terkait lingkungan.[5]

Seperti yang diketahui, Pengembangan RTH tertuang dalam UU No 26 Tahun 2007 terkait Penataan Ruang dan sebagai syarat untuk menerapkan kota berkesinambungan yang ada di Indonesia. Maka dari itu diperlukan perancangan penataan RTH untuk menyeimbangkan inflasi lahan terbangun yang semakin naik.

Di pusat Kota Lamongan, RTH hanya memiliki presentase sebesar 1,98 persen. Jika kita hubungkan dengan Permen PU No 5 Tahun 2008 maka hal ini sangat jauh dari

---

[4]Nadia Imansari and Parfi Khadiyanta, "Penyediaan Hutan Kota Dan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat Di Kawasan Pusat Kota Tangerang," *Ruang* 1, no. 3 (2015): 101–110.

[5]Cici jeny pramita, *''Fungsi ekonomi dan politik pembangunan Ruang terbuka hijau di kabupaten banyuwangi'' (*Surabaya: Unair, 20019), Hal. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diharpkan karena perbandingan RTH ialah 30 persen dari total luas wilayah Lamongan yang mencapai 1.782 km2. Pengembangan ruang terbuka hijau di Kabupaten Lamongan sangat penting untuk diteliti karena termasuk salah satu isu yang sangat krusial karena meliputi berbagai aspek seperti lingkungan, sosial, dan politik. Dalam penelitian terdahulu terdapat banyak dampak positif jika ruang terbuka hijau di suatu daerah terpenuhi, Misalnya:

1. Fungsi ekologis: yaitu dapat mencega terjadinya banjir, meminimalisir polisi udara yang kotor, memiliki peran untuk meningkatkan kualitas tanah, dan faktor dalam manajemen ikilm mikro.
2. Fungsi social cultural: yaitu memiliki fungsi untuk tempat interaksi masyarakat, tempat berlibur, dan sebagai batas-batas wilayaha atau kawasan.
3. Fungsi estetika: berguna untuk menambah value kecantikan wilayah sekitar, menambah suasana lebih tenang dengan adanya hutan kota, jalur hijau dan tanaman yang indah.
4. Fungsi ekonomi: menambah minat wisatawan untuk berkunjung karena sarana perkotaan yang nyaman, hijau dan menarik. Sehingga, karena banyak wisatawan yang datang untuk berlibur akan membantu perekonomian di daerah tersebut.[6]

Sementara dampak negatif jika ruang terbuka hijau di suatu daerah kurang Ideal ialah dapat mengakibatkan berbagai masalah lingkungan. Misalnya wilayah tersebut menjadi tidak indah dan nyaman akibat kebisingan karena suara kendaraan yang ada di daerah tersebut, suhu yang berubah, serta polusi udara dikarenakan tidak seimbangnya

[6]Samsudi, "Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta," *Journal of Rural and Development* Vol. 1, no. No. 1 (2010): Hal. 11-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan pada daerah tersebut.[7] Hal ini sangat mungkin terjadi dan sudah banyak berbagai kasus misalnya pencemaran udara yang disebabkan oleh sisa pembakaran bahan bermotor karena kurang tanaman untuk menyerap karbon dioksida yang menyebar diudara dan dampak dari kejadian tersebut juga merupakan pemicu kenaikan suhu udara di suatu wilayah.

Kemudian menurunnya ketersediaan air tanah ialah contoh kasus permasalahan lingkungan yang terjadi di suatu daerah dikarenakan kurangnya ruang RTH yang ideal. Sebenernya jika tersedia ruang terbuka yang memadai air hujan akan berjalan ke bagian yang lebih dalam sehingga memungkinkan untuk menampung air.[8] Disisi lain adanya daerah hijau pada suatu wilayah berfungsi untuk ketersediaan air tanah, karena hakikatnya pohon memerlukan akan memerlukan air untuk hidup oleh karena itu meraka akan menyimpan air diakarnya. Akan tetapi, jika lahan hijau di suatu wilayah tersebut kurang ideal, maka ketersediaan air tanah tidak akan cukup atau maksimal diperuntukkan untuk kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Dan yang terakhir ialah jika ruang terbuka hijau tidak ideal atau kurang maksimal di suatu daerah dan menyebabkan pencemara udara. Hal tersebut akan berdampak bagi kesehatan masyarakat yang ada disekitar. Karena udara yang buruk akan membuat lingkungan tidak sehat untuk ditempati.[9]

Sesuai dengan amanat menteri terkait dengan RTH dalam Permenperin No.35/M-IND/PER/3/2010 terkait Pedoman Teknis Kawasan Industri yakni pengelolaan lahan guna perluasan daerah industri adalah luas RTH minimal 10 persen dari jumlah jumlah

---

[7]Wega Syamdermawan, "PENGARUH RUANG TERBUKA HIJAU TERHADAP KUALITAS LINGKUNGANPADA PERUMAHANMENENGAH ATAS," *Teknologi dan Kejuruan* 35, no. 1 (2012): 90.
[8]Hasni, *HUKUM PENATAAN RUANG DAN PENATAGUNAAN TANAH* (jakarta: Rajawali Pers, 2010).
[9]RAY MARCH SYAHADAT, PRIAMBUDI TRIE PUTRA, and MADE DWI PRATIWI, "Ruang Terbuka Hijau Dan Permasalahan Kesehatan Perkotaan Studi Kasus Di Provinsi Dki Jakarta," *Jurnal Arsitektur Lansekap*, no. November (2017): 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luas area. Sementara itu, untuk kawasan pedestrian, sesuai UU No 26 Tahun 2007 terkait Penataan Ruang pasal 29 ayat 2 menyatakan jika minimum 30% luas kota digunakan untuk RTH . Maka dari itu, diperlukan adanya pengawasan dari pemerintahan pada pembangunan RTH di sebuah daerah. Studi kasus berkaitan dengan politik hijau yang mana fokus kajiannya berhubungan dengan isu-isu lingkungan yang bisa dilakukan pengendalian melalui unsur politik bisa dicermati dengan memakai prespektif Eckersley. Berkaitan hal tersebut, pembangunan yang bernilai sosial, ekonomi terlebih politik meskipun akan menekankan pada perencanaan keadaan lingkungan yang sifatnya antroposentrisme dan ekosentrisme. Sehingga peneliti akan menekankan pembangunan go green, khususnya dalam membangun ruang public, yakni RTH. Dari segi antroposentrisme dan ekosentrsime, akan timbul gejala kontestasi, negosiasi, konflik, dan konsensus yang bisa berpengaruh pada hubungannya pihak kuasa, yakni actor politik, masyarakat, dan swasta.[10] Berdasar pendekatan bersangkutan, para actor yang berperan dalam menata ruang kabupaten akan saling membawa kepentingannya sendiri sehingga berpengaruh pada praktik politik tata ruang, khususnya pada kebijakan yang basisnya lingkungan. Berdasar pandangan dan pendekatan green politics, terdapat peran serta antara pemerintah dan kehendak beserta semua kepentingannya untuk meraih pertumbuhan dan pembangunan kabupaten yang mengarah pada keseimbangan manusia dan lingkungannya.

Perda Kabupaten Lamongan Nomor 32 Tahun 2013 yang berkaitan dengan RTH dan pengelolaan air di Kabupaten Lamongan menjadi landasan penting terkait dengan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur Kabupaten Lamongan yang memperhatikan lingkungan guna menciptakan pembangunan berkelanjutan yang baik.

[10]Siti Aminah, "Konflik Dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya," *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 20, no. 1 (2016): 59–79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak pemerintahan dipegang oleh Bupati Fadeli, Lamongan kembali mendulang masa kejayaan dengan perbaikan tata ruang wilayah. Dalam mensukseskan visi pembangunan tahun 2016-2021 di Kabupaten Lamongan atau demi terealisasinya kota Lamongan yang sejahtera dan mampu bersaing, misi yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu:

1. Mampu meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan demi tercipatanya SDM berkualitas dan bersaing. Dalam hal ini bertujuan agar SDM yang tersedia di Kabupaten Lamongan mampu bersinergi dan memiliki potensi untuk bersaing dengan SDM yang lainnya karena melalui pelayanan pendidikan dan kesdehatan yang baikakan berdampak pada kualitas masyarakat.
2. Kabupaten Lamongan di harapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah. Hal tersebut bertujuan agar wilayah Kabupaten lamongan mampu mandiri dan mengembangkan potensi-potensi daerah dari berbagai sektor misalnya perdagangan, pertanian, pariwisata, peternakan, industri, dan perikanan guna memiliki daya saing yang kuat.
3. Memiliki dan menentukan infrastuktur dasar demi kelestarian alam. Hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur dasar. Misalnya : permukiman, jembatan, perhubungan, jalan, air bersih, serta apapun itu yang mampu meningkatkan perekonomian daerah. Infrastruktur dasar digunakan dengan landasan sustainable development melalui pengelolaan alam dan perlindungan lingkungan hidup.
4. Diharapkan mampu meningkatkan dalam memenuhi layanan dengan uraianberikut. Hal ini di lakukan untuk membuat pelayanan publik yang profesional. Oleh karena itu perlu adanya proses pelaksanaan, perencanaan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengendalian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang berfokus pada aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5. Membuat wilayah yang damai dan tentram serta menghargai budaya lokal. Hal ini akan diwujudkan melalui terwujudnya kebutuhan dasar masyarakat seperti papan, pangan dan sandang dan tidak mengabaikan aspek ketertiban, kenyamanan, agama, budaya dan politik sekitar.[11]

Sehubungan dengan hal tersebut, Peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang RTH yang judulnya Analisis Politik Lingkungan di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan teori *Green Politic*. Dalam konteks politik hijau dilihat dari prespektif Eckersley peneliti ingin mengetahui bagaimana pengembangan RTH di daerah Lamongan dengan melihat aturan yang ada yakni perda Nomor 32 Tahun 2013 terkait RTH dan pengelolaan air di Kabupaten Lamongan.

B. Rumusan Masalah

Setelah permasalahan dan fenomena yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana wujud politik lingkungan dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana dinamika kepentingan antar aktor dalam praktik pengembangan RTH ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah rumusan dari tujuan masalah:

1. Untuk mengetahui politik lingkungan dalam wujud pengembangan ruang terbuka hijau di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan?

[11] http://sipsn.menlhk.go.id/sites/default/files/file-lampiran/visi-misi/renstra%20dpuck%20Kabuapten%20Lamongan%202016-2021.pdf di akses pada 17 september 2020 pukul 08:14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui dinamika kepentingan antar aktor dalam praktik pengembangan RTH di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan?

D. Manfaat Penelitian

Berdasar tujuan penelitiannya, penulis harap akan mendapatkan manfaat yang akan dijelaskan yakni:

1. Manfaat teoritis

   Diharapkan hasil yang diteliti bisa menambah informasi terkait RTH, serta pemahaman baru mengenai RTH dalam perspektif Eckersley.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan untuk menambah wawasan atau informasi tentang RTH dan mengetahui dinamika kepentingan antar aktor dalam praktik pengembangan RTH.

3. Manfaat Akademis

   Diharapkan untukmemperkaya wawasanterkaittema politik lingkungan. Kemudian, penelitian ini diharapkan menjadi data literatur maupun referensi di UIN Sunan Ampel Surabaya terutama dalam diskursus politik.

E. Definisi Konseptual

1. Green Political Theory (Teori Politik Hijau)

   Penelitian ini menyinggung tentang analisis pengembangan RTH di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan prespektif *green politics*. Dalam sejarahnya, Masalah lingkungan, seperti masalah feminis, telah meninggalkan jejak di sebagian besar cabang ilmu sosial dan humaniora. Namun, baru pada akhir 1980-an teori sosial dan politik yang 'hijau' muncul untuk menyuarakan keprihatinan yang saling terkait dari gerakan sosial baru (lingkungan, perdamaian, anti-nuklir, perempuan) yang telah membentuk politik hijau. Gerakan-gerakan ini juga mempelopori pembentukan gelombang partai-partai hijau baru pada 1980-an di tingkat lokal,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional, dan regional (paling menonjol di Eropa), berdasarkan 'empat pilar' politik hijau: tanggung jawab ekologis, keadilan sosial, non-kekerasan, dan demokrasi akar rumput. Pilar-pilar ini telah memberikan landasan umum bagi formasi partai hijau baru di seluruh dunia; termasuk di Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Memang, politik hijau adalah satu-satunya wacana dan praktik politik global baru yang muncul sebagai oposisi terhadap globalisasi neoliberal.[12] Teori Hijau awal muladigunakanmenjadi kekuatan politik yang sangat penting. Hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup dalam sejarah sudah tidak asing lagi sejak abad 12. Hal ini dapat kita lihat dari penebangan kayu hutan Babilonia, Italia dan Yunanisaat peradaban manusiabaru belum maju serta terdapatnya konservasi minyak di peradaban Cina dan Mediterania.

Politik lingkungan tak terlepasdari gerakan environmentalis Jerman, diawali dengan munculnya German Green Party tahun 1980.[13] Teori *Green politics* Sendiri banyak di kemukakan oleh banyak tokoh salah satunya yaitu Eckersley. Menurut Eckersley menggap bahwa masalah ekosentrisme sangat penting, karena hakikatnya manusia bukan segalanya di kehidupan ini. Namun ada komponen lainnya yang bersandingan dengan manusia yang juga perlu di perhatikan seperti tumbuhan, hewan, dan lingkungan hidup lain. Eckersley juga mengemukakan yakni manusia dan makhluk hidup lainya (alam) adalah sama tiada perbedaan dikarenakan diantara makhluk hidup pada hakikatnya berkaitan secara ekologis.

Politik hijau memisahkan antroposentrisme dengan ekosentrisme. Gagasan utama teori politik hijau adalah karakteristiknya yang ekosentrisme, dan menolak pandangan yang antroposentrisme. Eckersley dalam Pattersonmenjelaskan

[12]Robyn Eckersley, *Green Politics* (Oxford University Press, 2007). Hal 250-251
[13]Burchill, *Theories of International Relations*. (Uk : Plgrave Macmillan, 2013) Hlm 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekosentrisme memiliki sejumlah fitur sentral. Secara empiris melibatkan pandangan dunia sebagai ontologinya lebih menekankan hubungan inter-relasi dibandingkan entitas individu. Semua makhluk pada dasarnya 'tertanam dalam hubungan ekologis'. Akibatnya, tidak ada kriteria yang meyakinkan yang dapatdigunakan untuk membuat perbedaan yang kontras antara manusia dan non-manusia. Oleh karena itu secara etis tidak ada alasan yang meyakinkan untuk membuat perbedaan yang kaku antara manusia dan non-manusia dalam lingkungan hidup. Ekosentrisme dengan kata lain adalah bentuk 'emansipasi' terhadap semua entitas yang sudah given. Oleh karena itu manusia tidak bebas untuk mendominasi keseimbangan alam.Gagasan kunci yang kedua adalah argumen tentang 'batas perumbuhan' tentang sifat krisis lingkungan. Teori hijau menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan 'batas pertumbuhan' itu adalah pertumbuhan ekonomi eksponensial yang dialami selama dua abad terakhir yang merupakan akar penyebab krisis lingkungan saat ini. Jadi, bukan konsepsi mengenai krisis lingkungan yang membuat GPT berbeda dari teori lingkungan hidup yang lain, melainkan pemahaman tentang sifat krisis yang membuat mereka berbeda.[14]

Kemudian ekosentrisme mimiliki nilai-nilai etis. Dan baginya antroposentrisme ialah ajaran yang tidak baik bagi keberlangsungan makhluk hidup. Karena antroposentrisme hanya memfokuskan pada manusia selaku objek utamanya dalam kehidupan. Sementara antroposentrisme yang mnyebabkan lingkungan hidup menjadi musnah. Namun mereka juga membela ekosentrisme terkait hal yang

[14]Yusran dan Afri Asnelly, ''*Kajian Green Politics Theory Dalam Upaya Menangani Krisis Ekologi Laut Indonesia Terkait Aktifitas Illegal Fishing''*Indonesian Journal of International Relations, Vol. 1, No. 2, 2017pp. 35-53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dentologis. Berdasar Eckersley mengklasifikasikan ekosentrisme menjadi 4 bagian dalam maslah politik hijau khususnya ekosentrisme dengan kode etisnya.[15]

1. Ekosentrisme yg memfokuskan kepda identifikasi kepentinga manusia dan diluar manusia yakni kehidupan makhluk lain.
2. Ekosentrime yang terkait dengan masa yang akan datang baik untuk manusia dan makhluk hidup lain.
3. Ekosentrisme yang mengidentifikasi masyarakat bukan-manusia
4. Ekosentrisme mengaplikasikan suatu pandangan yang sangat menyulurh dan tidak atomistik, Dan tidak mengabaikan banyak aspek lainnya misalnya (Ekosistem, spesies, populasi, organime individu dan alam secara keseluruhan.

Dalam hal masalah lingkungan hidup, ada dua argumen yang berbeda yaitu antara kaum modernis dengan ekoradikal. Menurut kaum modernis menurut pandangan mereka jika pengetahuan ilmiah dan teknologi di tingkatkan maka lingkungan akan bisa diatasi dengan baik. Sedangkan argumen kaum ekoradikal, yakni lingkungan hidup sebagai sesuatu yang sangat terbatas. Sehingga pembaruan teknologi tidak bisa mensolusikan permasalahan lingkungan yang dipandang sangat penting. Menurutnya, Kelompok ekoradikal juga menyatakan yakni perlu partisipasi dari pembaharuan politik serta ekonomi. Sehngga masalah bersangkutan bisa di selesaikan.[16]

Penerapan teori *green politics* dalam prespektif Eckersley akan menjelaskan tentang hubungan antara aliran antroposentrisme dan ekosentrisme yang di dalamnya saling berkaitan. Dalam penelitian ini akan di jelaskan bahwa terdapat

[15]Ibid.,
[16]Cici Jeny Pramita, "'Fungsi Ekonomi Dan Politik Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Banyuwangi" (Universitas Airlangga, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertarungan antara aliran antroposentrisme dan ekosentrisme terhadap pengembangan RTH di Kab. Lamongan.

Gambar 1 1: Klasifikasi Ruang Terbuka (Open Space)

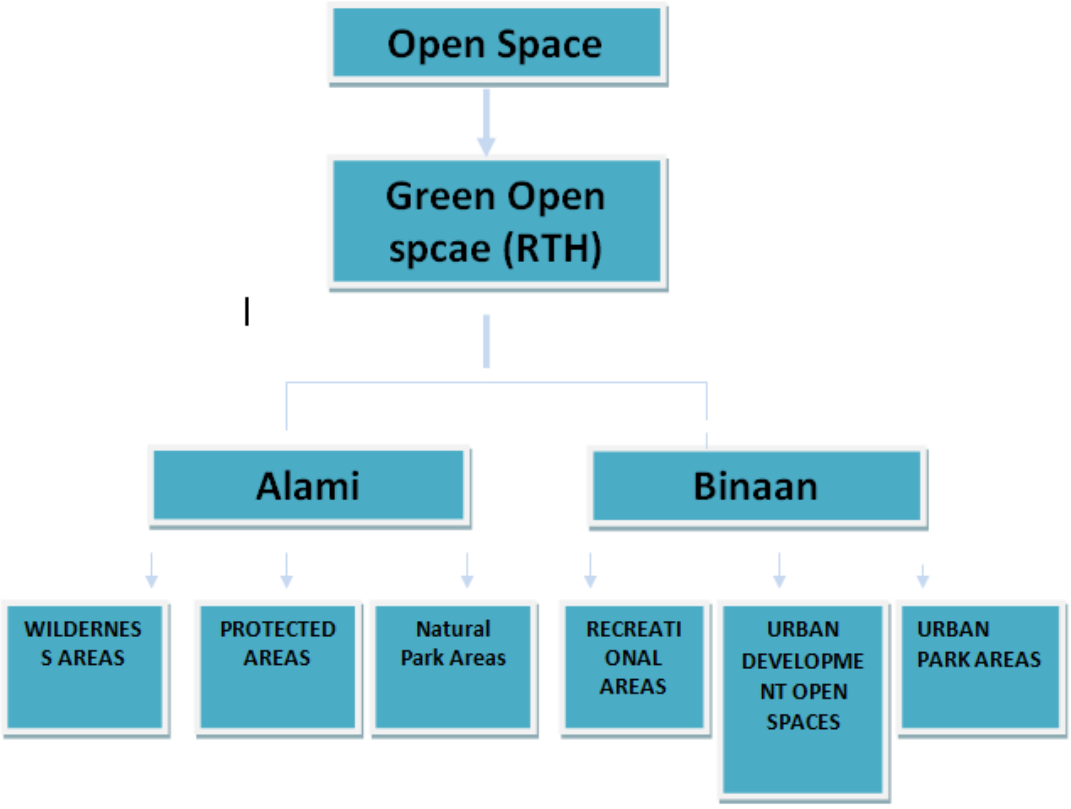

Klasifikasi Ruang Terbuka (Open Space)

RTH alami mencakup ruang hijau alami, ruang hijau lindung supaya tetap alami, dan daerah yang memiliki fungsi sebagai fasilitas umum tetapi masih mempertahankan ciri alam yang alami. Sedangkan RTH binaan mencakup dari ruang hijau yang di bangun sebagai taman kota, ruang hijau yang di bangun sebagai pariwisata, dan ruang hijau yang ada pada antara/halaman bangunan yang di gunakan sebagai area penghijauan. Akan tetapi berbeda dengan daerah hijau di kota bisa dikembangkan menjadi plaza, square, jalur hijau jalan, dan sabuk hijau kota.[17]

[17]Ibid., halaman 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Sistematika Pembahasan

Hal yang dibahas pada penelitian ini terbagi dalam lima bab. Supaya skripsi ini menjadi penelitian yang tersusun rapi sistematis dan ilmiah maka terdapat rangkaian sistematika sebagai berikut:

1. Pada bab yang pertama peneliti ini inimemiliki uraian mengenai pendahuluan yang meliputi :i. latarbelakang masalah, ii. perumusan masalah, iii. tujuan penelitian, iv. manfaat penelitian, v. definisi konseptual, vi. penelitian terdahulu, dan vii. sistematika pembahasan. Semua komponen ini diperlukan agar penelitian ini akan mudah dipahami oleh pembaca dengan mudah dan mengetahu poin utama dalam penelitian ini.
2. Pada bab yang kedua penelitian ini memiliki muatan tentang :i. kajian teoritik, ii. Penjabaran teorioleh penulis yaitu*green politics theory*yang dilihat dari perspektif Eckersley
3. Pada bab yang ketiga penelitian inimembahas tentang metode meliputi:i. pendekatan penelitian, ii. lokasi dan waktu penelitian, iii. pemilihan subjek penelitian dan iv. narasumber, v. tahap-tahap penelitian, vi. teknik pengumpulan data, vii. teknik analisis data, vii. teknik verifikasi data.
4. Bab yang keempat berisi tantangpenjabaran dan analisis data. Dibagian ini akan menjabarkan hasil data lapangan serta analisapengembangan RTH di Kab. Lamongan serta dinamika kepentingan antar aktor dalam pengembangan RTH.
5. Dan bab yang terakhirmemuatperihal penutup yakni : (asaran rekomendasi, b) kesimpulan, dan c) keterbatasan pada penelitian ini.

Di wilayah Lamongan lahannya dimanfaatkan untuk berbagai aspek misalnya kawasan budidaya dan lindung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1Tata guna kawasan pada Kabupaten Lamongan

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase
1	Permukiman	13,030.00	7.19
2	Sawah Irigasi	45,841.00	25.29
3	Sawah Tadah Hujan	33,479.00	18.47
4	Pekebunan	9,919.14	5.47
5	Hutan	33,717.30	18.60
6	Hutan Rakyat	7,098.10	3.92
7	Tambak	1,380.05	0.76
8	Sungai	8,760.00	4.83
9	Waduk	8,719.50	4.81
10	Telagan/Ladang	12,138.91	6.70
11	Pertambangan	1,200.00	0.66
12	Peruntukan lainya (Rawa, tanah tandul dll)	5,997.00	3.31
	Jumlah	181,280.00	100.00

Sumber : RT/RW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031

Dari gambar diatas terlihat jika kawasan di Kab. lamongan lebih condong di habiskan oleh oleh Persawahan total (43,76%) dari sawa irigrasi dan sawah tadah hujan. Maka, penanganan masalah irigrasi dan sumber daya alam di Kabupaten Lamongan menjadi hal yang utama untuk kebutuhan masyarakat di sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2 1 Penelitian terdahulu

No.	Judul	Peneliti	Analisis
1	Fungsi Ekonomi Dan Politik Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupeten Banyuwangi	Cici Jeny Pramita Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Airlangga Surabaya 2019	Penelitian ini membahas tentang studi kasus Ruang Terbuka hijau (RTH) yang ada di daerah Banyuwangi yang berkenaan terhadap praktik politik penataan ruang publik. Dengan rumusan masalah, sebagai berikut: Bagaimanakah produksi ruang publik RTH di Banyuwangi serta apakah implikasi politik dan ekomomi dari penataan ruang publik padakemakmuranmasyarakat Banyuwangi. Skripsi inidibuat dengan cara deskriptif kualitatif, melakukan penyusunan data melalui: observasi, dokumentasi, danwawancara. Teori yang diaplikasikan dalam penelitian tersebutialah teori *green politics*oleh Eckersley. Hasil yang dapat dijadikan kesimpulan dalam skripsi ini antara lain: (1) Pengembangan wilayah dan penataan ruang publik berkaitan dengan pratik politik yg di lakukan banyak elemen baik dari politik, swasta dan masyarakat. Dan yang paling berpengaruh dalam hal tersebut ialah Bupati Banyuwangi karena dapet mempengaruhi badan-badan pemerintah yang ada dibawah kepemimpinanya. (2) Ruang publik saat ini berubah menjadi fungsi kontestasi antara aktor-aktor ekonomi. Problematika terjadi jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			fungsi ruang publik di dominasi oleh antroposentrisme.
2	KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAUDI KOTA MAKASSAR TAHUN 2017	Syamsu Rijal Dosen Fakultas Kehutanan UNHAS Jurnal Hutan Dan Masyarakat Vol. III No. 1 Mei 2008, 001-110	Penelitian ini digunakan untuk perencanaan tata kelola RTH yang ada di daerah Makassar 2007 sampai dengan 2017 dan mengidentifikasi kebutuhan. Kemudian jurnal ini menggunakan survey di lapangan untuk memperoleh informasi/databerupa sumber sekunder dan sumber primer. Penelitian ini juga membandingkan dari data yang telah terkumpul terhadap kejadian di daerah Makassar tentang penutupan lahan berlandaskan Citra Ikonos Makassardan visual GoogleEarth. Selanjutnya survey dan observasi dari data tersebut juga diperlukan agar mengetahui ‘’*exiting land cover’’* Kota Makassar. Agar memudahkan menumakan opsi pemecahan masalah maka hasil yang telah di temukan harus melihat beberapa hal yang berkaitan misalnya : prasarana yang ada, jumlah populasi orang, perkembangan tentang RTRW yang ada di Makassar dan lahan yang tersedia. Hasil temuan dari penetian tersebut : (1) Kalau ditinjau dan berlandaskan dari segi ekologi di tahun 2007 Kota Makassar membutuhkan sekitar 617,62 ha lahan ruang terbuka hijau dengan jumlah penduduk 1.235.239 jiwa . (2) Di tahun 2017 daerah Makassar membutuhkan lahan utnuk RTH seluas 1.137,19 ha dengan jumlah 2.274.383 penduduk. (3) Agar peningkatan lahan hijau berjalan dengan lancar harus di sesuai kan dengan arahan RTRW yang ada di daerah Makassar yang meliputi 7 kawasan khusus dalam bentuk dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			jenis yang sesuai wilayah tersebut dan 13 kawasan terpadu perlu di lakukan perluasan lahan dan ekstensifikasi
3	Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru	Warsito Utomo Magister Administrasi Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP) Vol 19, No 1 - Mei 2015	Inti darri jurnal ini ialah menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan RTH yang melibatkan sektor pengembang perumahan sebagai objek kebijakan dan sektor pemerintah yang berperan sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut. Untuk mengumpulkan keabsahan data maka diperlukannya observasi, studi literatur, dokumentasi dan wawancara. Kajian teori yang digunakan ialah kebijakan publik. Data temuan yang di simpulkan yakni: (1) Rumusan kebijakan dengan yang dibuat dengan pelaksanaan atau implementasi tidak seuai. a) Tidak menyediakan ruang lahan hijau pada daerah pemukiman yang akan di bangun b) Melanggar kesepatakan tentang luas lahar RTH c) Ketidak sesuai an tempat untuk lahan d) Tempat yang sudah di sepakati menjadi lahan hijau tidak kunjung di bangun dan masih berupah semak-semak dan tanah kosong. (2) Banyak hal yang tidak sesuai dan melanggar kebijakan yang telah dibuat dikarenakan kepentingan pribadi maupun organisasi, ekonomi, dan ketidak taatan terhadap hukum yang berlaku.
4	Green open space masterplan at Jakarta Capital City, Indonesia for climate	R Setiowati, H S Hasibuan and R H Koestoer School of Environmental Science, University of Indonesia,IOP	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dokumen perencanaan Masterplan RTH. Metode yang digunakan dengan meninjau Masterplan RTH sesuai Rencana Tata Ruang Jakarta 2030 dalam rangka mendukung Rencana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	change mitigation	Conf. Series: Earth and Environmental Science 200 (2018) 012042 doi :10.1088/1755-1315/200/1/012042	Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2030 untuk menangani perubahan iklim. Temuan dan hasil : Dengan jumlah RTH di Jakarta yang kurang dari 20%, Provinsi DKI Jakarta masih memiliki kapasitas yang kurang dalam mengatasi dampak urban heat island (UHI) dan dalam menangani perubahan iklim. Ketiadaan Green Open Space (GOS) Master Plan menyebabkan jakarta tidak memiliki pedoman dan rencana jangka panjang yang dapat diterapkan dan terukur dalam mencapai 30% target RTH pada tahun 2030. Target RTH di Jakarta adalah 20%, namun zonasi green plan yang ditetapkan dalam Perda 1 tahun 2012 hanya 11,7% (7.749,36 Ha).
5	Identification Of Surface and Ambient Temperature to Review The Potential Green Open Space in Urban Area	Santi, Siti Belinda, and Hapsa Rianty Department of Architecture, Engineering Faculty, Universitas Halu Oleo, Kendari South East Sulawesi, Indonesia, 93232 AIP Conference Proceedings 1977, 040025 (2018); doi: 10.1063/1.5042995	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi material penutup tanah yang digunakan pada alun-alun "Tugu Religi", monumen ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Areal alam yang tersisa sekitar 40% dari total luas 7 Ha. Uji statistik ANOVA dilakukan untuk mengetahui korelasi antara komposisi pada semua bahan. Studi ini dilakukan dengan menggunakan analisis statistik dari data yang dikumpulkan pada beberapa parameter iklim mikro di situs. Data diambil dari pengukuran ruang terbuka di kawasan perkotaan tropis. Dalam membandingkan pengaruh pada lokasi yang berbeda, penelitian ini menggunakan beberapa indikator antara lain suhu udara, kelembaban relatif, dan kecepatan angin sebagai parameter untuk menentukan iklim mikro pada ruang terbuka perkotaan. Pengaruhnya termasuk efek permukaan situs terhadap iklim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			mikronya sendiri dan di daerah sekitarnya. Penelitian dilakukan selama periode musim panas pada bulan terpanas (Agustus-September) karena tekanan panas iklim di perkotaan terutama terjadi pada musim tersebut. Kajian tersebut menganalisis lapisan batas bawah kawasan perkotaan dimana interaksi antar elemen perkotaan menghasilkan pola kondisi iklim mikro yang berbeda, yang diketahui sangat sensitif terhadap perubahan struktur perkotaan dan penggunaan material, permukaan tanah, dan vegetasi. Hasil dari peneitian ini ialah Dari 8 (delapan) jenis material yang ada di permukaan alun-alun Tugu Religi, semuanya mempunyai ciri yang beragam. Salah satu karakteristik material yang secara teoritis mempengaruhi suhu lingkungan adalah kemampuan material dalam menyerap dan menyebarkan radiasi matahari. Kemampuan ini disebut tingkat material albedo. Nilai albedo tertinggi diperoleh dari rumput dan tanah. Berdasarkan hasil pengamatan, suhu permukaan tiap material berbeda-beda. Material yang memiliki nilai temperatur permukaan tertinggi adalah aspal dan terendah adalah rumput. Hasil penelitian juga menunjukkan suhu permukaan berbagai material tidak mempengaruhi suhu lingkungan di daerah penelitian. Hal ini dikarenakan penggunaan material permukaan bersuhu tinggi lebih dominan dibandingkan material bersuhu permukaan rendah, misalnya rumput. Secara teoritis, setiap material yang diterapkan ke situs dapat mempengaruhi suhu lingkungan. Namun, hasilnya justru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh material temperatur permukaan yang tidak signifikan terhadap temperatur lingkungan. Meskipun aspal sebagai material dengan kadar albedo tertinggi terdapat di beberapa titik lokasi, namun lokasi tersebut sebagian besar dibangun dari perkerasan jalan dan pengerasan jalan yang memiliki temperatur permukaan sedang. Keadaan ini memberikan hasil yang berbeda, berbeda dengan perkiraan sebelumnya karena suhu lingkungan di lokasi tersebut sangat tinggi meskipun menggunakan perkerasan atau material buatan lainnya dengan suhu permukaan sedang. Suhu lingkungan yang tinggi diduga dipengaruhi oleh kurangnya vegetasi alami di lokasi dengan radiasi matahari yang tinggi karena pengukuran dilakukan pada hari terpanas selama musim panas. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa suhu permukaan material tidak berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh pada suhu lingkungan karena faktor lain seperti vegetasi alami dan radiasi matahari juga dapat mempengaruhi suhu ruangan.
6	Influence of urban green open space on residents' physical activity in China	Han Wang, Xiaoling Dai, Jinglan Wu1, Xingyi Wu1 and Xin Nie. Wang et al. BMC Public Health (2019) 19:1093 https://doi.org/ 10.1186/s12889-019-7416-7	Penelitian tentang hubungan antara ruang terbuka hijau dan aktivitas fisik di Cina. Dengan demikian, studi ini mengkaji bagaimana ruang terbuka hijau perkotaan berkontribusi pada aktivitas fisik. Metode: Kuesioner dirancang berdasarkan teori ekologi sosial untuk mengetahui aktivitas fisik 513 penduduk di ruang terbuka hijau perkotaan. Kami menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			waktu dan frekuensi penduduk yang berolahraga di RTH perkotaan untuk mengukur aktivitas fisik, dan menggunakan analisis faktor untuk mensintesis sejumlah besar faktor asli (yaitu, infrastruktur, keamanan, aksesibilitas, kualitas lanskap, dan lingkungan ruang) menjadi relatif sedikit. indikator komposit. Berdasarkan data populasi cross-sectional yang terkumpul, maka dibangun model regresi Order Probit untuk menganalisis pengaruh RTH perkotaan terhadap aktivitas fisik penghuni dari perspektif ekologi sosial. Hasil dari penelitian : Pembangunan peradaban ekologi bertujuan untuk mempromosikan lingkungan dan aktivitas fisik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, namun penelitian sejauh ini memberikan hasil yang beragam antara ruang terbuka hijau perkotaan dan aktivitas fisik. Selain itu, penelitian sebelumnya terutama telah dilakukan di negara-negara maju barat, temuan tersebut tidak dapat begitu saja dialihkan ke konteks berkembang timur di mana bentuk PA dan ruang terbuka hijau perkotaan cukup berbeda. Studi kami inovatif dalam menggabungkan teori ekologi sosial dengan kuesioner dan relevan dengan kebijakan. Berdasarkan hasil kami di antara responden di Nanning, saran untuk perencana ruang terbuka hijau perkotaan di China dapat dibuat. Untuk faktor komunitas, tidak ditemukan korelasi positif yang signifikan antara aksesibilitas dan waktu PA, tetapi korelasi positif yang signifikan ditemukan pada frekuensi PA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Akibatnya, peningkatan aksesibilitas ruang terbuka hijau perkotaan dapat mendorong lebih banyak penduduk untuk berpartisipasi dalam PA untuk meningkatkan penggunaan ruang hijau dan meningkatkan kesehatan penduduk. Selain itu, menjaga keamanan ruang terbuka hijau perkotaan dan memperpendek jarak dari pemukiman ke ruang terbuka hijau dapat menjamin keamanan penghuni dan mengurangi waktu yang dihabiskan di jalan, yang selanjutnya dapat meningkatkan PA. Untuk faktor alam, lingkungan ruang dan kualitas bentang alam berpengaruh positif terhadap PA penghuni. Oleh karena itu, ruang terbuka hijau perkotaan harus ditanami dengan berbagai jenis vegetasi untuk penghijauan ruang terbuka, penyegar udara di ruang terbuka hijau, dan pengaturan penghuni di ruang terbuka hijau. Untuk faktor lingkungan binaan, prasarana, luas RTH, luas RTH, ada atau tidaknya lapangan basket atau lapangan voli, dan kolam renang semuanya berkorelasi positif signifikan dengan waktu PA warga, sedangkan adanya a lapangan tenis meja berkorelasi negatif secara signifikan dengan waktu PA. Korelasi positif yang signifikan ditemukan antara keberadaan lapangan voli atau fasilitas hiburan dan frekuensi PA warga. Besar kecilnya RTH, rolling field dan lapangan tenis meja memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan frekuensi PA. Ini karena penduduk China memiliki preferensi yang kuat untuk olahraga kelompok, yang menyebabkan semua ruang terbuka hijau dirancang khusus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			sebagai kotak "menari persegi" dan "Tai Chi". Akibatnya, memperluas area per kapita ruang hijau perkotaan, menambahkan kolam renang dan menambahkan karakteristik etnis dan budaya ke dalam kegiatan olahraga dapat meningkatkan PA warga. Selain atribut RTH, terdapat juga beberapa faktor lain yang mempengaruhi PA penghuni RTH perkotaan yaitu faktor individu dan interpersonal. Dalam faktor individu, usia dan waktu PA serta frekuensi PA berkorelasi signifikan dan positif; dan jenis kelamin secara signifikan berkorelasi dengan waktu PA. Mayoritas kelompok PA di Cina adalah lansia, dan wanita menghabiskan lebih banyak waktu dengan PA daripada pria. Dalam faktor interpersonal, rasa kebersamaan yang kuat ada di China, dan memilih kolega, tim, atau orang lain untuk olahraga kelompok dapat mempromosikan PA. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesehatan seluruh penduduk, ruang terbuka hijau perkotaan harus dirancang dengan sejumlah tambahan olah raga kelompok yang cocok bagi laki-laki dan kaum muda pada khususnya.
7	Urban Green Space Distribution Related to Land Values in Fast-Growing Megacities, Mumbai and Jakarta– Unexploited Opportunities	Yun Hye Hwang, Ivan Kurniawan Nasution , Deepika Amonkar and Amy Hahs. Department of Architecture, School of Design and Environment, National	Penelitain ini bertujuan untuk mengetahui keadilan distributif RTH, dengan mempertanyakan asumsi umum Global Utara bahwa kaum miskin memiliki akses yang lebih sedikit ke manfaat ruang hijau, menggunakan kota Mumbai dan Jakarta sebagai studi kasus karena, di negara masing-masing, ketimpangan kekayaan telah tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	to Increase Access to Greenery for the Poor	University of Singapore. Sustainability 2020, 12, 4982; doi:10.3390/ su12124982.	daripada di negara Asia lainnya. Penelitian ini menggunakan empat data geospasial untuk menganalisis pola distribusi ruang hijau dan menyelidiki hubungan dengan ketidakadilan RTH di berbagai kabupaten nilai lahan. Dalam penelitain ini menemukan bahwa kabupaten dengan nilai tanah yang lebih rendah memiliki lebih banyak tutupan vegetasi dengan kerapatan vegetasi yang lebih tinggi, terutama karena jumlah tanaman hijau yang tidak terkelola dalam jumlah besar. Hubungan antara status perkembangan perkotaan dan nilai lahan di suatu kabupaten tidak selalu mencerminkan distribusi RTH setelah vegetasi yang tidak dikelola dipertimbangkan. Hasil dari penelitian : 1. Area penghijauan yang tidak dikelola berkorelasi positif dengan distrik nilai tanah yang lebih rendah di Mumbai dan Jakarta. 2. RTH yang tidak dikelola memiliki hubungan positif dengan ukuran bidang tanah yang lebih besar dan vegetasi yang lebih rapat, sedangkan RTH yang dikelola memiliki ukuran patch yang lebih kecil dan struktur vegetasi yang kurang kompleks. 3. Sebagian besar RTH yang tidak dikelola di distrik dengan nilai tanah yang lebih rendah tidak terlindungi dan kurang dimanfaatkan. Mengingat ukuran bidang kecil tanah yang lebih besar dan vegetasi yang lebih rapat, RTH yang tidak dikelola harus dianggap sebagai aset penting yang dapat meningkatkan ekuitas distribusi RTH, sehingga jenis investasi RTH lainnya, seperti taman kota yang ditunjuk dan taman pribadi, menjadi kurang penting. Berdasarkan temuan peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			berspekulasi bahwa "lebih hijau untuk orang miskin" mungkin merupakan pola peralihan dalam konteks kota-kota yang tumbuh cepat, di mana ruang hijau saat ini kebetulan ada tetapi akan hilang karena perluasan kota yang cepat jika tidak ada perencanaan strategis. Petak-petak RTH yang besar dan padat di dekat distrik dengan nilai tanah yang lebih rendah mungkin hilang setelah selesainya relokasi permukiman kumuh dan pematangan pasar properti lokal. taman publik dan melindungi hutan kota, pengembangan ruang hijau publik yang disengaja tidak mencukupi dan tertinggal dari peningkatan dramatis dalam populasi. Berdasarkan apa yang telah kita saksikan di Mumbai dan Jakarta, belum terlambat untuk mencapai keadilan lingkungan jika pembuat kebijakan memprioritaskan perlindungan kawasan bervegetasi yang lebih padat dan lebih besar di distrik dengan nilai tanah rendah. Untuk tujuan ini, kami menekankan bahwa perencana kota perlu memperhatikan perlindungan RTH, mengoptimalkan penggunaannya, meningkatkan akses publik gratis, mengintegrasikan fungsi ekologis dengan penggunaan manusia, dan mendukung multi-fungsi RTH menuju pengembangan kota yang inklusif.
Kesimpulan		Pada penelitian yang pertama fokus penelitian adalah pada produksi ruang publik RTH di Banyuwangi. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana implikasi politik dan ekomomi dari penataan ruang publik padakemakmuran masyarakat Banyuwangi. Kesamaan dengan penelitian ini yaitu mempersoalkan tentang RTH dan menggunakan teori green politics. Perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada ekonomi dari penataan ruang publik terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan RTH serta dinamika kepentingan antar akotr politik di Kab. Lamongan. Penelitian yang kedua meneliti tentang Identifikasi perencanaan ruang terbuka hijau di daerah Makassarr. Penelitian tersebut dilaksanakan dengan obserbvasi langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data akurat dan tepat sesuai yangf diingkan. laluStudi kasus lahan di daerah makasar yang berlandaskan Citra Ikonos itu di bandingkan dan dianalisis dengan data-data yang telah diterima oleh peneliti .Selanjutnya survey dan observasi dari data tersebut juga diperlukan agar mengetahui ‘’exiting land cover’’ Kota Makassar. Meskipun sama-sama membahas tentang RTH penelitian tersebut lebih berfokus pada kebutuhan RTH dan perencenaan RTH di kota Makassar. Penelitian ketiga (nomor 3) mengkaji tentang proses pelaksanaan kebijakan penataan RTH beserta komponen-komponen pengaruhnya yang ikut berkontribusi yaitu sektor pengembang sebagai objek kebijakan pemerintah dan sektor pemerintah sebagai pelaksana. Sedangkan skripsi ini membahas tentang analisis pengembangan RTH beserta dinamika kepentingan antar aktor. Kesamaan dengan penelitian tersebut ialah menggunakan RTH sebagai objek penelitian. Penelitan keempat (nomor 4) membahas tentang masterplan RTH di Jakarta, Metode yang digunakan dengan meninjau Masterplan RTH sesuai Rencana Tata Ruang Jakarta 2030 dalam rangka mendukung Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2030 untuk menangani perubahan iklim. Adapun kesamaan penelitiannya ialah sama-sama menjadikan RTH sebagai objek penelitan. Penelitian kelima (nomor 5) Penelitan ini untuk meninjau potensi RTH di Kawasan Perkotaan Studi ini dilakukan dengan menggunakan analisis statistik dari data yang dikumpulkan pada beberapa parameter iklim mikro di situs. Data diambil dari pengukuran ruang terbuka di kawasan perkotaan tropis. Dalam membandingkan pengaruh pada lokasi yang berbeda, penelitian ini menggunakan beberapa indikator antara lain suhu udara, kelembaban relatif, dan kecepatan angin sebagai parameter untuk menentukan iklim mikro pada ruang terbuka perkotaan. Pengaruhnya termasuk efek permukaan situs terhadap iklim mikronya sendiri dan di daerah sekitarnya. Penelitian dilakukan selama periode musim panas pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	bulan terpanas (Agustus-September) karena tekanan panas iklim di perkotaan terutama terjadi pada musim tersebut. Kajian tersebut menganalisis lapisan batas bawah kawasan perkotaan dimana interaksi antar elemen perkotaan menghasilkan pola kondisi iklim mikro yang berbeda, yang diketahui sangat sensitif terhadap perubahan struktur perkotaan dan penggunaan material, permukaan tanah, dan vegetasi. Persamaan skripsi ini dari penelitian tersebut adalah sama-sama menggunakan RTH sebagai objek penelitan. Penelitian keenam (nomor 6) Penelitian ini tentang hubungan antara ruang terbuka hijau dan aktivitas fisik di Cina. Dengan demikian, studi ini mengkaji bagaimana ruang terbuka hijau perkotaan berkontribusi pada aktivitas fisik. Penelitian ini menggunakan motode penelitan kuantitatif, Kuesioner dirancang berdasarkan teori ekologi sosial untuk mengetahui aktivitas fisik 513 penduduk di ruang terbuka hijau perkotaan.Adapun kesamaan penelitiannyaialah sama-sama menggunakan RTH selaku objek penelitan. Penelitian ketujuh (Nomor 7) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadilan distributif RTH, dengan mempertanyakan asumsi umum Global Utara bahwa kaum miskin memiliki akses yang lebih sedikit ke manfaat ruang hijau, menggunakan kota Mumbai dan Jakarta sebagai studi kasus karena, di negara masing-masing, ketimpangan kekayaan telah tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi daripada di negara Asia lainnya. Penelitian ini menggunakan empat data geospasial untuk menganalisis pola distribusi ruang hijau dan menyelidiki hubungan dengan ketidakadilan RTH di berbagai kabupaten nilai lahan. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama menggunakan RTH sebagai objek penelitan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kerangka Teori

1. Pengertian RTH

Dilihat dari berbagai sumber, Pengertian dari RTH sering dianggap hanya sebagai unsur alami berupa vegetasi saja. Oleh karen itu kita perlu mendifinisikan kembali (redifinisi) pengertian RTH agar dalam penataan ruang unsur RTH menjadi pertimbangan utama untuk pembangunan kota.

RTH ialah bagaian dari ruang terbuka yang termasuk sebagai tempat atau lahan yang memiliki struktur alami dan unsur. RTH dapat di tipologikan menjadi 2 tipe, Yaitu RTH binssn dan RTH alami.[18]

Dalam pengembangan RTH sering kali di temukan problem dalam penataan, Adapun problem penataan, antara lain:

a. Pertumbuhan penduduk meningkat

Perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Lamongan secara konstan mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, Kabupaten Lamongan tercatat memiliki jumlah penduduk yakni 1.180.699 jiwa. Lalu, pada tahun 2011 dengan jumlah 1.182.808 jiwa, tahun 2013 naik menjadi 1.184.581 jiwa, tahun 2014 menembus 1.187.082 jiwa, tahun 2015 tercatat 1.187.795 jiwa, tahun 2016 mencapai 1.354.119 jiwa, tahun 2017 mencapai 1.360.987.[19]Dan di tahun 2019 mencapai 1.373.390

[18]Nirwono Jogo and Iwan, *RTH 30 Persen Resolusi Kota Hijau* (jakarta: PT. Gramedia, 2013).
[19]Dyah Salindri Putri, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Paritas Di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan," *Swara Bhumi* 5, no. 03 (2017): 27–33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jiwa.[20] Oleh sebab itu, Pertumbuhan penduduk tersebut dapat memicu tingkatnya kebutuhan cluster perumahan. Kebutuhan cluster perumahan yang tinggi tidak diseimbangkan dengan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat, maka timbul masalah yaitu beberapa kelompok masyarakat yang memilih tidak memiliki rumah ataupun memilih hidup di bangunan lataran sungaiyang tak layak huni.[21]

b. Pengelolaan pedagang kaki lima yang belum tuntas

Menurut penelitian di lapangan,di beberapa jalan protokol memiliki separuh ruas trotoar yang digunakan berjualan para PKL. Sementara itu, jalan Andansari yang digunakan untuk relokasi PKL haya terisi 4 lapak dari 50 lapak yang tersedia.pengakuan dari beberapa PKL mengapa enggan untuk berjualan disitu dikarenakan akses yang tidak memadai dan kondisi lapak yang kurang baik. Akbibatnya PKL tersebut menggangu pengguna jalan yang memakai trotoar.[22]

c. Mulai menjadi kawasan Industri baru.

Di daerah Lamongan yang awalnya hijau sepanjang jalan di penuhi dengan sawah, hutan kota dan perkebunan kini mulai sedikit berganti

---

[20] Disdukcapil, "Pelayanan Online," accessed October 27, 2020, https://disdukcapil.lamongankab.go.id/pelayanan-online.

[21] Imam Arifa'illah Syaiful Huda, Melly Heidy Suwargany, and Diyah Sari Anjarika, *Analisis Daya Dukung Dan Kebutuhan Lahan Pertanian Di Kabupaten Lamongan Tahun 2035*, *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS*, vol. 8, 2017, https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9044.

[22] Nurqomar Hadi, "Lokasi Dan Fasilitas Sentra PKL Andansari Dinilai Tak Memadai, Pedagang Pilih Jualan Di Trotoar," last modified 2017, accessed September 17, 2020, https://www.bangsaonline.com/berita/38823/lokasi-dan-fasilitas-sentra-pkl-andansari-dinilai-tak-memadai-pedagang-pilih-jualan-di-trotoar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi perumahan dan menjadi kawasan Industri baru. Ini juga berdampak pada lingkungan dan menjadi hambatan dalam mewujudkan sustainable developmemt (Pembangunan berkelanjutan) karena banyaknya pabrik yang di bangun di kawasan daerah Lamongan. Dan terkadang ada beberapa yang menimbulkan konflik dengan masyarakat Seperti kasus yang terjadi di Desa Tritunggal, Kec. Babat. Warga melakukan aksi demonstrasu di pabrik yang berlokasi desa tersebut. Mereka berharap agar pihak pemilik pabrik menghentikan proyek perluasan pabrik. Menurut narasumber yang ikut berdemonstrasi di pabrik Nursalam mengataka bahwa perluasan yang dilakukan oleh pabrik tersebut berdampak pada perairan yang mengaliri sawah warga tidak berjalan dengan baik. Warga tersebut juga marah karena tidak adanya sosialisasi bagi warga yang terdampak perluasan tersebut. Warga setempat juga sempat melaporakan kejadian ini ke BLHD Lamongan. Akan tetapi,pihak berwajib belum memberikan tanggapan terkait masalah ini.[23] Salah satu warga yang ikut datang di pabrik tersebut menyampaikan pendapat bahwa pengurukan tersebut berdampak pada saluran irigrasi yang mengaliri sawah menjadi terhambat dan tidak berfungsi lagi.

d. Pengololaan sampah yang belum maksimal

[23]Eko Sudjarwo, "Warga Lamongan Protes Pelebaran Pabrik Yang Sumbat Irigasi Sawah," last modified 2019, accessed July 17, 2020, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4544439/warga-lamongan-protes-pelebaran-pabrik-yang-sumbat-irigasi-sawah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam berita yang di kabarkan di radar bojonegoro.com, seorang warga menyatakan bahwa pihak dari TPST masih belum menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di daerah tersebut. Terlihat di wilayah tersbut masih banyaknya sampah yang berserakan, hal yang disayangkan lagi adalah pengangkutan sampah yang masih sering tidak tepat waktu sehingga mengakibatkan bau yang mengganggu di sekitar wilayah tersebut dan menjadi masalah bagi warga sekitar.[24] Hal tersebut juga merupakan masalah penghambat pengembangan RTH di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.

Permasalahan tersebut sebenarnya tidak hanya dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, Akan tetapi dialami oleh berbagai daerah lokal yang ada di Indonesia. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pengembangan ruang terbuka hijau di Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menggunakan teori green politics dalam prespektif eckersley. Teori Hijau atau *Green Theory* ini pertamakali ada sebagai senjata politik yang sangat kuat. Dalam sejarah sendiri di abad ke 12 telah di wariskan hal-hal mengenai lingkungan hidup ini. Penebangan kayu hutan Yunani, Babilonia, dan Italia merupakan sebuah bukti sejarah tentang warisan tersebut dan pada waktu itu perdaban masih belum maju serta adanya pemeliharaan di peradapan

[24]Amin Fauzie, "Satu Bulan Digunakan, Belum Maksimal," last modified 2019, accessed September 20, 2020, https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/10/20/161792/satu-bulan-digunakan-belum-maksimal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cina dan Mediterania. Politik Hijau merupakan suatu ideologi politis, yang berkaitan tentang lingkungan, demokrasi partisipatoris, dan kelestarian alam. Konsep berdirinya reen politic awalmulanya berdiri saat lahirnya Sierra Clubtahun 1892 yang berada di San Fransisco saat itu gerakan tersebut sangat konservatif. Club tersebut terfokus pada kelestarian alam dan memikirkan masa yang akan datang. Green Politic juga didasari oleh gerakan environmentalis yang ada di Jerman Tahun 1980 bersamaan dengan German Green Party (GGP).[25] Menurut Eckersley menggap bahwa masalah ekosentrisme sangat penting, karena hakikatnya manusia bukansegala-segalanya dalam kehidupan di bumi ini, namun ada komponen lainnya yang berdampingan dengan manusia yang juga perlu di perhatikan seperti tumbuhan, hewan, dan lingkungan hidup lainnya. Oleh karena itu, masalah RTH tersebut perlu di analisis dan diteliti karena mengandung banyak komponen yang beririsan misalnya seperti ekonomi, sosial, politik dll. Kemudian, fungsi RTH yang sebelumnya hanya sebagai ekologi kini bertambah menjadi berbagai aspek.[26]

2. Good Environtmental Governance

Good environmental governance merupakan sebuah konsep yang masih berhubungan dengan good governance. Dalam good governance sendiri

[25]Scott Burchill, *Theories of International Relations* (Palgrave, 2001).
[26]Aruna DP, "PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU PADA PUSAT KOTA LAMONGAN YANG BERBASIS SUSTAINABLE URBAN LANDSCAPE," last modified 2013, http://digilib.its.ac.id/public/ITS-paper-28496-3211203006-Presentation.pdf.4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat 3 pilar utama yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam perkembangan negara saat ini khususnya pemerintahan dituntut untuk bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik serta dapat menciptakan kondisi yang baik pula dengan swasta (pasar) maupun swasta masyarakat seperti transparansi, akuntabilitas dan lain lain. *Good Environmental Governance* merupakan suatu organisasi kepemerintahan yang dapat mengatur tingkat lingkungan hidup dengan baik. Pemerintah dituntut dapat memperluas ruang lingkup kebijakan terkait lingkungan.[27]

Dalam menjalankan *Good Environmental Governance* perlu memikirkan beberapa hal penting dalam aspek meliputi perencanaan, modal yang dimiliki, ekonomi, keuntungan dan pelaksaan. Good Environmental Governance tidak hanya terdiri dari organisasi kepemerintahan yang dapat mengelola lingkungan secara baik akan tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam proses pengembangan daerah. Tanggung jawab terkait permasalahan lingkungan perlu diperhatikan dalam pemerintahan karena dalam *Good Environmental Governance* hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat sangat penting. Pemerintah akan berhubungan dengan pihak terkait permasalahan lingkungan guna memberikan arahan agar tidak hanya mencari untung saja namun juga dampak sosial maupun lingkungan yang ditimbulkan. Pada kesimpulannya pemerintahan yang *Good Environmental Governance* mengusahakan suatu

[27]Bayu Kharisma *''GOOD GOVERNANCE SEBAGAI SUATU KONSEP DAN MENGAPA PENTING DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA (SUATU PENDEKATAN EKONOMI KELEMBAGAAN)''* Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 19, No. 1, Februari 2014. Hal 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi kepemerintahan yang dapat mengatur dengan baik lingkungan dan juga mampu menerapkan asas-asas pembangunan yang berkesinambungan.

3. Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan memiliki luas lebih dari 3,78% jika dihitung dari luasnya wilayah provinsi di Jatim dengan garis pantai 47 km, atau luas daerah lamongan sekitar 181.280 Ha atau setara 1.812,80 Km². Kab. Lamongan memiliki batas daerah admitratif meliputi : Laut jawa di sisi Utara, Kab. Gresik di sisi Timur, Kab. Mojokerto dan Kab. Jombang di sebelah Selatan, dan kemudian sebelah barat terdapat Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro.[28]

Kab. Lamongan letaknyadi 6º 51' 54"LS-7º 23' 6" LS dan 112° 4' 41"BT -112° 33' 12"BT jika dilihat secara geografis. Terbelah oleh Bengawan Solo, wilayah Lamongan dan daratannya dapat dipetakan menjadi 3 bagian meliputi :

a. Dataran rendah subur pada sisi Tengah Selatan dari Kec. Sarirejo, Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Kembangbahu, dan Sugio.
b. Pegunungan kapur dengan kesuburan sedang di sisi Selatan dan Utara yang terdiri dariKec. Paciran, Sambeng, Modo, Bluluk, Sukorame, Ngimbang, Brondong, Solokoro, dan Mantup.

[28]Pemerintah Kabupaten Lamongan, "GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN," last modified 2013, accessed October 17, 2020, https://lamongankab.go.id/wp-content/uploads/sites/33/2013/05/Gambaran-Umum-Kabupaten-Lamongan.pdf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Daerah rawan banjir pada sisi Tengah Utara diantarnya ialah Kec. Maduran, Glagah, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Laren, Karangbinangun dan Sekaran.[29]

[29]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini cara yang diaplikasikan ialah dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi khasus pengmbangan RTH di Kec. Lamongan, Kab. Lamongan denga melihat Permen Pu No. 5 tahun 2008 dalam perspektif Eckersley. Pada studi khasus ini ialah suatu susunan ilmiah yang dilaksanakan yang bersifat terperinci, terus menerus, serta focus pada suatu perstiwa, program, kegiatan, baik bedasarkan Lembaga, kelompok, maupun perorangan, atau organisasi berguna untuk memperoleh informasi menyeluruh perihal kejadian tersebut. Umumnya, kejadian yang akan terjadi merupakan masalah yang benar-benar adanya terjadi, sedangkan yang sedang berlangsung, bukan suatu hal yang terlewatkan.[30]

Kemudian yang dimaksud dengan suatu kejadian, dapat berbentuk sesuatu yang terjadi yang kompleks ataupun kejadian yang sederhana. Peristiwa tersebut terhitung unik. Dalam hal ini unik ialah sesuatu peristiwa yang terjadi pada lokasi tertentu. Menurut pandangan Louis Smith, unik yang dimaksud ialah kasus yang terbatas atau bounded system. Dalam hal ini terbatas ialah bukan berarti harus rumit, namun pasti terdapat suatu keunikan tersendiri. Studi kasus merupakan suatu proses menelaah suatu

[30]H Mudjia Rahardjo and M Si, "*STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF:* KONSEP DAN PROSEDURNYA Oleh" (2017): 1–9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah tertentu yang kemudian hasil temuan tersebut dapat dijadikan sebagai suatu pembelajaran.[31]

B. LokasiPenelitian

Penelitiannya berlokasi di Kec. Lamongan,Kab. Lamongan, dikarenakan DLH, Bappeda serta objek penelitian ini pusatnya di kota Lamongan. Tepatnya diJl. Jaksa Agung Suprapto No.41, Tumenggungan, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Jatim 62214 dan Jl. Basuki Rahmat No.1, Pagerwojo, Sukomulyo, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Jatim 62216. Pemilihan ,lokasi memuat pertimbangan antara lain :

1. Bappeda berperan penting dalam merencanakan pembangunan daerah, karena lembaga ini yang memiliki tanggung jawab terkait pengerjaan pembangunan daerah berdasar kewenangan yang dimiliki.
2. Tugas DLH sebagai pelaksana sekaligus penyusun kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup daerah.
3. Masyarakat dan pedagang sebagai penilai kinerja pemerintah kab. Lamongan khususnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

Disebabkan faktor bersangkutan, penelitian terkaitanalisis pengembangan RTH di Kab. Lamonganmenjadi sebuah ketertarikan untuk ditelaah secara mendalam. Lalu bagaimana dinamika kepentingan antar

[31]David Hizkia Tobing, *Metode Penelitian Kualitatif* (Denpasar, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktor dalam praktik pengembangan RTH menurut para informan mampu memberikan pendapat atau pandangan yang berbeda.

C. Pemilihan subyek penelitian

Subjek penelitian pada metode kualitatif dinamakan narasumber ataupun informan. Tatang Amirin berpandangan yakni narasumber ialah individu yang dijadikan sumber dari informasi yang berfungsi selaku pemberi data berdasar dengan permasalahan yang diteliti.[32]Dalam hal ini, digunakan istilah narasumber/informan dikarenakan mereka dipilih untuk menyajikan informasi yakni anggota DLH, Bappeda, pedagang dan masyarakat di Lamongan. Hal ini berdasar pada tujuan dan masalah tema penelitiannya yakni terkait analisis pengembangan RTH di Kec. Lamongan, Kab. Lamongan.

Tabel 3.1Daftar nama narasumber pada penelitian ini

No.	Nama	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	Galaz anugrah alifatur firmansyah	Laki-Laki	Mahasiswa
2.	Alvis	Laki-Laki	Pedagang
3.	Amada kurniawana	Laki-Laki	Anggota BAPPEDA
4.	Hima	Perempuan	Anggota (DLH) Dinas Lingkungan Hidup
5	Nanik	Perempuan	Anggota (DLH) Dinas Lingkungan Hidup
6	Muhammad Nur Habibi	Laki-Laki	Warga Lamongan
7	Luluk sauminazilah	Perempuan	Warga Lamongan

[32]Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8	Helmi	Laki-Laki	Aktivis Lingkungan
9	Eri Ismaanul Ansori	Laki-Laki	Pemilik pabrik tikar
10	Dafa	Laki-laki	Warga Lamongan

Data yang akan di analisis oleh peneliti dibagi menjadi 2, yani data skunder dan primer. Data sekunder ialah informasi tambahan ytang diperoleh melalui berbagai media baik internet, majalah dll. Sementara data primer ialah data pokok yang didapatkan secara langsung oleh sang peneliti. Dari kedua data tersebut akan dianalisis dan dijadikan landasan pada penelitin.

D. Profil Informan

1. Nama : Galaz anugrah alifatur firmansyah (Galaz)

   Umur : 21 Tahun

   Alamat : Lamongan

   Status : Mahasiswa

2. Nama : Alvis

   Umur : 23 Tahun

   Alamat : Lamongan

   Status : Pedagang

3. Nama : Amada kurniawana

   Umur : 30 Tahun

   Alamat : Lamongan

   Status : Anggota BAPPEDA, subbid sumberdaya alam dan lingkungan hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Nama : Hima

   Umur : 40 Tahun

   Alamat : Lamongan

   Status : Anggota (DLH) Dinas Lingkungan Hidup, bidang tata lingkungan

5. Nama : Nanik

   Umur : 50 tahun

   Alamat : Lamongan

   Status : Anggota (DLH) Dinas Lingkungan Hidup, subag umum

6. Nama : Muhammad Nur Habibi

   Umur : 27 tahun

   Status : Warga Lamongan

7. Nama : Luluk shauminazilah

   Umur : 52 tahun

   Alamat : Lamongan

   Status : Warga Lamongan

8. Nama : Helmi

   Umur : 25 Tahun

   Alamat : Lamongan

   Status : Aktivis Lingkungan

9. Nama : Eri Ismaanul Ansori

   Umur : 40 Tahun

   Alamat : Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Status : Pemilik pabrik tikar

10. Nama : Dafa

Umur : 23 Tahun

Alamat : Lamongan

Status : Warga Lamongan

E. Tahap-tahap Penelitian

Proses atau tahapanpadapenelitian ini ialah:

1. proses perencanaan penelitian, dalam proses ini peneliti akan menentukan tema dan menyusun rangkaian penelitian kemudian menentukan subjek dan objek yang akan diteliti. Selanjtnya memfokuskan lingkup yang diteliti dan memberikan batasan penelitian dalam hal ini berfokus pada lingkup pengembangan RTH serta dinamika kepentingan antar aktor dalam pengembangan RTH. Selanjtnya peneliti juga menggali lebih dalam melalui metodologi, penelitian terdahulu, kajian pustaka, dan menentukan teori yang dipergunakan serta mengumpulkan berbagai pertanyaan yang akan diteliti.
2. Selanjutnya ialah proses pelaksanaan penelitian. Dalam proses ini peneliti akan mengumpulkan berbagai informasi yang didapatkan melalui observasi langsung di lapangan, dialog langsung dengan informan serta melalukan wawancara dan menanyakan bagaimana meraka memandang RTH di Kec. Lamongan, Kab. Lamongan. Kemudian setelah pengumpulan berbagai data dari narasumber dilakukan langkah selanjutnya adalah mengola data dan melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis data agar mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terkait tema yang akan diteliti.[33]

3. Kemudian yang terakhir ialah proses pelaporan setelah menganalisis dan mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan baik dari observasi di lapangan maupun data yang didapatkan dari kajian pustaka mengenai pengembangan RTH di Kab. Lamongan dan dinamika kepentingan aktor dalam proses pengembangan RTH di Kec. Lamongan Kab. Lamongan, selanjutnya ialah meriview ulang dan menata secara sistematis guna mengetahui apakah ada informasi atau data yang terlewatkan. Agar penelitian ini tersusun secara holisitik maka setelah semua tahapan itu selesai kemudian peneliti akan melakukan akumulasi secara menyuluruh baik dari metode, manfaat, dan sampai pada penarikan kesimpulan pada penelitian ini.[34]

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan datanya peneliti mempergunakan teknik:

1. Observasi

   Ialah kegiatan berupa mengamati suatu kejadian atau fenomena di lapangan, baik dalam bentuk pengamatan langsung dari kejadian ada di lapanganmaupun media internet melalui website resmi dan sebagainnya. Observasi memiliki tujuan untukmendapatkan informasi yang belum didapatkan pada saat wawancara. Observasi dapat

[33]Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (jakarta: RajaGrasindo, 2007).
[34]Prof. Dr. Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan IR&D" (Bandung: Alfabet, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merefleksi peneliti dan lebihtelitikepada riset yang sedangdilaksanakan. Pada penelitian ini, peneliti mengaplikasikancara observasi tanpa partisipasi. Peneliti merangkai data lapangan yang berisitentang hal-hal yang kronologis dan satuan-satuan.[35]Pengamatan juga dilaksanakan peneliti untuk menyaksikan realitas langsunganalisis ruang terbuka hijau di kab. Lamongan

a. Pemilihan Informan

Dalam pemilihan informan untuk mendapatkan data yang tepat, sehingga perlu dipilih informan yang diteliti dengan teknik *purposive sampling.* Disini, peneliti menentukan informan penelitian yakni sesorang yang menyajikan data yang sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, sumber dari penelitian ini ialah informan dan data serta masukan dalam menjawab penelitiannya. Informan kunci yang relevan dengan analisis rth di kab. Lamongan. Setelah dari informan kunci ini, lalu peneliti akan mewaancarai pihak yang relevan dengan tema peneliti dan memiliki pengetahuan yaitu Bappeda dan DLH

2. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dengan berupaya menulusuri data dari hasil yang diberikan narasumber. Pada tahap ini, peneliti sebelumnya berupayauntuk mengadakan pendekatan sehingga bisa bersatu dengan informan. Hal tersebutamat penting,

[35]Op.cit., David Hizkia Tobing, hlm. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingatinformasi yang didapatkan dari informan transparandikarenakan kenyamanan para narasumber dan peneliti.[36] Guba dan Lincoln menyatakan bahwa arti mngadakan wawancara ialahmerangkai tindakan, motivasi, perasaan, kejadian, tuntutan, dan kepedulian.[37] Sumber yang ditelusuri adalah hasil dari wawancara yang merupakandata sumber primer. Hasil dari wawancara iniberfungsi sebagaipedoman penulis, dan hasil yang ada akan dimanifestasikan untuk memudahkan penyusanan laporan dan analisis. melaluiwawancara semi terstruktur, Yakniwawancara yang memilikipoin-poin pertanyaan namun dapat menyesuaikan dalam pengaplikasiannyaakan fleksibel dengankondisi dan konteks di lapangan.[38]Menentukan suatu obyek penelitian yang berkaitan adalah memilih narasumber yang dipilih dengan metode *purposive sampling*yang berartiteknik pengambilan sampel yang memiliki maksud untuk tujuan tertentu dan fleksibelsejalan dengan kebutuhan penelitian. Dalam hal ini peneliti pemilihan informannya yang benar-benar mempunyaiciri khusus menjadi sampel yang telah di tentukan.[39] Informan-informan yang telah ditentukanakan bermanfaat untuk mengobservasi kondisi dan situasiapapun yang berhubungan dengan obyek atau tema penelitian.

[36]Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*.
[37]Ibid., 212.
[38]Op.cit., David Hizkia Tobing, hlm. 18
[39]Prof. Dr. Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan IR&D."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informan-informan sumber data dalam penelitian bukan saja memberikan data akurat dan ditil dari prakara khusus, lebih dari itu, informan juga akan memudahkan peneliti untuk dapat membuka akses pada obyek yang menjadi fokus Penelitian. Oleh karena itu, pada kondisi dan keadaan yang khusus di mana permasalahn dan pertanyaan penelitian. [40] Dengan melibatkan beberapa narasumber informasi sebagai peran utama dalam memperluas anggota kelompok lain yang dibutuhkan untuk penelitian. Diharapkan penelitian akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

3. Dokumentasi

Teknik penyajihan data dalam dokumentasi ialahcara mendapatkan data yang didapat darimanifestasi diskusi, manifestasijadwal, catatan dan data yang sesuai dalamjudul yang telah diambil. Dokumentasi berfungsiagarmendapatkan keakuratan data dan sebagai tolak ukurproses dalam peneliitan serta keabsahan. Dokumentasi didapatkan melalui majalah, buku, catatan, dokumen-dokumen, rangkuman media online dan lain-lain yang berkaitan untukanalisis pengembangan RTH di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan yang diperuntukkan peneliti untuk memperoleh data yang di cari.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitain ini tahapan analisa data adalah poin yang penting terutama dalam penelitian kualitatif agar bisa di tarik sebuah kesimpulan

[40]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tepat. Dalam penelitian ini mengutip pemikiran Miles dan Huberman yaitu dengan cara interaktif. Cara ini terdapat 3 poin yang penting meliputi ; reduksi, penyajian, verifikasi dan yang terakhir yaitu kesimpulan.[41]Penjelasan tentang 3 hal ini sebagai berikut:

a. Reduksi data, dapat adalahtahapan penentuan pemusatan, peringkasan, pengabstrakan, dan mengubah semua data yang terkumpul. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memfokuskan, mengarahkan, dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Reduksi data merupakan poin yang berpengaruh, karena diperlukandalammemfokuskan pointentang apa yang diteliti dalam menggambarkan hasil penelitian dengan bagian-bagian tertentu. Kemudian, tahapan ini memberikan kemudahan untuk peneliti dalammengolah data terhadap Analisis pengembangan RTH di Kec. Lamongan, Kab. Lamongan
b. Penyajian data (*display)*, adalah tahapan selanjutnya.Huberman dan Miles membuat pengertian*display*dipergunakan agarmengetahui sebuah kesimpulan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu penyajian data dapat membantu memahami proses pengolahan data. dikarenakanpeneliti bisa mengetahui ilustrasi objek yang di teliti lebih tersusun sitematis dan terfokus sesuai dengan tujuan awal penelitain tersebut. Dan yang terakhir penyajian data dan reduksi saling keterkaitan oleh karena itu tidak dapat dipisahkan

[41]Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (jakarta: Erlangga, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Verifikasi data (pengambilan keputusan), ialah poin dari penambilan kesimpulan data yang ditunjukan. Berfungsi untuk melihat seberapa jauh penelitian terhadap data- data yang diperoleh dalam penelusuran data pustaka ataupun observasi lapangan. Dari verifikasi selanjutnya dapat dijabarkan sehingga dapat lebih fokus serta medalam pada data yang komplit dan kuat. Sumber data di ambil menggunakan tahapan wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan menggunakan mode Miles dan Huberman. Dalam menganalisis data yang berjenis penelitian kualitatif deskriptif, ialah melakukan analisisdatalapangan berupa kualitatif. Huberman dan Miles mengartikan kegiatan dalam menganalisis kualitatif menggunakan interaktif serta dilakukan sampai selesai.[42]

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

1. Meningkatkan ketekunan

Dalam verifikasi data diperlukan keakuratan, kebenearanserta keabsahan sumber informasi yang didapatkanlalu dianalisa saat awal memulai karya ilmiah akan mempengeruhi ketepatan dan keabsahan hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian dan masalah yang diambil. Agar supaya dalam proses penelitain berjalan dengan hasil yang tepat dan benar maka hal yang diperlukan antara lain[43]

[42]Ibid.
[43] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (jakarta: Kencana, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Keaktifkan peneliti di lapangan bersama narasumber dengan mengikuti berbagai kegiatan kajian-kajian dan diskusi. Keakuratan data dipengaruhi oleh kemitmen atau niat, intensitas, dan keikutan peneliti dalam penelitain.
b. Menambah keteliian dalam observasi. Ketelitian dalam observasi akan mempengaruhi keabsahan data yang hendak diteliti
c. Menggunakan data yang akurat dan tepat. Verifikasi dan informasi yang didapatkan dan dikumpulkan lebih akan akurat jika ditambahkan dengan berbagai referansi yang kredibilitas. Eisener menyarankan dalam pemakaian referensi yang benar untuk meningkatkan keabsahan data yang sudah didapatkan.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas menurut Sugiyono yakni sebagai upaya pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan watu.[44]Pada teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan dan sumber yang ada, seperti hasil wawancara dengan masyarakat, pedagang, Anggota DLH, Mahasiswa, Anggota Bappeda, Aktivis lingkungan dan Pengusaha. Dengan menggunakan triangulasi data, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data dan sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik dan sumber data.

[44]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D.* (Bandung : Alvabeta, 2014) hal. 273

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan menggunakan teknik triangulasi sumber maka peneliti mengecek data yang didapat melalui beberapa sumber. Selanjutnya dengan menggunakan triangulasi teknik yakni dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda, sedangkan dalam triangulasi waktu peneliti menguji kredibilitas data dari hasil penelitian berdasarkan selang waktu seperti pra penelitian hingga proses penulisan laporan penelitian.[45]

I. Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal penelitian

No.	Uraian Kegiatan	Oktober				November				Desember				Februari			
		Minggu Ke															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Perencanaan Penelitian			■													
2.	Persiapan Penelitian				■												
3.	Penyusunan Proposal				■												
4.	Seminar Proposal					■	■										
5.	Pelaksanaan Penelitian							■	■	■	■	■	■	■	■		
6.	Laporan Penelitian															■	■

[45]Ibid, hal. 241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran umum Kab. Lamongan

Lamongan termasuk dalam Kabupaten StrategisMetropolitan yang berdekatandengan sejumlah area daerah Kabupaten/Kota di daerah Jawa Timur yang meliputi Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya,Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kota Mojokerto. Lamongan juga termasuk Pusat Kegiatan Nasional (PKS) yang menjadi pendukung pelayanan di wilayah timur Indonesia.

Meskipun Kab. lamogan termasuk wilayah strategis dan menjadi kawasan pusat pendukung pelayanan di wilayah timur Indonesia namun Kab. Lamongan rawan terjadi bencana. Dilihat dari gambaran umum secara demografis, iklim, geografis, dan topografis Kab. Lamongan juga termasuk kawasan yang rentan akan bencana banjir.[46]

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Lamongan memiliki luas diatas 3,78% jika dihitung dari luasnya area provinsi di Jatim dengan garis pantainya sepanjang 47 km, atau luas daerah lamongan sekitar 181.280 Ha atau setara 1.812,80 Km^2. Kabupaten Lamongan memiliki batas daerah admitratif meliputi : Laut jawa di sisi Utara, Kab.Gresik di sisi Timur, Kab. Mojokerto dan Kab. Jombang di sisi Selatan, serta kemudian sebelah barat terdapat

[46]Naskah akademis RTRW lamongan, *''Rencana tata ruang wilayah kab. lamongan tahun 2011-2030''*, Hal. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Berikut ini merupakan gambar peta adminitrasi daerah Lamongan yang bisa diketahui dari Gambar 4.1 :

Gambar 4.1 : Letak Administrasi Wilayah Kabupaten Lamongan

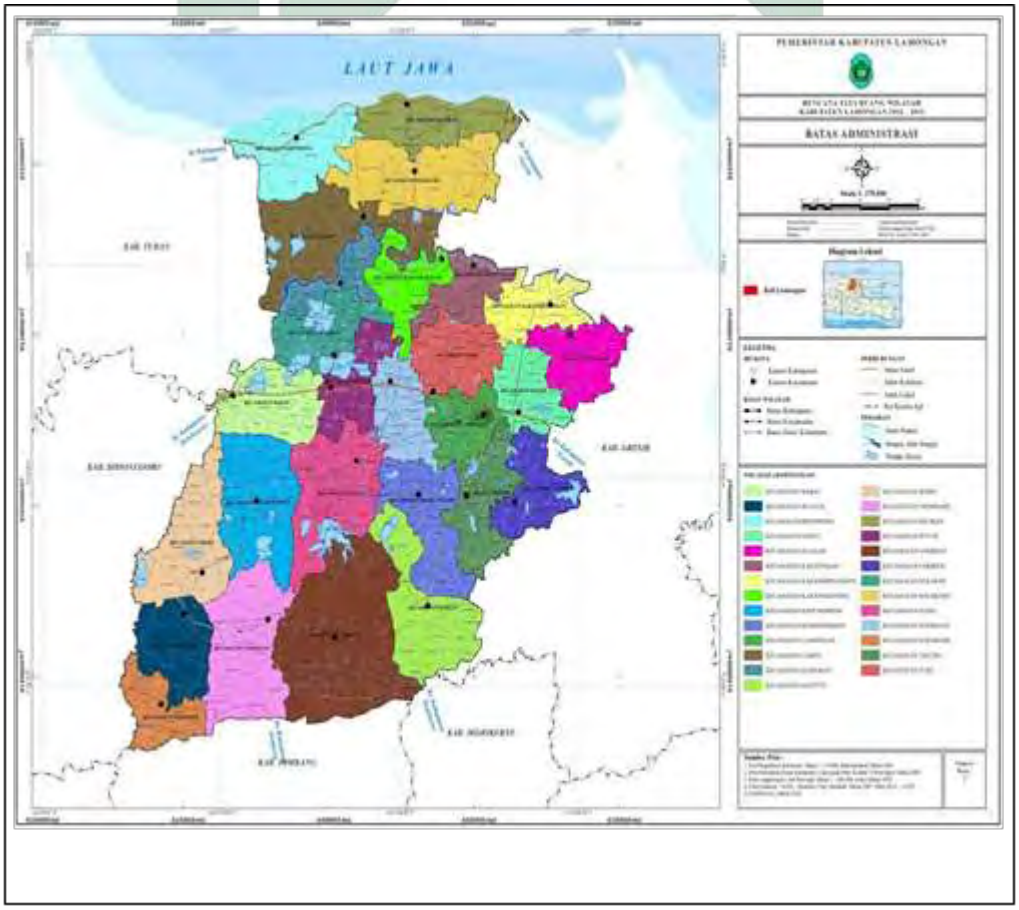

Kab. Lamongan berada di 6º 51’ 54”LS-7º 23’ 6” LS serta 112° 4’ 41”BT -112° 33’ 12”BT jika dilihat secara geografis. Terbelah oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bengawan Solo, wilayah Lamongan dan daratannya dapat dipetakan menjadi 3 bagian meliputi:

a. Dataran rendah subur pada sisi Tengah Selatan dari Kecamatan Sarirejo, Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Kembangbahu, dan Sugio.
b. Pegunungan kapur dengan kesuburan sedang di sisi Selatan serta Utara yang terdiri dari Kecamatan Paciran, Sambeng, Modo, Bluluk, Sukorame, Ngimbang, Brondong, Solokoro, dan Mantup.
c. Wilayah rawan banjir pada sisi Tengah Utara diantarnya ialah Kecamatan Maduran, Glagah, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Laren, Karangbinangun dan Sekaran.[47]

2. Kondisi Topografis

Dilihat dari topografis, daerah Lamongan memiliki tinggi 0 sampai 25 mdpl sekitar 50,17% dari total luas daerah yaitu sekitar 45,68% ada di ketinggian 25 sampai 100 mdpl sebanyak 45,68%, sisanya 4,15% ada lebih dari 100 mdpl. Menurut hal itu, Kab.Lamongan termasuk daerah yang sangat datar. Keadaan kawasan yang sangat datar itu bisa menyebabkan daerah Lamongan berdampak pada kondisi bencana seperti banjir. Jika curah hujan relatif tinggi, banjir dapat terjadi.

[47]Pemerintah Kabupaten Lamongan, "GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN," last modified 2013, accessed October 17, 2020, https://lamongankab.go.id/wp-content/uploads/sites/33/2013/05/Gambaran-Umum-Kabupaten-Lamongan.pdf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di daerah pesisir Kab. Lamongan ialah termasuk dalam Pegunungan Kapur di sisi utara. Di sisi tengah ada dataran rendah serta bergelombang serta beberapa tanah rawa. Di sisi selatan ada pegunungan yang menjadi ujungtimur dari Pegunungan Kendeng serta ada Sungai BengawanSolo yang mengalir di sisi utara. Rangkaian keadaan area itu memperlihatkan akibat pengaruh pada keadaan bencana di Kabupaten Lamongan serta keadaan itu pun tidak sama di tiap kecamatan di Kab.Lamongan yang mana total kecamatan di Kab. Lamongan sebanyak 27 Kecamatan yang mempunyai keadaan kebencanaan yang tidak sama.

Kabupaten Lamongan mempunyai beragam iklim, hal itu dikarenakan ada bermacam-macam ketinggian tempat area Kab. Lamongan yang berada disekitar 0-100 m dpl menurut Data Dinas PU Perairan menyatakan bila tercatat rerata curah hujannya tahun 2015 di Kab. Lamongan yaitu sekitar 1.810 mm/tahun dengan total hari mencapi 80 hari dengan rerata curah hujannya selama 10 tahun terakhir /tahun. Sementara rerata curah hujannya tahun 2016 yaitu 2.685 mm/tahun dengan total hari sekitar 208 hari dengan rerata curah hujannya selama 10 tahun terakhir /tahun, sementara rerata curah hujan

tahun 2017 sekitar 41.735 mm /tahun dengan total 170 hari dengan rerata curah hujannya selama 10 tahun terakhir pertahun. Sementara keadaan cuaca di Kab. Lamongan tidak dapat dipastikan, tetaoi dapat dipastikan sekitar bulan Maret sampai Agustus diprediksi musim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemarau, sementara di bulan September sampai Februari diprediksi musim hujan di kawasan Kab. Lamongan.

3. Kondisi Demografis

Jumlah Penduduk Kab.Lamongan menurut wilayah di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan pada tahun 2010-2019, Jumlah Penduduk 1.373.390. Dari Tabel 4.1 mencantumkan rincian penduduk masing-masing daerah, yaitu:

Tabel 4.1Jumlah penduduk di Kab. Lamongan Sampai akhir tahun 2019

No.	2010	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2019
1.	1.180.699 jiwa	1.182.808 jiwa	1.184.581 jiwa	1.187.082 jiwa	1.187.795 jiwa	1.354.119 jiwa	1.360.987 jiwa	1.373.390 jiwa

Sumber :disdukcapil.lamongankab.go.id

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui total penduduk di Kab. Lamongan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Dari Data Kependudukan tercatat bila areaKab. Lamongan mempunyai 462 desa serta 12 kelurahan yang tersebar di semua kawasan daerahKab. Lamongan serta mempunyai luas daerah yaitu 177.784Ha yang menurut rekapitulasiluas daerah di tiap kecamatan di Kab. Lamongan.Rincian total desa serta kelurahan beserta luas daerah setiap kecamatan di Kab. Lamongan akan ditampilkan dalam Tabel 3 berikut ini :

Tabel 4.2 Jumlah Desa, Kelurahan, serta Luas Wilayah Per Kecamatan di Kab. Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JUMLAH DESA/KELURAHAN					
NO	**KECAMATAN**	**DESA**	**KELURAHAN**	**JUMLAH**	**LUAS WILAYAH (Ha)**
1.	Babat	21	2	23	6.245
2.	Bluluk	9	-	9	5.682
3.	Brondong	9	1	10	7.513
4.	Deket	17	-	17	4.366
5.	Glagah	29	-	29	5.164
6.	Kalitengah	20	-	20	3.719
7.	Karanggeneng	18	-	18	4.337
8.	Karangbinangun	21	-	21	4.663
9.	Kedungpring	23	-	23	9.413
10	Kembangbahu	18	-	18	6.802
11.	Lamongan	12	8	20	4.107
12.	Laren	20	-	20	9.817
13.	Maduran	17	-	17	3.417
14.	Mantup	15	-	15	8.193
15.	Modo	17	-	17	8.387
16.	Ngimbang	19	-	19	10.554
17.	Paciran	16	1	17	5.931
18.	Pucuk	17	-	17	4.531
19.	Sambeng	22	-	22	16.725
20.	Sarirejo	9	-	9	5.024
21.	Sekaran	21	-	21	5.288
22.	Solokuro	10	-	10	9.351
23.	Sugio	21	-	21	8.882
24.	Sukodadi	20	-	20	4.797
25.	Sukorame	9	-	9	4.030
26	Tikung	13	-	13	5.509
27.	Turi	19	-	19	5.235
KABUPATEN LAMONGAN		**462**	**12**	**474**	**177.784**

Berdasarkan table diatas, diketahui luas tiap-tiap kecamatan yang tidak sama. Kecamatan dengan luas terbesar yaitu di Kecamatan Sambeng yang luasnya 16.725 Ha, sementara Kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Maduran yang luasnya 3.417 Ha. Bencana yang terjadi bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi ancaman terhadap besaran luas bahaya yang terkena di tiap wilayah kecamatan di Kab. Lamongan. Makin tinggi kerentanan daerah itu, lalu menjadi makin besar kemungkinan luas bahaya serta akibat yang dimunculkan karena bencana. Berikut adalah peta resiko bencana banjir di Kab. Lamongan yang mana pada peta dibawah ini menunjukkan penyebaran luas ancaman bahaya serta bahaya yang diakibatkan dari bencana banjir. Peta resiko bencana bisa diketahui dalam **Gambar 4.2**berikut ini:

Gambar 4.2 : Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

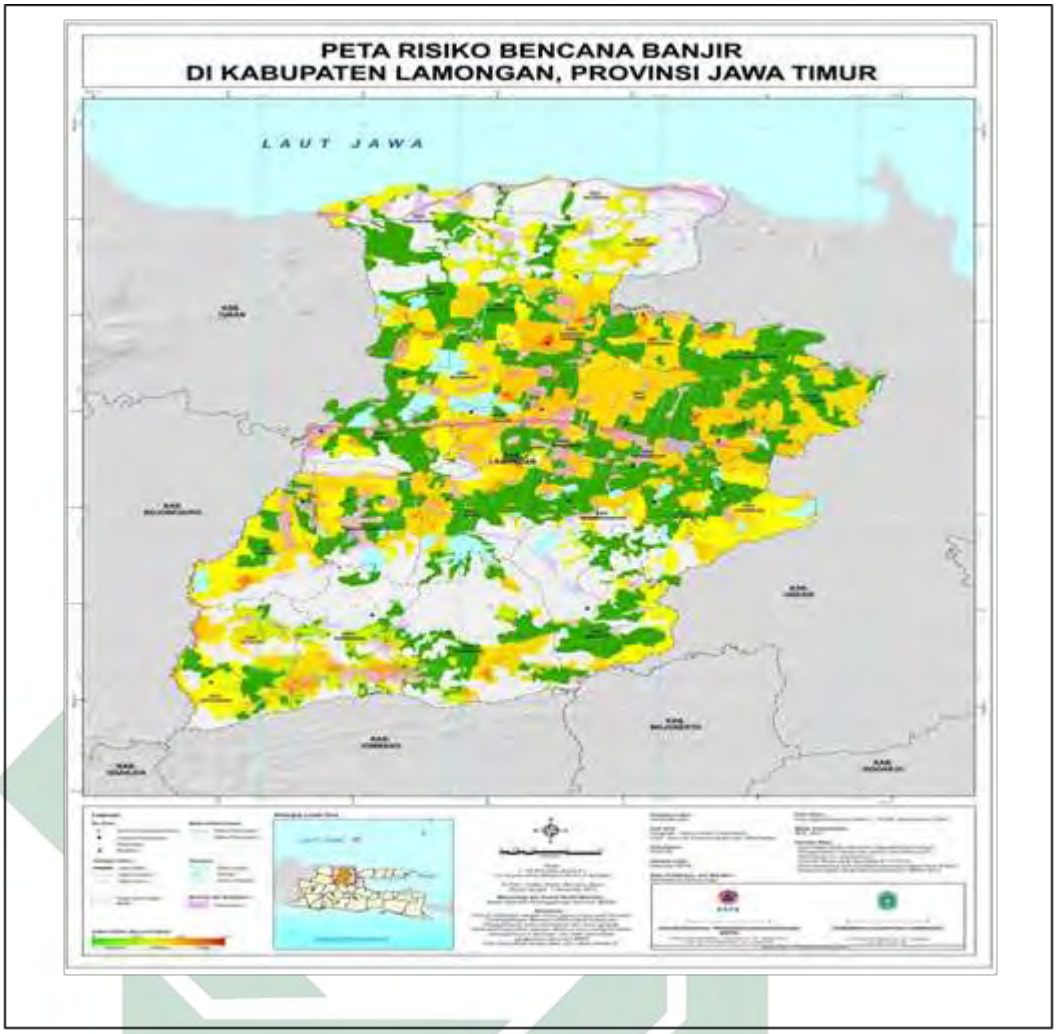

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lamongan Tahun 2016- 2020

Dari peta di atas menunjukkan bila ancaman yang dikarenakan bencana banjir yang terjadi di Kab. Lamongan terjadi di 7 Kecamatan serta 12 Desa di wilayah Kab. Lamongan yang terkena bencana banjir antara lain Kec. Babat terdapat di Desa Truni dan Sogo, Kec. Sekaran di Desa Besur dan Keting, Kec. Maduran di Desa Panggatrejo dan Pringgoboyo, Kec. Turi di Desa Klemagigede serta Klemagilor,Kec. Laren di Desa Bulutigo, Kec. Kalitengah di Desa Bojoasri serta Blajo,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kec. Karangbinangun di Desa Blawi. Hal itu disebabkan karena tujuh Kecamatan serta 12 Desa di wilayah Kab. Lamongan merupakan kawasan wilayah yang ada disekitar bantaran sungai bengawan solo. Bencana banjir adalah sebuah bencana yang termasuk pada tipe bencana alam klimatologi yakni bencana alam yang dikarenakan pergantian iklim, suhu serta cuaca. Bencana banjir yang terjadi ketika musim penghujan di tiap tahun itu tidak hanya merendam 7 Kecamatan serta 12 Desa bencana banjir tersebut merendam pula bidang pertanian serta bidang tambak dan putusnya jalan alternatif Surabaya-Tuban yang membuat lumpuh karena bencana banjir yang dikarenakan air dari sungai bengawan solo yang meluap.

Sehingga, BPBDKab. Lamongan memberi status peringatan dini pada semua masyarakat Kab.Lamongan agar selalu waspada serta berhati-hati ketika menjalankan semua kegiatan sehari-hari. Status peringatan dini diterbitkan BPBDKab. Lamongan disebabkan volume air sungai bengawan solo berdasarkan data dari Dinas Sumber Daya Air Kab. lamongan bila intensitas curah hujannya hingga 1.810 mm/tahun dengan intensitas air sungai bengawan solo. Jadi diprediksi terjadi bencana banjir. Sehingga bila dalam kondisi hujan dengan intensitas tinggi tak dapat diatasi dengan cepat, tanggap, tangkas, jadi menyebabkan efek, ancaman dan bahaya yang begitu tinggi yang disebabkan karena adanya banjir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahaya bencana yang muncul di wilyah tidak hanya terpengaruh dari besarnya total kepadatan penduduk di tiap kecamatan di Kabupaten Lamongan, tetapi juga terpengaruh dari posisi serta luas kawasan dalam wilayah yang digolongkan menjadi wilayah rawan bencana. Sehingga denga terdapatnya wilayah yang penduduknya yang sangat besar yang menempati area wilayah yang berpotensi terjadi bencana kemudian bisa memunculkan pengaruh bahaya yang begitu besar untuk penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana.

B. Penetapan kawasan strategis lamongan

Kawasan strategis adalah daerah potensial yang begitu vital pada lingkup Kabupaten sebab memiliki pengaruh pada ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan. kawasan strategis itu terbagi dalamkawasan : strategis ekonomi, strategis sosial serta budaya, serta strategis penyelamatan lingkungan hidup. Rancanganpenataan area strategis kabupaten harus diutamakan sebab memiliki pengaruh begitu vital pada lingkup kabupaten atau kota terhadap ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan hidup. Kawasan strategis adalah wilayah yang didalamnya berjalan aktivitas yang berpengaruh besar pada :

1. Tata ruang di kawasan sekelilingnya;
2. aktivitas lain di sector yang setipe serta aktivitas di sektor lainnya; maupun
3. meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi, terkait Rencana penentuan KSK dalam keperluan pertumbuhan ekonomi, terdiri dari:

1. Kab. Lamongan adalah bagian dari Gerbangkertosusila selaku kawasan strategis nasional (KSN);
2. Kawasan Strategis Ekonomi adalah wilayah perindustrian pendukung perdagangan/pelabuhan bebas yaitu Lamongan Shorebase (LS) di Kecamatan Paciran selaku wilayah strategis provinsi (KSP);
3. Kawasan Agroindustri Gelang Utara (Gresik dan Lamongan) yaitu industri pengolahan ikan laut di Kec. Brondong serta Paciran selaku KSP;
4. Kawasan Kerjasama Regional segitiga emas (Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro) selaku KSP;
5. Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong di Kec. Brondong;
6. Kawasan wisata pantai utara Lamongan (WBL, Gua Maharani dan zoo, Makam Sunan Drajad, Makam Sendang Duwur dan TPI di Pantura);
7. Kawasan Pelabuhan ASDP di Kec. Paciran;
8. Kawasan agropolitan di daerah selatan; serta
9. Kawasan perdagangan serta jasa di Kec. Babat.

Usahapengelolaandaerah tersebut yaitu melaksanakan pengamanan pada aera maupun menjaga tempat dan ruang di sekelilingnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.3 : Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Dengan:

Pelabuhan ASDP Paciran

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

WBL

LIS

Perkotaan Babat

10. Kawasan Gerbangkertosusila (GKS)

Kawasan inimeliputiKab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo sertaKab. Lamongan. menurut RTRW Provinsi JatimKab. Lamongan berpeluang menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan kawasan industri yaituLS, pelabuhan, pariwisata, dan wilayah industri yang menciptakan satu sentralisasi.

11. Kawasan Lamongan Shorebase (LS)

Rencana pengembangan kawasan ini, yang secara umum adalah suatu konsep terintegrasi yang memberi fasilitas terhadap pemakaian sumber daya serta sarana eksplorasi-produksi di bidang migas serta kepelabuhan supaya bisa menunjang teraihnya operasi yang efisien lewat penataan rantai suplai serta distribusi barang. definisi konsep terpadu terdiri dari penyediaan layanan jasa, barang, serta semua aktivitas pendukung industri Migas serta kepelabuhan ada di LS dengan standar internasional.[48]

Gambar 4.4: Lamongan Shorebase (LS)

12. Kawasan Agroindustri Gelang Utara (Gresik dan Lamongan)

Kawasan iniberada disepanjang Pantura yaitu area yang mempunyai potensi dari sisi industri, pelabuhan serta pariwisata. Hal itu diketahui

[48]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pertumbuhandaerah Pantura yang sangat cepat melalui beragam aktivitas investasi disektor industri, pelabuhan serta pariwisata.

13. Kawasan Kerjasama Regional segitiga emas (Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro)

    Melalui perkembangan kawasan pantura serta potensi minyak di Kab. Bojonegoro kemudian dibutuhkantata ruangwilayah strategis regional segitiga emas. Jadi kedepannya potensi yang tersedia bisa dioptimalkan demi kemajuan bersama.

14. Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

    Kawasan ini mempunyai potensi perikanan laut dengan predikat produksipaling tinggi di Jatim, dengan berlabuhnya kapal nelayannya ±2.000 kapal/bulan dan hasil tangkapan nelayannya ± 100 ton/hari dengan hasil beragam jenis ikan yaitu: Dorang, Kerapu, Bawal, dan yang lain. mayoritasyang dipasarkan adalah ikan segar untuk pasar lokal serta ekspor, sertaikan yang berhasil ditangkap nelayanterdapatpula yang diolah sebagai produk olahan contohnya ikan asin, krupuk ikan, terasi serta petis. Pelabuhan Sedayulawas menyiapkan sarana berlabuh transportasi laut yang digunakan sebagai bongkar muat barang ataupun sarana nelayan lokal.

Gambar 4.5 : Kawasan Strategis Pelabuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15. Kawasan Wisata Pantai Utara Lamongan

Kawasan ini dikuasi oleh WBL yang menjadi kawasan pariwisata skala regional serta nasional yang mana bisa menaikkan perkembangan ekonomi tinggi, maka bisa memacu besarnya kegiatan di sekitar area itu. Kawasan wisata tersebut juga memunculkan multiplayer efek pada aktivitas lainnya misalnya munculnya sarana perhotelan, pusat perdagangan serta jasa, dan memacu pertumbuhanberbagai objek wisata lain yang ada di kawasan Pantura serta sekelilingnya. kawasan objek Wisata penunjang WBL di sekelilingPantura Lamongan meliputi Maharani Zoo serta Goa, Makam Sunan Drajad, Makam Sendang Duwur, Pelabuhan Rakyat Sedayu Lawas, serta TPI Pantura.

Gambar 4.6 : Wisata Bahari Lamongan yang merupakan Obyek Kawasan Strategis Ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16. Kawasan Pelabuhan ASDP Paciran

Pembangunan pelabuhan ASDPKab. Lamongan tujuannya untuk memberi fasilitas terciptanya jalur penyeberangan/ transportasi laut sebagai upaya mencukupi alur pelayaran Nasional. Pembangunan pelabuhan itu terletak di Desa Tunggul Kec. Paciran Kab. Lamongan yang dikhususkan untuk pelabuhan penumpang

Gambar 4.7: Pelabuhan ASDP Paciran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

17. Kawasan Agropolitan

Adalah sebuah area industri yang asal bahan bakunya dari hasil pertanian serta perkebunan lalu diolah sebagai produk yang mempunyai nilai ekonomins. Kawasan Agropolitan dikembangkan dibagian selatan

18. Kawasan Perdagangan dan Jasa Babat

Kawasan iniada di Kec. Babat adalahsisi barat Kab. Lamongan yang berbatasan langsung dengan 3 (tiga) Kabupaten yakniKab. Jombang, Kab. Tuban sertaKab. Bojonegoro, sekaran area itu adalah pusat perdagangan yang bisa mencukupi keperluan menurut regional.

Gambar 4.8 : Kawasan Strategis Perdagangan dan Jasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

19. Kawasan Strategis Sosial dan Budaya

Rencana penentapan Kawasan Strategis Khusus dalam kebutuhan sosial serta budaya terdiri dari:

a. Area Makam Sunan Drajat di Kec. Paciran;
b. Area Sendang Duwur di Kec. Paciran;
c. Area Makam Jaka Tingkir di Kec. Maduran;
d. Area Makam Nyai Ratu Andongsari di Kec. Ngimbang
e. Desa Balun di Kec. Turi
f. Berbagi situs yang ditentukan sesuai Perda

Usaha pengelolaan kawasan tersebut yaitu dengan menjalankan pengamanan pada wilayah maupunmenjaga tempat dan ruang di sekeliling bangunan yang mempunyai nilai-nilai sejarah, situs serta area dengan bentukan geologi khusus dengan menyusun ketentuan yang harus diperhatikan.

Gambar 4.9 : Kawasan Strategis Sosial Budaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan:

Makam Sunan Drajat

Monumen Van Der Wijck

Makam Sendangduwur

Makam Nyai Ratu Andongsari

Makam Jaka Tingkir

Desa wisata Balun

Rencana penataandi area tersebut adalah dengan selalu menjaga serta melindungi wujud serta fungsi aslinya maka tetap terpelihara kelestariannya sebab area tersebut mempunyai nilai sejarah yang kentaldiluarsitus sejarah juga menjadi area berjalannya ritual untuk masyarakat lokal.[49]

[49]Ibid,. Hal 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

20. Kawasan Makam Sunan Drajat

Sunan Drajat adalah sosok yang menyebarkan agama islam di Jawa sertatermasuk dari 9 wali. Maka dalammenghargai jasanya Sunan Drajat serta juga pada usahamenjaga berbagai benda sejarah, di area makam dibangun Museum Sunan Drajat. Makam Sunan Drajat sudah dipastikan menjadilokasi Wisata Ziarah oleh Menbudpar.

Gambar 4.10 : Makam Sunan Drajat

21. Pengembangan Monumen Van Der Wijck

Pemerintah Belanda memberi apresiasi untuk masyarakat Brondong yaitu tugu peringatan Monumen van Der Wijck, yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Sebab jasa para nelayan Brondong yang turut menolonguntuk kapal mewah milik perusahaan perkapalan Belanda, Van Der Wijck, yang tenggelam disekitar perairan Brondong.[50]

[50]Ibid., hal. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.11:Monumen Van Der Wijck

22. Kawasan Makam Sendangduwur

`Sunan Sendang Duwur ialah gelar yang Sunan Drajat berikan ke Raden Nur Rahmad, dikarenakan jasa beliau dalam mendakwahkah Islam. Bangunan makam ini dengan arsitektur yang tinggi melukiskan penggabungan dari kebudayaan Islam serta Hindu. Makam tersebut letaknya di Desa Sendangduwur, Kec. Paciran. Meskipun posisi komplek makamnya di dataran yang tergolong tinggi, tetapi tidak sulit bagi kendaraan untuk menjangkaunya.

23. Kawasan Makam Nyai Ratu Andongsari

Makam ini cenderung dikenal dengan makam Gunung Ratu yang dipercaya selaku ibu kandungnya Patih Gajah Mada dari Majapahit.Tempat ini tergolong disakralkan masyarakat yang terbukti dengan diadakannya acara ritual yakni oleh masyarakat Desa Cancing ataupun Blawi, yang berbentuk acara Sedekah Bumi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dekat tempat bersangkutan ada sendangSidowayah, yang warna airnya selalu kuning tak pernah jernih, disamping ada pula sendang dengan air yang pasti jernih dan digunakan untuk sumber air bersih bagi warga sekitarnya.

Gambar 4.12 : Makam Nyai Ratu Andongsari

24. Kawasan Makam Jaka Tingkir

Ialah lokasi tujuan wisata ritual obyek wisata situs makam yang terkenal dengan area makam Mbah Anggungboyo, hal tersebut terlihat dari tulisan tangan di Gapura makamnya. Di kompleks ini ada makam Mbah Anggungboyo yang bersandingan dengan makan sang isteri yakni Putri Campa, sementara sejarah lainnya mengatakan nama Jaka Tingkir tidak ada di lokasi bersangkutan, tetapi masyarakat meyakini bahwa ia adalah Anggungboyo.

25. Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana penetapan Kawasan Strategis Khusus untuk menyelamatkan lingkungan hidup, berupa kawasan di bawah.

a. DAS Bengawan Solo selakuKSP;
b. Aliran sungai Bengawan Solo;
c. Waduk Gondang di Kec. Sugio; dan
d. Hutan bakau di pantura.

Perencanaan pengembangan area ini ialah untuk mengamankan kawasan atau sebagai perlindungan tempat dan ruang di dekatnya. Daerah ini memiliki beragam kehidupan tumbuhan serta hewan tertentu dan berfungsi untuk menyelamatkan lingkungan hidup dengan beragam perannya selaku kawasan lindung. Kawasan ini bisa dipergunakan selaku tempat wisata dan sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kab. Lamongan.[51]

Gambar 4.13 : Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan hidup

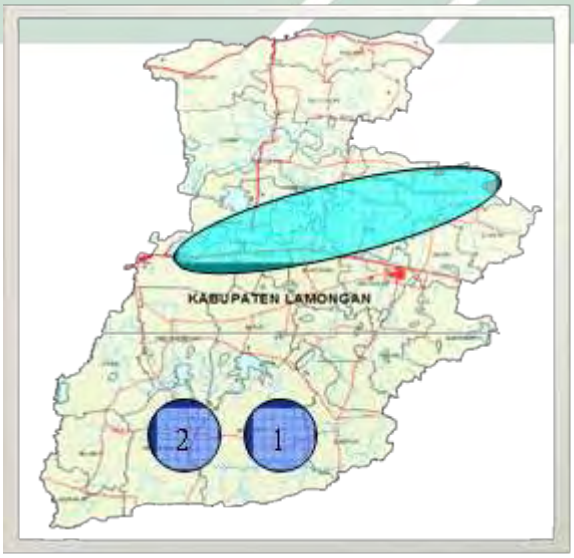

[51]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan:

Aliran sungai Bengawan Solo

1 Waduk Gondang

2 Waduk Prijetan

26. DAS Bengawan Solo

DAS Bengawan Solo melalui 17 Kabupaten dan 3 Kota yang letaknya di 2 provinsi yakniJateng dan Jatim. Pemanfaaatan DAS Bengawan Solo, berfungsi selaku sumber bahan baku air, irigasi dan lainnya.

27. Aliran Sungai Bengawan Solo

Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, maka masyarakat Lamongan menggunakan sungai tersebut selaku sumber air bersihnya, disamping itu dipergunakan untuk mengairi sawah. Sungai yang sumbernya dari kota Solo dan melalui jawa timur ini termasuk di Kab. Lamongan yakni sejumlah 8 kecamatan yang dilewati aliran sungai tersebutyakni Kec. Karanggeneng, Maduran, Laren, Babat, Karangbinangun, Glagah, Sekaran dan Kalitengah.

Gambar 4.14 Aliran Sungai Bengawan Solo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

28. Pengembangan Waduk Gondang

Waduk ini letaknya di Desa Gondang Lor dan Desa Deket Agung, Kec. Sugio, kira-kira 19 Km kearah barat kota Lamongan. Disamping fungsi pokoknya untuk pengairan sawah dan tambak masyarakat Lamongan, juga selaku lokasi obyek Wisata.

Gambar 4.15 :Waduk Gondang

29. Pengembangan Waduk Prijaten

Waduk ini letaknya di Kec. Kedungpring. Pada umumnya, waduk tersebut mempunyai fungsi serupa dengan Waduk Gondang, namun tidak begitu luas sehingga potensi wisatanya mengalami perkembangan yang kurang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.16 : Waduk Prijaten

Supaya lebih memahaminya terkait kawasan strategis Kabupaten Lamongan bisa disimak dalam Peta 4.17

Gambar 4.17 : Peta kawasan strategis Kab. Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

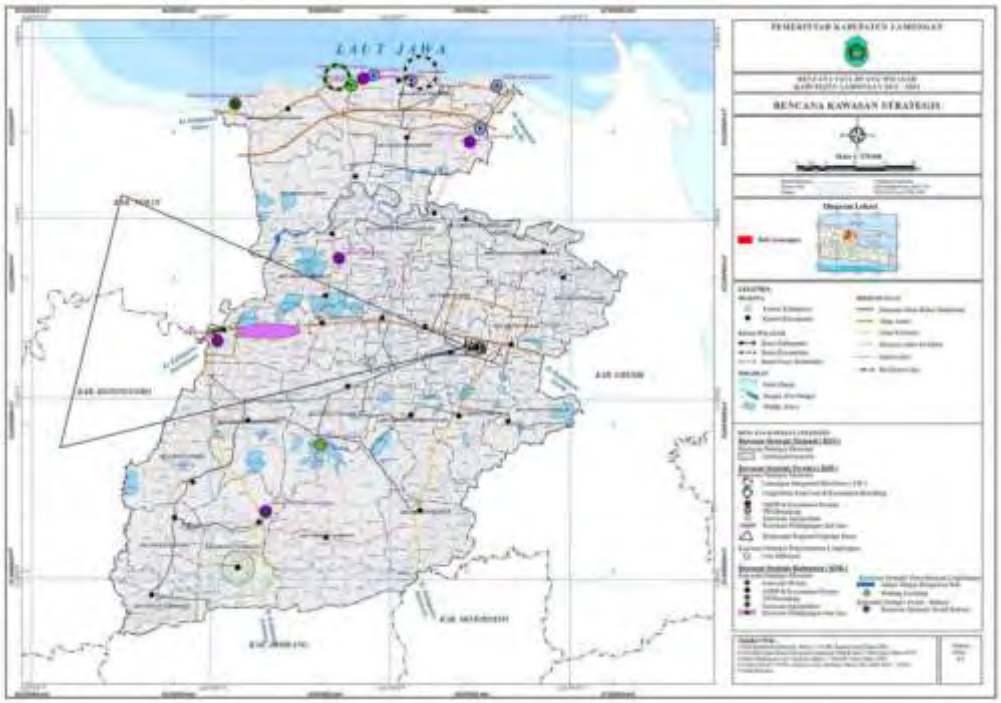

C. Kecamatan Lamongan

KecamatanLamongan merupakan sebuahkecamatan di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Lamongan adalah salah satu kecamatan dari 27 kecamatan yang berada di Kabupaten Lamongan dengan jarak orbitasi 0,5 Km dari Ibu Kota Lamongan atau + 20 Km arah Kota Gresik (kota terdekat).

1. Perbatasan wilayah

Sebelah Utara: Kecamatan Turi

Sebelah Timur: Kecamatan Deket

Sebelah Selatan: Kecamatan Tikung, Kembangbahu

Sebelah Barat: Kecamatan Sukodadi

2. Pembagian Wilayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamongan terdiri atas 12 Desa 30 Dusun 8 Kelurahan 81 RW 276 RT dengan jumlah penduduk laki-laki: 29.977; perempuan: 31.825, luas wilayah kecamatan Lamongan adalah 3.965,3 Ha.

Kelurahan : Banjarmendalan, jetis, Sidoharjo, Sidokumpul, Sukomulyo, Sukorejo, Tlogoanyar, dan temenggungan

Desa : Karanglangit, Kebet, Kramat, Made, Pangkatrejo, plosowahyu, Rancangkencono, Sendangrejo, Sidomukti, Sumberjo, tanjung dan wajib

3. **Dengan tataguna tanah**

Tanah sawah: 2.885,2 Ha

Tanah tegal: 107,3 Ha

Tanah Pekarangan: 751,8 Ha

Tanah Hutan Negara: - Ha

Tanah lain-lain: 221,0 Ha

4. **Tipografi**

Tanah datar di wilayah bagian utara,/94.% tanah Miring di wilayah bagian selatan, Luas 6.%

5. **Stuktur Tanah**

Alovial 15 %

Gromosol 15 %

Mediteron 15 %[52]

6. **Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Lamongan**

[52]Badan perencaraan dan pembangunan daerah Kab. Lamongan tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Tabel 4.3*Luas Ruang Terbuka Hijau di Kec. Lamongan

No	Jenis RTH	Luasan (Ha)
7.	Jalur Hijau	1,1597
2.	Rotonde	0,2155
3.	Monumen	0,2790
4.	Taman Hutan Kota	0, 3660
5.	Ruang Terbuka	1,1290
6.	Makam	0,4177
	Jumlah	3,5669

8. Jalur Hijau

Gambar 4.18: Jalur Hijau

Jalur hijau merupakan jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada umumnya berwarna hijau. Jalur hijau dapat berada di tepi jalan maupun pada median jalan tergantung dari pola jalan. Pada pusat Kota Lamongan, jalur hijau umumnya berada di tepi jalan yang memiliki fungsi sebagai peneduh, penyaring gas karbon serta dapat juga sebagai pengarah. Namun, secara umum fungsi jalur hijau adalah sebagai pembentuk iklim mikro pada kawasan perkotaan. Dengan demikian, jalur hijau lebih mengedepankan fungsi ecology dibandingkan dengan fungsi lainnya.[53]

9. Taman Rotonde

Gambar 4.19: Taman Rotonde

[53]Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taman rotonde merupakan taman yang berfungsi sebagai estetika taman kota. Persebarannya umunya terletak di persimpangan jalan. Pada pusat Kota Lamongan, dengan hanya memiliki luas 0,2155 Ha, keberadaan taman rotonde secara kualitas maupun kuantitas sangat kurang. Persebaran taman tersebut hanya berada di titik-titik persimpangan tertentu sehingga persebarannya kurang merata. Selain ditempatkan di persimpangan jalan, taman rotonde juga dapat ditempatkan di jalan masuk kota. Dengan adanya penambahan taman rotonde, maka diharapkan pada setiap persimpangan jalan akan memiliki taman rotonde yang berkualitas. [54]

10. Taman Monumen

Gambar 4.20: Taman Monumen

[54]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taman monumen merupakan taman yang dibangun sebagai elemen penunjang estetis dari keberadaan monumen. Taman monumen umumnya bersifat pasif, artinya tidak ada kegiatan manusia di dalamnya sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkannya sebagai ruang terbuka publik.

Taman monumen di pusat Kota Lamongan hanya memiliki luas 0,2790 Ha. Dengan luasan tersebut taman hanya berfungsi sebagai taman pasif, padahal tamantaman tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi taman yang aktif. Taman aktif adalah taman yang memiliki kegiatan manusia secara langsung terkait fungsi dan penggunaannya.[55]

[55] http://digilib.its.ac.id/public/ITS-paper-28496-3211203006-Presentation.pdf Di akses pada 17 September 2020 pukul 7:14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.21: Taman Kadet suwoko

Gambar 4 22: Taman Terminal

Gambar 4.23: Taman Kombespol

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.24: Taman adipura

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Hutan Kota

Hutan kota merupakan suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Hutan kota di pusat Kota Lamongan hanya memiliki luasan 0,3660 Ha sehingga secara kuantitas sangat kurang padahal hutan kota dapat disebar di beberapa titik pusat kota guna meningkatkan kualitas iklim mikro kota. Hutan kota berada di jetis dan samping rel kereta api

Gambar 4.25: Hutan Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. Taman Ruang Terbuka

Pada pusat Kota Lamongan ruang terbuka hijau publik memiliki luasan 1,1290 Ha. Ruang terbuka hijau publik tersebut adalah alun-alun dan telaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari bentuk tersebut, RTH yang benar-benar memiliki kondisi yang ideal sebagai RTH publik adalah alun-alun dan telaga Bandung. Namun perlu diperhatikan bahwa penambahan secara kuantitas ruang terbuka hijau harus juga memerhatikan kualitas. Kualitas tersebut juga harus memerhatikan fungsi ecology, socio cultural maupun economyseperti penjelasan sebelumnya sehingga keberadaan sebuah ruang terbuka hijau dapat mencakup fungsi ecology,socio cultural dan economy.

Gambar 4.26: Alun-Alun Lamongan

Gambar 4.27: Telaga Bandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13. Taman Makam

Gambar 4.28: Taman Makam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pusat Kota Lamongan, persebaran makam cukup merata. Namun yang perlu diperhatikan adalah kondisi makam yang cenderung kurang terawat. Kondisi tersebut menjadikan makam kurang berfungsi sebagai area hijau sehingga peran sebagai salah satu penjaga iklim mikro kawasan kota menjadi kurang maksimal. Maka, perlu adanya penataan makam tidak hanya dari sisi ecology namun juga memerhatikan sisi socio cultural dan economy sehingga menjadikan makam menjadi ruang terbuka hijau yang sustainable.[56]

Gambar 4.29: Taman Makam

[56]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Profil DLH

DLHialah Perangkat Daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang kedudukannya dibawah dan bertanggung jawab terhadap Bupati lewatSekda.

Gambar 4.30 : Profil Dinas Lingkungan Hidup

Penyusunan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan DLHKab. Lamongan berdasar pada RPJMDKab. Lamongan Tahun 2016-2021. Kab. Lamongan merumuskan visi dengan terbentuknya sinergitas yang dinamis yang terjadi antara masyarakat, Pemkab dan semua stakeholderdalam mewujudkan dan makin memantapkannya pembangunan Kab. Lamongan secara menyeluruh, sehingga dikeluarkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, yakni: ”*Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing*”. Penghayatan terkait visi bersangkutan, bisa dimaknai bahwa terbentuknya sinergitasyang dinamis diantara masyarakat, Pemkab dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua stakeholderdalam mewujudkan dan makin memantapkannya pembangunan Kab. Lamongan secara menyeluruh. Untuk merealisasikan visi pembangunan Kab. Lamongan 2016-2021, dijalankan dengan 5 (lima) misi yakni :

1. Merealisasikan SDM yang memiliki daya saing dengan meningkatkan mutu layanan pendidikan dan kesehatan.
2. Menumbuhkan perekonomian yang memiliki daya saing dengan memaksimalkan potensi daerah.
3. Memantapkan fasilitas dasar dengan memelihara kelestarian lingkungan.
4. Merealisasikan Reformasi birokrasi untuk memenuhi layanan publik.
5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang penuh ketentraman dan kedamaian dengan menghargai budaya setampat.

Untuk mewujudkan visi bersangkutan yang dijabarkan dalam 5 misi Kab. Lamongan, misi yang bersesuaian dengan DLHialah misi ke 3 yakni : "*Memantapkan sarana dan prasarana* dasar *dengan menjaga kelestarian lingkungan*".

1. Struktur organisasi

   BerdasarPerbup Lamongan No. 73 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DLHKab. Lamongan yakni:

   a. Kepala;
   b. Sekretariat, yang meliputi sub bagian di bawah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Program dan Evaluasi

2) Keuangan

3) Umum

c. Bidang Tata Lingkungan

1) Seksi Amdal dan Perijinan Lingkungan

2) Seksi Tata Lingkungan

3) Seksi Perubahan Iklim dan Pemeliharaan Lingkungan

d. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

1) Seksi Pengawasan Industri

2) Seksi Pengawasan Non Industri dan Kegiatan Lain

3) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan

e. Bidang Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan Lingkungan

1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

2) Seksi Konservasi Lingkungan Hidup

3) Seksi Kemitraan Lingkungan Hidup

f. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

1) Seksi Kinerja Pengelolaan Sampah

2) Seksi Pengurangan Sampah dan 3R

3) Seksi Pengelolaan Limbah B3

Struktur organisasi DLHKab. Lamongan secara lengkap digambarkan dalam Gambar 4.31yakni:

Gambar 4.31: Struktur Organisasi DLHKab. Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

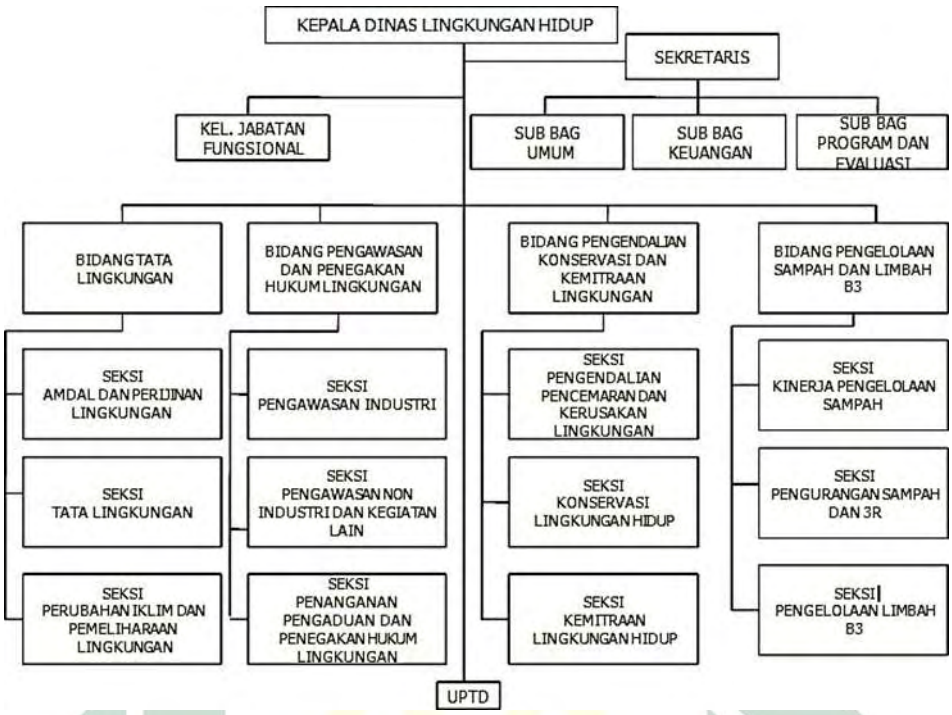

2. Uraian Tugas Dan Fungsi

BerdasarPerbup Lamongan No. 73 Tahun 2016, DLHKab. Lamongan memiliki tugas pokok membantu dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang sifatnya khusus dalam sektor Lingkungan Hidup. Selain itu, DLH juga berfungsi :

a. Menyusun perencanaan bidang lingkungan
b. Melaksanakan pelayanan umum bidang lingkungan;
c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan;
d. MelaksanakanNSPK dan SPM urusan pemerintahan dibidang lingkungan;
e. Melaksanakankebijakan dibidang lingkungan;
f. Mengevaluasi dan melaporkan dibidang lingkungan;
g. Melaksanakanadministrasi dinas dibidang lingkungan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Melaksanakanfungsi lain dari Bupati berkaitan dengan tupoksinya.

3. Uraian Tugas Jabatan Peserta (SKP)

Jabatan penulis yang dilakukan sekarang ini selaku Pengelola Dokumen terkait Analisis Dampak Lingkungan yang ditempatkan di Seksi AMDAL dan Perizinan Lingkungan.

Sesuai dengan Perbup Lamongan No. 73 Tahun 2016 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DLHKab. Lamongan, Seksi AMDAL dan Perizinan Lingkungan bertugas :

a. Mengkoordinasikan perumusan instrument untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, Analisis risiko lingkungan hidup)
b. Melaksanakan penilaian atas dokumen lingkungan
c. Melakukan proses registrasi SPPL
d. Membuat tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar, dan konsultan)
e. Melakukan proses izin lingkungan
f. Memeriksa, memverifikasi dan menerbitkan rekomendasi terhadap permohonan rekomendasi izin PPLH khususnya izin pembuangan air limbah; dan
g. Melakukan tugas-tugas lainnyadari Kepala Bidang Tata Lingkungan berdasarcakupan tugas dan fungsinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjabaran tugas pengelola data berdasar dengan SKPsebagai turunan dari SKP dari Kepala Seksi AMDAL dan Perijinan Lingkungan yakni:

a. Membuat program kerja, bahan dan alat perlengkapan objek kerja berdasar tata cara dan aturan yang ada, supaya dalam pengerjaannya bisa terlaksana dengan baik.
b. Memonitor objek kerja berdasar bidang tugas masing-masing, supaya dalam pengerjaannya selaras dengan perencanaan yang dibuat.
c. Melakukan pengendalian program kerja, berdasar tata cara dan aturan yang ada, supaya tidak menyimpang dalam pengerjaannya.
d. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan dengan rutin, berdasar tata cara dan aturan yang ada selaku bahan untuk menyusun program selanjutnya.
e. Melaksanakan koordinasi dengan unit bersangkutan dan/atau instansi lain untuk pengerjaannya, supaya program bisa dilaksanakan dengan terpadu untuk memperoleh hasil yang maksimal.
f. Membuat dan menyusun Tim Teknis dan Tim Komisi Penilai AMDAL, UKL/UPL, dan izin lingkungan
g. Mengadakan penilaian dokumen kelayakan lingkungan
h. Memfasilitasi pemberian rekomendasi kelayakan lingkungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Melakukan tugas kedinasan lain dari atasan baik yang bentuknya tertulis ataupun lisan

Pada Revolusi Industri 4.0 ini telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat dengan sentuhan serba teknologi canggih. Diharapkan untuk Aparatur Sipil Negara khususnya di bidang lingkungan hidup mampu memegang teguh dan menerapkan 6 (enam) nilai budaya yang diantaranya adalah disiplin, jujur, ikhlas, profesional, tanggung jawab dan kerjasama. (KLHK, 2018).[57]

E. Profil Badan Perencanaan Pembangungan Daerah (BAPPEDA)

1. Kedudukan

BAPPEDAialah elemen pendukung tugas kepala daerah di bidang perencanaan pembangunan di daerah. Dipimpin oleh kepala badan yang tugasnya membantu Bupati di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian atas pengerjaannya.

Gambar 4.32 : Profil BAPPEDA Kabupaten Lamongan

[57]Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Susunan organisasi

Susunan Organisasi BAPPEDA meliputi:

a. Kepala Badan;

b. Sekertariat, yang membawahi subbagian di bawah:

1) Program dan Evaluasi;

2) Keuangan;

3) Umum.

c. Bidang Ekonomi,yang membawahi subbidang di bawah:

1) Pertanian ;

2) Perekonomian;

3) Pengembangan Usaha;

d. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi yang membawahi subbidang di bawah:

1) Fasilitas Wilayah;

2) Perhubungan dna Penanaman Modal;

3) SDA dan Lingkungan Hidup;

e. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahiyang membawahi subbidang di bawah:

1) Pendidikan dan Kebudayaan;

2) Kesejahteraan Sosial;

3) Pemerintahan.

f. Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi yang membawahi sub bidang di bawah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Data dan Informasi;

2) Evaluasi dan Pelaporan;

3) Program Pembangunan,

g. UPT Badan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Tugas dan Fungsi

Kepala BAPPEDA memiliki fungsi:

a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, pengembangan, dan evaluasi perencanaan daerah;

b. Mengkoordinasikan pembuatan perencanaan pembangunan daerah yaknipembuatanRPJPD, RPJMD, dan RKPD;

c. Mengkoordinasikan pembuatanpetunjuk teknis dan pelaksanaan serta pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan;

d. Mengkoordinasikan pembuatanindikator kesukesan perencanaan pembangunan daerah;

e. Mengkoordinasikan realisasi pengelolaan data perencanaan pembangunan, pengembangan, dan evaluasi yang merupakanotoritas daerah;

f. Melaksanakan fungsi lain dari Bupati berdasartupoksinya.

Sekretariat berfungsi :

a. Mengkoordinasikan pembuatanrencana, program, anggaran dan Undang-Undang;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Membina dan mendukung administrasi yakni ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
c. Mengkoordinasikan layanan administrasi urnum, kepegawaian, keuangan dan aset perangkat daerah, dan urusan rumah tangga;
d. Mengkoordinasikan pelaksananaan tugas bidang;
e. Memonitor dan mengevaluasi organisasi dan tatalaksana perangkat daerah;
f. Mengkoordinasikan penyelesaian LPJ keuangan dan kinerja;
g. Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan seluruh satuan unit kerja dilingkungan badan; dan
h. Melakukan tugas-tugas lain dari Kepala Badan berdasrtupoksinya.

SubBagian Program dan Evaluasi memiliki Tugas :

a. mempersiapkan bahan rumusan kebijakan program dan pelaporan;
b. membuatperencanaanberjangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
c. membuatperencanaankerja dan anggaran;
d. melakukan pengelolaan data dan informasi program dan kegiatan dinas;
e. Memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan badan;
f. Menuntaskan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
g. MembuatLKIP dan perjanjian kinerja;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Melakukantugas-tugas lain dari Sekretaris berdasartupoksinya.

Sub Bagian Keuangan memiliki tugas :

a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang merupakan tanggung jawab badan;
b. membuatperencanaankebutuhan aset dan sarana prasarana badan;
c. menginvetarisasi, mengadministrasi, menyusun LPJ aset perangkat daerah;
d. mengumpulkan data dan informasi keuangan untuk menyusun program anggaran badan;
e. mengadministrasiperbendaharaan keuangan badan;
f. membuat laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan badan;
g. Melakukan akuntansi dan memverifikasi LPJ anggaran;
h. Membuat laporan keuangan, menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan badan;menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola anggaran, tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
i. Menunjang penyusunan Renstra dan LKIP badan; dan
j. Melakukantugas lain dari sekretaris berdasartupoksinya.

Sub Bagian Umum memiliki tugas :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menyiapkan dan mengkoordinasikantatalaksana kepegawaian, produk hukum dan dukungan administrasi umum yang merupakan tanggung jawab badan;
b. Membuat rencana kebutuhan pegawai mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian apresiasi, kenaikan pangkat, SKP, DUK, sumpah/janji ASN, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, disiplin pegawai, membuat standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan melaksanakan administrasi ASN dan lainnya;
c. membuat kebutuhan dan pengadaan perlengkapan dan bahan habis pakai badan;
d. menyusun dan mengevaluasi organisasiserta ketatalaksanaan;
e. mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, penerimaan, pendistribusian, dan penggandaan naskah-naskah dinas;
f. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan;
g. melaksanakantatalaksana, tata usaha, arsip dan perpustakaan;
h. melaksanakanadministrasi kepegawaian; membuat rancangan usulan produk hukum daerah;
i. melaksanakantugas hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. melakukan tugas lain dari sekretaris berdasartupoksinya.[58]

Gambar 4.33: Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

[58]Badan perencaraan dan pembangunan daerah Kab. Lamongan tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

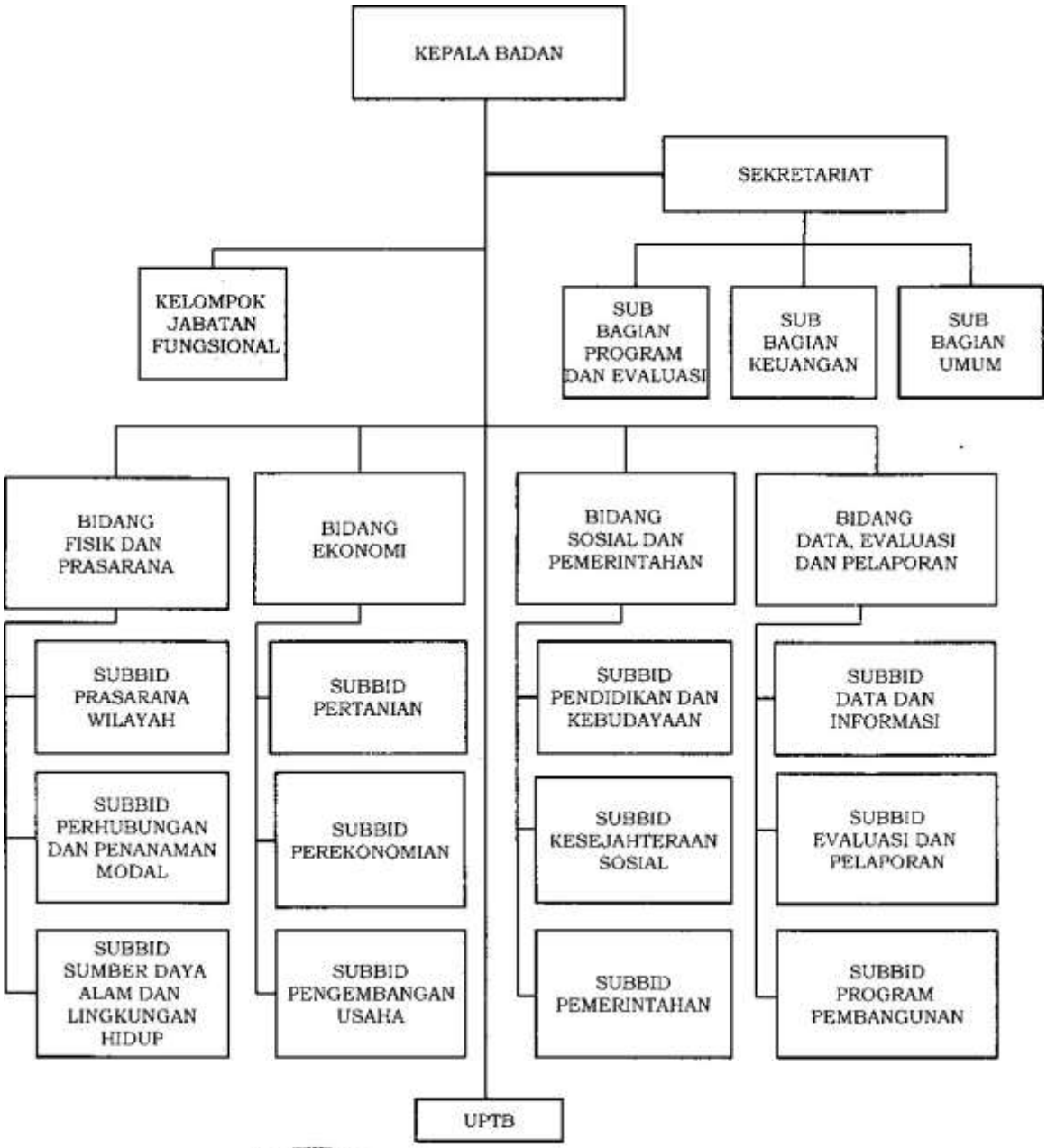

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Deskripsi hasil

Industry yang ditunjang dengan majunya IPTEK dipercaya bisa menggiring seseorang ke taraf kesejahteraan yang lebih baik. Kemajuan ini realitasnya menimbulkan sebuah masalah baru yang diperlu diperhatikan oleh tiap elemen. Masalah lingkungan yang ada sering dikarenakan beragam aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang tidak mengindahkan kelangsungan lingkungan akan berimbas pada kerusakan, contohnya pembuangansampah dan limbah sembarangan, penggunaan energy yang boros, menebang secara liar, dan lainnya. Dalam pemikiran R. Eckersley mengungkapkan karakteristik Politik Hijau dalam konsep Ekosentrisme, yang bertolak belakang dengan pandangan anthroprocentic yakni nilai moral berorientasi pada seseorang. Pendapat ini sepakat untuk memposisikan kebebasan nilai pada ekosistem dan semua aspek kehidupan. Sedangkan R.E Goddin juga memposisikan etika pada pusat dari posisi politik Hijau. Ia mengungkapkan yakni Green Theory of Value menjadipusatnya dari teori hijau, dengan menitikberatkan pada sumber nilai selaku realitas dari suatu hal yang terbentuk secara alamiah sejarah, dan melebihi peranan manusia.[59]Kelangsungan dan kesadaran ekologi sebagai isu pokok, yang mengaitkan tradisi pencerahan dengan pengalaman batasan industrialism selaku suatu kompleksitas kesadaran baru yang diperoleh dari prinsip ekologi. Isu ini berawal dari pandangan yakni seseorang harus

[59] Robert E. Goodin, *Green Political Theory, Polity Press*, (Cambridge, 1992), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbuat berdasar pemahaman yakni ia sebagai bagian dari alam dan bukanlah terletak diatas alam lingkungan. Sehingga seseorang perlu memelihara kesimbangan ekologi dan hidup dalam sumber daya yang terbatas serta berbagai batas ekologi planet bumi.

Di era industri dan kemajuan teknologi ini pentingnya menerapkan Sustainable City, Sustainable Cityialah bentuk dari Sustainable Development yaitupembangunan yang bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan sekarang dan tidak perlu menyurutkan kemampuanpenerus. Pembangunan kota yang berkesinambungan tidak sekedar berdasar pada aspek lingkungan yang berkesinambungan namun berasal dari masyarakat berkelanjutan. Maknanya berkelanjutan ialah terpelihara dengan stabil keadaan ekonomi masyarakat yang makmur selaras dengan perkembangan potensi lingkungannya atau kekhasan masyarakat serta keadaan lingkungan alam yang makin mendukung.

Oleh karena itu pengembangan RTH sangat penting karena berkaitan dengan banyak aspek. Tujuan penyediaan RTH sendiri yaitumemelihara ketersediaan lahan selaku area resapan air, mencetak aspek planologis perkotaan dari keseimbangan antara lingkungan alam dengan binaan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakatnya, menciptakan peningkatan keserasian lingkunagn perkotaan selaku media pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Sesuai dengan amanat menteri terkait dengan RTH dalam Permen Perindustrian No.35/M-IND/PER/3/2010 terkait Pedoman Teknis Kawasan Industri yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan lahan guna perluasan daerah industri merupakan luas RTH minimal 10 persen dari jumlah total luas area. Sementara itu, untuk kawasan pedestrian, berdasar UU No 26 Tahun 2007 terkait Penataan Ruang pasal 29 ayat 2 menyatakan jika kurang lebih 30% luas kota digunakan untuk RTH.

G. Data dan Analisis

1. Pengembangan Terbuka Hijau di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan mempunyai luas 1.812,8 km2 atau sebesar 3,73 % luas wilayah Provinsi Jatim. Dari segi administratif, Kab. Lamongan berupa 27 kecamatan, yang terdiri dari 462 desa, 12 kelurahan dan 1.431 dusun. Dalam wawancara dengan Ibu Nanik anggota DLH di Kab. Lamongan menjelaskan : ‘*’Perencanaan pengembangan RTH di Kawasan Kab. Lamongan didasarkan atas beberapa aspek yaitu prosentase luas wilayah kota, jumlah penduduk, kebutuhan oksigen, tingkat meredam kebisingan kendaraan bermotor serta Berdasarkan netralisasi CO2’’*(Wawancara : 8 Desember 2020 09:00 WIB Kantor DLH Kec. Lamonga Kab. Lamongan).[60]

Gambar 4.34 : Gambar peta Kabupaten Lamongan

[60]Ibu Nanik, anggota DLH, Wawancara : 8 Desember 2020 09:00 WIB Kantor DLH Kec. Lamonga Kab. Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara administratif Kabupaten lamongan dengan luas 1.812,80 Km2 yang meliputi 27 Kecamatan dengan tutupan lahan terbagi menjadi luasan Lahan Non Pertanian seluas 19.100 Ha (11%), Sawah seluas 74.186 Ha (42%) , Lahan Kering seluas 22.013 Ha (12%), Perkebunan seluas 30.184 Ha (17%), Hutan seluas 31.693 Ha (18%) dan Badan air seluas 4.014 Ha (3%).[61]

Pola jaringan jalan di wilayah perencanaan dibentuk oleh dua jenis jalan yaitu jalan utama (main axis) dan jalan cabang (sub axis). Jalan utama terdiri dari Jalan JA Suprapto, Jalan Veteran, Jalan Sudirman,

[61]Pengolahan RTH, Dinas Lingkungan Hidup di Kab. Lamongan tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jalan Basuki Rahmat, Jalan Sumargo, Jalan Lamongrejo dan Jalan Sunan Drajad. Jalan tersebut menjadi jalan induk yang membentuk pola linier pertumbuhan lahan terbangun, yang terlihat pada blok perdagangan dan jasa.[62]

Kemudian untuk jalur hijau atau tempat penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau. Jalur hijau dapat berada di tepi jalan maupun pada median jalan tergantung dari pola jalan. Pada pusat Kota Lamongan, jalur hijau umumnya berada di tepi jalan yang memiliki fungsi sebagai peneduh, penyaring gas karbon serta dapat juga sebagai pengarah. Namun, secara umum fungsi jalur hijau adalah sebagai pembentuk iklim mikro pada kawasan perkotaan. Dengan demikian, jalur hijau lebih mengedepankan fungsi ecology dibandingkan dengan fungsi lainnya.[63] Dalam wawancara dengan saudara helmi aktivis lingkungan mengatakan : ‘’*Dalam jalur hijau vegetasi yang dipilih harus memerhatikan karakter jalan sehingga ada kesesuaian antara fungsi vegetasi dengan karakter jalan. Serta vegetasi yang dipilih juga sebaiknya adalah vegetasi yang mampu mencerminkan ekspresi budaya lokal, seperti misalnya sawo kecik. Juga perlu adanya pemikiran untuk*

[62]http://digilib.its.ac.id/public/ITS-paper-28496-3211203006-Presentation.pdf Di akses pada 17 September 2020 pukul 7:14
[63]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih vegetasi yang produktif. Pemilihan tersebut dilakukan agar vegetasi yang ditanam dapat bermanfaat untuk masyarakat sehingga ada nilai ekonomi yang dirasakan terutama untuk jalan lingkungan di area permukiman'' (Wawancara : 25 Juni 2021 19:00 WIB Perumahan demganan regency, Kab. Lamongan).[64]

Pada area pusat Kota Lamongan ruang terbuka hijau publik memiliki luasan 1,1290 Ha. Ruang terbuka hijau publik tersebut adalah alun-alun dan telaga. Dari bentuk tersebut, RTH yang benar-benar memiliki kondisi yang ideal sebagai RTH publik adalah alun-alun dan telaga Bandung.[65] Dalam wawancara dengan saudara helmi aktivis lingkungan menyatakan *: ''penambahan kuantitas ruang terbuka hijau wajib memfokuskan pada kualitas. Kualitas tersebut juga harus membertimbangkan fungsi ecology, socio cultural maupun economy sehingga keberadaan sebuah ruang terbuka hijau dapat mencakup fungsi ecology,socio cultural dan economy''*(Wawancara : 25 Juni 2021 19:20 WIB Perumahan demganan regency, Kab. Lamongan).[66]

Pada pusat Kota Lamongan, persebaran makam cukup merata. Namun yang perlu diperhatikan adalah kondisi makam yang cenderung kurang terawat. Kondisi tersebut menjadikan makam kurang berfungsi sebagai area hijau sehingga peran sebagai salah satu penjaga iklim

[64]Helmi, Aktivis Lingkungan, Wawancara : 25 Juni 2021 19:00 WIB Perumahan demganan regency, Kab. Lamongan
[65]Ibid., hal. 3
[66]Helmi, Aktivis Lingkungan, Wawancara : 25 Juni 2021 19:20 WIB Perumahan demganan regency, Kab. Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mikro kawasan kota menjadi kurang maksimal. Maka, perlu adanya penataan makam tidak hanya dari sisi ecology namun juga memerhatikan sisi socio cultural dan economy sehingga menjadikan makam menjadi ruang terbuka hijau yang sustainable.[67]

2. Kebijakan Pengelolahan RTH di Kec. Lamongan

Dalam pengelolahan lingkungan pemerintahan lamongan mengikuti peraturan Bupati lamongan yang berlaku. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 32 Tahun 2013 terkait penyediaan RTH Dan Sumber Daya Air Di Kabupaten Lamongan. Pada Bab II tentang RUANG TERBUKA HIJAU Mengatur tentang perencanaan RTH, Penyediaan RTH, Pembinaan dan Pengelolaan RTH, Perlindungan RTH, serta Perizinan, Sebagai contoh pada pasal 14 tentang perlindungan RTH. Untuk menjaga kelestarian RTH, maka individu ataupun badan hukum dilarang :

a. Menebang pohon, tanaman membuat kerusakan atau memindahkan tanaman yang dikuasai oleh Pemda ke lokasi lain;
b. merusak pohon, tanaman dengan cara membakar, melukai dengan benda tajam, mengikat dengan tali dan segala kegiatan sejenis yang dapat merusak;
c. membuang sampah di taman dan hutan kota.[68]

[67]http://digilib.its.ac.id/public/ITS-paper-28496-3211203006-Presentation.pdf Di akses pada 17 September 2020 pukul 7:14
[68]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam wawancara dengan Ibu Luluk, warga Kab. Lamongan mengatakan : ‘’*Meskipun di Kab. Lamongan terdapat aturan tentang penyediaan dan perlindungan RTH namun masih banyak* titik-*titik timbunan sampah di kecamatan Lamongan. Mayoritas berupa sachet minuman dan plastik.’’* (Wawancara : 9 Desember 2020 08:00 WIB Ichi susi restauran japeng di Kab. Lamongan).[69]

Dalam realitanya meskipun kebijakan tentang RTH dalam pengelolahan dan perlindungan di Kab. Lamongan sudah ada namun dalam pelaksannya masih belum maksimal. Dalam wawancara dengan saudara helmi aktivis lingkungan menyatakan : ‘’*Penimbunan dan pembakaran sampah itu menunjukkan tidak adanya tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah, yang diamanatkan UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah, yang melarang kegiatan pembakaran sampah terbuka.’’* (Wawancara : 25 Juni 2021 19:40 WIB Perumahan demganan regency, Kab. Lamongan).[70]

3. Program Lamongan Green and Clear

Di kab. Lamongan terdapat yang namanya program green and clear. Program inisebagai program bidang pengelolaan lingkungan yang terdiri dari aktivitas untuk meningkatkan penghijauan lingkungan dan mengelola sampah dengan basis 3R. Lamongan Green and Clean juga

[69]Luluk, Warga Lamongan, Wawancara : 9 Desember 2020 08:00 WIB Ichi susi restauran japeng di Kab. Lamongan
[70]Helmi, Aktivis Lingkungan, Wawancara : 25 Juni 2021 19:40 WIB Perumahan demganan regency, Kab. Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai salah satu program yang menunjang jakstrada 2018-2028. Program ini dilaksanakan sesuai dengan INSTRUKSI BUPATI LAMONGAN NO 01 TAHUN 2011 dengan tujuan

a. Merubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah secara benar dengan 3R (reduce, reuse dan recycle)
b. Menciptakan Lamongan menjadi kota yang bersih, hijau dan sehat serta terbebas dari sampah
c. Menjadikan embrio Desa Berketahanan iklim (melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan Iklim).[71]

Meskipun terdapat yang namanya program green and clear tidak semua masyarakat antusias dalam program tersebut. Dalam waancara dengan saudara Muhammad Nur Habibi mengatakan : *''Masih banyak di kalangan anak muda yang enggan memperaktikan program tersebut.* Banyak *anak muda yang membuang putung rokok sembarangan dan aturan 3R sangat jarang di implemementasikan mungkin cuman beberapa kalangan dari Ibu-Ibu yang sering melakasanakan kegiatan tersebut oleh karena itu program tersebu tidak berjalan dengan maksimal''*(Wawancara : 9 Desember 2020 08:00 WIB Ichi susi restauran japeng di Kab. Lamongan).[72]

Gambar 4.35 : Dokumentasi program LGC

[71]Ibid., hal. 3
[72]Muhammad Nur Habibi, warga Lamongan, Wawancara : 9 Desember 2020 08:00 WIB Ichi susi restauran japeng di Kab. Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.36 : Dokumentasi kegiatan daur ulang sampah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.37 : Dokumentasi RTH Kab. Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.38: Tata guna lahan

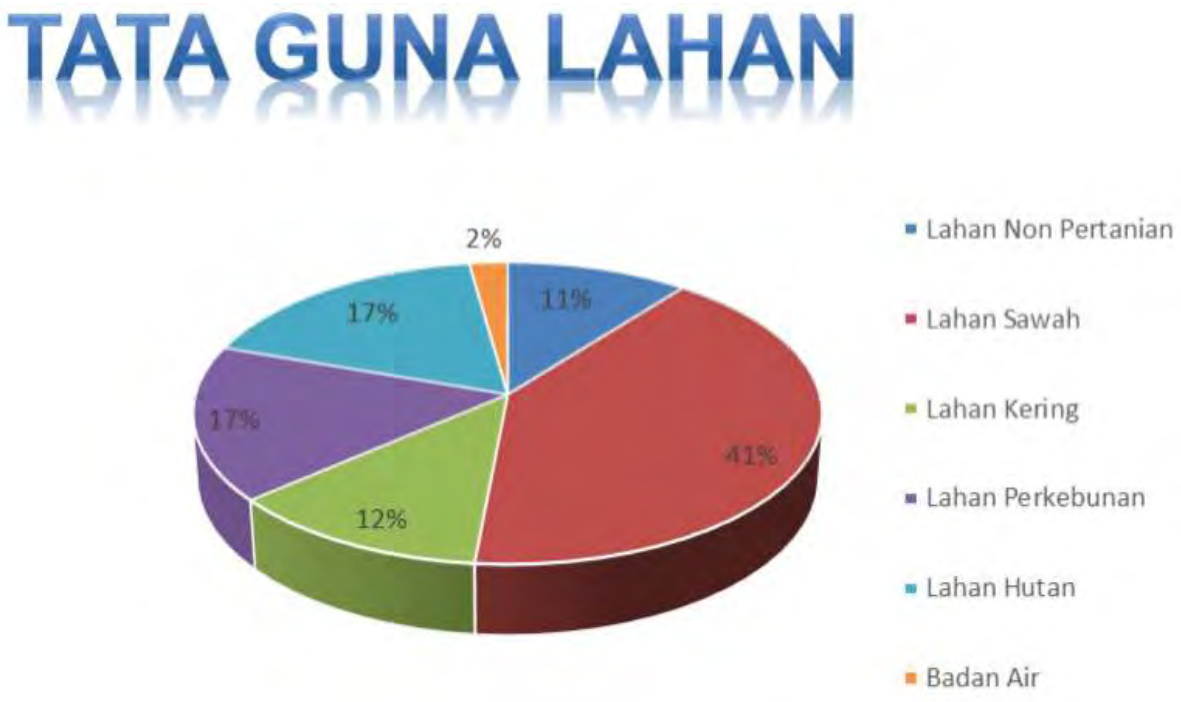

Indeks kualitas lingkungan Hidup merupakan indikator untuk mengetahuimutu lingkungan Hidup. Perhitungan IKLH meliput 30% IKA, 30% IKU dan 40 % IKTL. IKLH Kabupaten Lamongan tahun 2019 adalah 76,92. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 66,2. Tahun 2017 64,2, Tahun 2016 60,55 dan tahun 2015 sebesar 60,65.[73]

[73]Ibid., hal. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.39: Capaian iklim

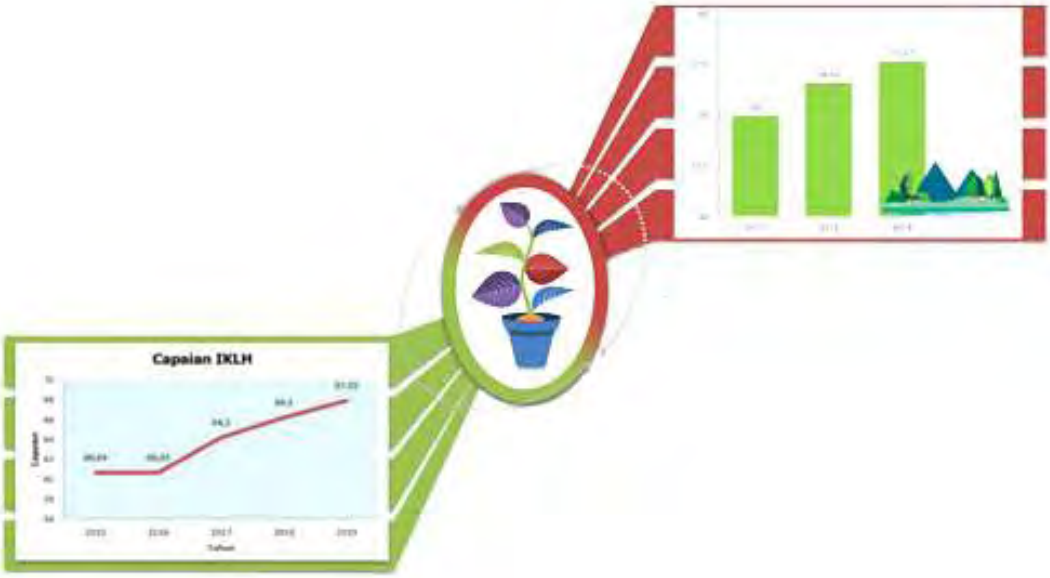

Berdasarkan kondisi lahan dan tutupan vegetasi, hasil analisa ITH di Kabupaten Lamongan sebesar 56,62%, menunjukkan bahwa indeksnya berada pada skala cukup. Indeks Tutupan Hutan ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,85% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Indeks Tutupan Lahan tahun 2018 sebesar 56,62%).[74]

[74]Ibid., hal. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kab. Lamongan memiliki luas RTH sebesar 7.763 Ha, dimana 1.184,5 Ha nya berada di wilayah Kota Lamongan. Alokasi pemanfaatan lahan pada RTH Kota Lamongan sebagai berikut :

Gambar 4.40 : Presentase RTH di Kabupaten Lamongan

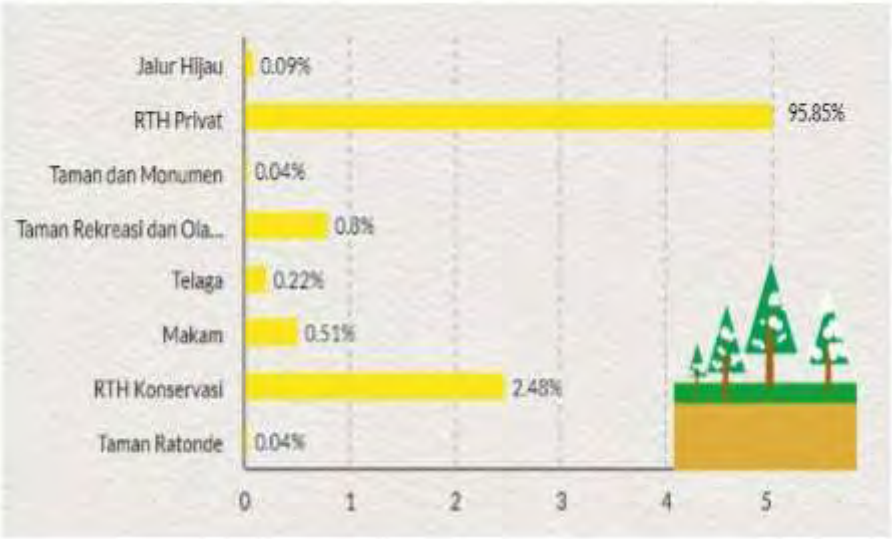

Pengembangan RTH di Kab. Lamongan sampai saat ini masih belum maksimal, kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada program pengelolaan lingkungan tergolong minim. Keadaan ini berimbas pada funsinya RTH yang belum dirasa masyarakat dan berimbas pada aspek pemeliharaan yang kurang mendapat perhatian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data tabel tersebut Kab. Lamongan masih di dominasi dengan RTH privat yang lebih dari 90%. Sementara alokasi untuk pemanfaatan lahan jalur hijau, Taman dan tempat rekreasi masih kurang maksimal. Jika kita hubungkan dengan Permen PU No 5 Tahun 2008 maka hal ini sangat jauh dari yang diharapkan karena perbandingan RTH ialah 30 persen dari total luas wilayah Lamongan yang mencapai 1.782 km2, 30 persen yang dimaksdkan adalah 10 persen RTH privat artinya ialah milik orang yang ada penguasaan tanahnya dan sisanya 20% RTH publik atau wilayah yang wajib disediakan pemerintah daerah.

Sedangkan Luas Kec. Lamongan: 160,17 Ha Luas ruang terbuka hijau: 3,5669 Ha Maka prosentase ruang terbuka hijau pada pusat Kota Lamongan adalah 1,98%. Dari hasil luasan tersebut maka kekurangan yang harus dipenuhi adalah 28,12% atau ± 50,7 Ha ruang terbuka hijau.

Tabel 4.4 Luas Ruang Terbuka Hijau di Kec. Lamongan Perkelurahan

Kelurahan	Luas Lahan Area Permukiman (Ha)	Luas RTH (Ha) 30% x Luas Lahan
Tlogoanyar	10.45	3.135
Sidoharjo	10.2	3.06
Sukomulyo	11.35	3.405
Sukorejo	20.75	6.225
Temenggungan	12.3	3.69
Jetis	25.7	7.71
Banjarmendalan	14.8	4.44
Sidokumpul	16.2	4.86
total	132.75	36.525

Dalam wawancara dengan Galaz Anugerah Alifatur Firmansya seorang mahasiswa mengatakan: *''Menurut saya pengeambangan RTH di Lamongan cenderung kurang progresif jika dibandingkan dengan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertumbuhan penduduk. memang benar ada perbaikan dari sisi kualitas di beberapa titik RTH, namun fungsi RTH yang sebenarnya untuk daerah resapan masih kurang dari cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah resapan. terbukti masih banyak titik banjir saat musim hujan terlebih lamongan adalah daerah lembah yang dikelilingi bukit kapur dimana tempat air tergenang. jika ditarik ke kebudayaan bermukim orang lamongan sejak zaman dulu. selalu ada jublang/empang di belakang rumah. dan selalu ada waduk/telaga di setiap desa. ini tidak berlanjut di hari ini. saya lihat masih proses, di beberapa titik ada pembangunan embung baru utamanya daerah selatan yang aliran airnya berdampak langsung terhadap lamongan kota. namun perlu digaris bawahi embung seperti ini juga perlu perawatan maka kalau semua beban diletakan pada pemerintah maka akan membebankan semua beban RTH ke pemerintah. seharusnya jika RTH pribadi ditaati maka akan membantu meringankan beban tersebut. karena masih proses perbaikan yang meskipun berjalan lambat. dan juga dibarengi proses perusakan RTH alami/daerah sawah produktif maka dampaknya belum terasa. Dalam permasalahan tersebut maka saran saya ialah diperlukan keterlibatan publik dan Pendekatan holistik terhadap pengadaan sampai perawatan RTH agar sesuai konteks ekonomi sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya di Kab. Lamongan'' (Wawancara : 11 Januari 2021 21:22 WIB wawancara online melalui aplikasi whatsApp).[75]

4. Dinamika kepentingan antar aktor dalam praktik pengembangan RTH

Dalam menyusun peraturan dan membangun ruang publik di Lamongan sudah tentu tidak lepas dengan praktik politik yang dilaksanakan pemerintah. Apakah praktik politik bersangkutan selaras dengan ketentuan yang mengaturnya atau praktek politik itu dilaksanakans selaras dengan gaya kepemimpinan pemerintah terkait. Selain itu, laporan ini akan cenderung mengarah pada bahasan bersangkutan dengan pengembangan RTH di Kab. Lamongan dan dinamika kepentingan antar aktor dalam praktik pengembangan RTH.

Perencanaan tata ruang kota Lamongan tidak lepas dari aturan pemerintah pusat berkaitan tata ruang yang merujuk pada UU RINo. 26 Tahun 2007 terkait Penataan Ruang dan dijelaskan dalamPerda,Perda Kab. Lamongan No. 32 Tahun 2013 yang berkaitan dengan RTH dan pengelolaan air di Kabupaten Lamongan menjadi landasan penting terkait dengan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur Kabupaten Lamongan yang memperhatikan lingkungan guna menciptakan pembangunan berkelanjutan yang baik. Sejak pemerintahan dipegang oleh Bupati Fadeli, Lamongan kembali mendulang masa kejayaan

[75]Galaz Anugerah Alifatur Firmansya, Mahasiswa, Wawancara : 11 Januari 2021 21:22 WIB wawancara online melalui aplikasi whatsApp

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perbaikan tata ruang wilayah. Dalam mensukseskan visi pembangunan tahun 2016-2021 di Kab. Lamongan atau demi terciptanya kota Lamongan yang sejahtera serta mampu bersaing, misi yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan yakni:

a. Mampu meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan demi tercipatanya SDM berkualitas dan bersaing. Dalam hal ini bertujuan agar SDM yang tersedia di Kabupaten Lamongan mampu bersinergi dan memiliki potensi untuk bersaing dengan SDM yang lainnya karena melalui pelayanan pendidikan dan kesdehatan yang baikakan berdampak pada kualitas masyarakat.
b. Kabupaten Lamongan di harapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah. Hal tersebut bertujuan agar wilayah Kabupaten lamongan mampu mandiri dan mengembangkan potensi-potensi daerah dari berbagai sektor misalnya perdagangan, pertanian, pariwisata, peternakan, industri, dan perikanan guna memiliki daya saing yang kuat.
c. Memiliki dan menentukan infrastuktur dasar demi kelestarian alam. Hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur dasar. Misalnya : permukiman, jembatan, perhubungan, jalan, air bersih, serta apapun itu yang mampu meningkatkan perekonomian daerah. Infrastruktur dasar digunakan dengan landasan sustainable development melalui pengelolaan alam dan perlindungan lingkungan hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Diharapkan mampu meningkatkan dalam memenuhilayanan publik dengan yang bisa dijelaskan berikut. Hal ini di lakukan untuk membuat pelayanan publik yang profesional. Oleh karena itu perlu adanya proses pelaksanaan, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang berfokus pada aspirasi dan kepentingan masyarakat.
e. Memebuat wilayah yang damai dan tentram serta menghargai budaya lokal. Hal ini akan diwujudkan melalui terwujudnya kebutuhan dasar masyarakat seperti papan, pangan dan sandang dan tidak mengabaikan aspek ketertiban, kenyamanan, agama, budaya dan politik sekitar.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peneliti ingin menjelaskan bahwa pengembangan RTH di kabupaten sangat diperlukan menimbang dari dampak negatif dan positif dari pengaruh RTH di wilayah baik kota maupun kabupaten. Dalam konteks politik hijau dilihat dari prespektif Eckersley peneliti ingin mengetahui bagaimana pengembangan RTH di daerah Lamongan dengan melihat aturan yang ada yakni perda Nomor 32 Tahun 2013 terkait RTH dan pengelolaan air di Kabupaten Lamongan.

RTH memiliki beragam bentuk pengadaan RTH yang dapat direalisasikan. Contohnya berbentuk taman, yakni taman belajar yang dipadukan dengan taman bermain anak, tempat piknik, olah raga dan sejumlah aktivitas lain. Tetapi dalam kenyataannya RTH yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semestinya sebagai area tumbuh tanaman dan penghijauan sekarang berganti fungsinya sebagai area perekonomian kelompok tertentu. Ini menyalahi arti dari RTH sendiri dimana RTH ialah kawasan memanjang dan mengelompok yang penggunannya cenderungmempunyai sifat terbuka, yang berfungsi menjadiarea tumbuhan alami atau yang di tanami.

Gambar 4.41 : Foto kondisi sentral PKL andansari

Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus melakukan penataan area relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berlokasi di Jalan Andansari Lamongan. Awalnya pedagang PKL dulu menjadikan Alun-alun sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi informal. Masih banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktivitas informal di dalam alun-alun serta penggunaan jalur pedestrian sebagai area informal sehingga perlu upaya penataan agar tidak membebani wajah kota dengan aktivitas informal seperti kegiatan PKL maupun kegiatan parkir yang tidak tertata secara baik. Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, saat ini hampir separuh trotoar di ruas jalan protokol dalam kota masih digunakan PKL untuk berjualan. Sementara, area relokasi PKL di Jalan Andansari yang menyediakan 50 lapak, hanya 4 lapak saja yang terisi. Lapak-lapak lainnya terlihat mangkrak, bahkan sebagian telah rusak dan ditumbuhi semak belukar. Dalam wawancara dengan saudara Alvis seorang pedagang menyatakan : *'' Saya sendiri malas menempati area tersebut karena masih sepi dan lapak yang disediakan kurang maksimal'' Wawancara : 4 Juli 2021 12:00 WIB wawancara di sidoharjo kec. Lamongan, Kab. Lamongan.*[76]

Gambar 4.42 : Foto kondisi pasar ikan lamongan

[76]Alvis seorang pedagang, *Wawancara : 4 Juli 2021 12:00 WIB wawancara di sidoharjo kec. LAMONGAN, Kab. Lamongan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam permasalahan tersebut pemerintah harus memperhatikan keluhan para PKL agar para PKL tidak berdagang di ruas-ruas jalan trotoar di ruas jalan protokol dalam kota yang mengganggu pengguna jalan. Selain masalah tersebut ada juga permasalah yang berkaitan dengan limbah dari Pasar ikan Lamongan. mengeluh bau busuk limbah ikan yang selama ini dibuang di kali yang tak jauh dari pemukiman warga. Dalam wawanacara dengan saudara dafa warga Lamongan mengungkapkan: *'' Limbah tersebut dibuang ke kali lewat paralon itu, sehingga masyarakat yang ada di sekitar pasti mencium bau tak sedap, Pendapatan banyak, dana APBD ada, instalasi tersedia kok dibiarkan terus begini. Pemerintahan sebesar Lamongan mestinya sangat gampang mengatasai masalah ini'' Wawancara : 4 Juli 2021 19:00 WIB wawancara di tlogoanyar kec. LAMONGAN, Kab. Lamongan.*[77]

Fenomena diatas dapat dilihat yakni praktek-praktek politik dalam membangun ruang publik di Lamongan masih memiliki permasalahan khususnya terkait pengentasan kontestasi para aktor ekonomi. Pemerintah dalam hal ini mempunyai regulasi yang pasti sebenarnya terkait dengan pembangunan ruang publik yang mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007 yang juga mengatur secara jelas bagaimana hukuman-hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan pembangunan ruang terbuka hijau. Akan tetapi

[77]Dafa warga Lamongan, *Wawancara : 4 Juli 2021 19:00 WIB wawancara di tlogoanyar kec. LAMONGAN, Kab. Lamongan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Lamongan, ruang publik kerap kali dijadikan ajang komersial dari pemerintah dan masyarakat. Lantaran ruang terbuka tersebut jika mengikuti misi dari pemerintah bahwa ruang yang disediakan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga muncullah kontestasi yang terjadi di ruang tersebut.

Dibangunnya ruang di perkotaan juga tidak lepas dari pengaruhnya kapitalis yang ikut andil dalam proses penyediaan ruang. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri sehingga ia senantiasa melibatkan para kapitalis dalam membuat ruang, pihak kapitalis tidak senantiasa hanya menghendaki finansial, namun juga butuh ruang sebagai ajang untuk eksis. Kemajuan ekonomi di Lamongan tidak sekedar bersandar dari profit pariwisata, namun ruang apapun yang sudah didirikan bersama dengan pihak kapitalis. Hal ini dikarenakan berkembangnya sebuah daerah bergantung dari banyaknya investasi yang dari pihak swasta. Terlebih, dalam membangun RTH, pemerintah tidak melaksanakannya sendiri walaupun berbagai argumen dilontarkan untuk membentuk citranya, di belakang itu pemerintah berusaha bersama investor untuk senantiasa bekerja sama demi kelangsungan pemerintahan yang dijalankan.

Dalam wawancara dengan saudara Amanda Kurniawana anggota BAPPEDA menyatakan:''Pemerintah *Kab. Lamongan saat ini memang lagi membangkitkan ekonomi khususnya di masa pandemi sekarang namun kita juga memperhatikan ekologi salah satunya ialah kita selalu*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan justivikasi biar investasi yang masuk di Kab. Lamongan itu menerapkan minimal dari lahan yang diajukan itu merupakan wajib terbangun ruang terbuka hijau itu salah satunya, dan kita juga membuat hutan-hutan kota juga kita dalam revisi RTRW di Kab. Lamongan kita juga menyediakan RTH itu sekabupaten lamongan itu minimal 10%. Namun dalam penerapannya meskipun kita sudah mewajibkan ruang terbuka hijau tapi kadang dalam investasi yang masuk itu mereka masih belum bisa menerapkan artinya RTH menjadi bagian yang terakhir kalau sudah misalnya bangunan terpenuhi, jalannya terpenuhi baru pemerintah Kab. Lamongan menerapakan RTH karena kita belum bisa mengutamakan RTH itu menjadi bagian yang utama''Wawancara : 13 Desember 2020 9:00 WIB wawancara di kantor BAPPEDA Kab. Lamongan[78]

Pemerintahan Kab. Lamongan saat ini masih fokus terhadap isu ekonomi dan mengesampingkan tentang isu lingkungan khususnya RTH oleh karena itu sustainable development (pembangunan berkelanjutan) sangat sulit di jalankan dengan maksimal di Kab. Lamongan Terbukti dari data yang di berikan oleh DLH (Dinas lingkungan Hidup) di Kab. Lamongan bahwa RTH di kab. Lamongan masih belum mencapai target yang diinginkan khsusunya RTH publik yang seharusnya menyediakan 20% yang wajib disediakan pemerintah.

[78]Amanda Kurniawana anggota BAPPEDA, *Wawancara : 13 Desember 2020 9:00 WIB wawancara di kantor BAPPEDA Kab. Lamongan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasar Kadin PMPTSP Jawa Timur yang juga Pj Sekkab Lamongan, Lamongan termasuk dalam area prioritas.[79] Sehingga tidak jarang proyek nasional yang kelak beririsan dengan Lamongan. Contohnya proyek JLU Lamongan. Kab. Lamongan masih terfokus untuk menarik perhatian investor bahkan menyediakan setidaknya 50 hektare (Ha) khusus untuk kawasan industri. Memang dengan adanya area industri, diharap bisa berdampak yakni:

a. Menambah daya saing industri dan investasi di daerah;
b. Menambah nilai investasi melalui penyediaan infrastruktur terintegrasi pada satu area;
c. Memudahkan bagi bidang usaha dalam mendapat kaveling industri berikut infratsruktur yang layak per tahunnya sehingga industri di daerah bisa tumbuh dengan cepat;
d. Memberikan kepastian hukum berkenaan lokasi bisnis sehingga dijauhkan dari beragam jenis ancaman atau gangguan di bidang bisnis;
e. Supaya bisa memilahkan industri dengan area perkotaan untuk meminimalkan efeksosial dan lingkungan dari industri.

Dalam wawancara dengan Eri Ismaanul Ansori pemilik barik tikar mengatakan: *‘’memang dari awal kepemimpinan bupati Bapak fadeli hingga yang sekarang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan*

[79]https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2021/03/15/247140/lamongan-masuk-kawasan-percepatan-ekonomi-nasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agresif menarik investor dan pengusaha untuk mengembangkan potensi di wilayahnya. Ya terbukti di tahun 2019 kemarin nilai ekspor di kota Lamongan naik., karena kemudahan untuk berinvestasi dan berbagai keunggulan wilayah Lamongan membuat banyak perusahaan besar mengalihkan produksinya di Kabupaten Lamongan. Imbasnya, nilai ekspor dari kota ini melejit hingga sebesar 500 persen''(Wawancara : 25 Juni 2021 14:00 WIB di pabrik tikar Kab. Lamongan).[80]

Tetapi disisi lain, dalam membangun dan mengembangkan area industri berdampak negative bagi lingkungannya. Peningkatan jumlah pabrik/bangunan gedung di area industri bisa mengakibatkan tidak seimbangnya ruang yang dibangun dengan ruang terbuka di area industri. Hal ini bisa mengakibatkan menurunnya kenyamanan bagi penghuninya ataupun pengguna bangunan gedung di area industri.Bukan saja terkait ketidaknyamanan, kurang terpenuhinya dan tidak terdapat ruang terbuka bisa menimbulkan sejumlah permasalahan yakni:

a. Pencemaran udara yakni debu ataupun asap yang mengalami peningkatan,
b. Suhu udaranya makin panas,
c. Taraf kebisingan makin tinggi, dan
d. Terkurasnya air tanah.

[80]Eri Ismaanul Ansori, pemilik barik tikar, Wawancara : 25 Juni 2021 14:00 WIB di pabrik tikar Kab. Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terbukti yang terjadi di daerah kec.deket kab. Lamongan, Ratusan warga dari Lamongan, menghendaki pabrik pengolahan udang dibubarkan dan pernah terjadi aksi demo yakni hari selasa, 27 November 2018 sebagian besar dari para ibu dan bapak. Warga menghendaki supaya aroma busuk yang asalnya dari pabrik bersangkutan bisa dihilangkan. Aksi demo berbuah hasil yakni mulai tahun 2019 bau menyengat tersebut mulai berkurang, terlebih bisa dinyatakan baunya sudah lenyap. Awalnya limbah udang yang berbau busuk dirasakan hampir jam 16.00 hingga malam dan ketika hujan. Masyarakat berada di rumahnya sendiri sewaktu telah menghampiri waktu bersangkutan dikarenakan jika di dalam rumah baunya agak berkurang. Berubahnya keadaan lingkungan di Desa Rejosari yang susah dilaksanakan oleh masyarakat sekitarnya ialah permasalahan adaptasi dengan perubahannya. Hasil wawancara dengan responden terkait bagaimanakah metode penyesuaian lingkungan di sekitar lingkungannya yang tengah berubah. Sejumlah 84 warga menyatakan yakni mereka kesulitan untuk menyesuaikan dengan lingkungannya yang terjadi perubahan. Kurun waktu 5 tahun terakhir, warga yang ada di Desa Rejosari dapat menyesuaikan dengan lingkungannya yang sudah berubah.[81]

[81] Leni Fatma Wati,''*Adaptasi Masyarakat Terhadap Kondisi Lingkungan Akibat Keberadaan Industri Pengolahan Udang Di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan''*. Swara Bhumi. Volume V Nomor 8 Tahun 2019, Hal. 4-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kenyamanan inderawi dimulai dari adanya rangsangan fisis mental, lalu dipersepsikan oleh seseorang dengan karakteristiknya masing-masing. Kenyamanan menjadi factor yang berarti pada lingkungan khususnya lingkungan dimana seseorang tinggal. Dampak negative yang muncul disebabkan industri yang didirikan di beragam area sudah memperburuk mutu lingkungan fisik sekitarnya. Permasalahan yang terjadi dan munculnya penyesuaian kurang optimal dikarenakan taraf kenyamanan dipandang bisa memberi kepuasan sehingga akan muncul suatu anggapan atau opini oleh masyarakat sekitarnya dari factor kesehatan, meruginya tanah sawah dan factor lan sehingga persepsi yang muncul dan mereka kemukakan ialah meraka kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan timbulnya bau tidak sedap tiap harinya. Sekarang ini masyarakat sudah merasa nyaman dikarenakan pasca demo tahun lalu yang berdampak positif pada lenyapnya bau busuk yang membuat keresahan masyarakat. Masyarakat mengharapkan supaya bau tak sedap yang lenyap ini tidak akan tercium lagi sehingga warganya akan merasa resah lagi. Tanah sawah/tambak yang terletak di dekat atau belakang area industri pengolahan udang tidak semuanya menerima efek yang banyak, misalnya ikan di tambak mati ataupun gagal panen di sektor pertanian. Tanah sawah/tambak yang satu jalur dengan aliran sungai dibelakang industry pengolahan udang maka akan berdampak yang besar bagi tanah sawah/tambak. Data terkait air peneliti memakai kertas pH dan uji laboratorium pada 3 sampel air sungai yakni sampel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A,B dan C sehingga bisa memperoleh 1 parameter yakni BOD di air sungai yang mengalir sesudah dan sebelum berdirinya industry. Hasilnya dari pH air memperlihatkan sungai bersangkutan pada posisi ambang batas baku kualitas air golongan IV. Air limbah dari industri pengolahan udang yang mengalir ke sungai tidak merubah kadar asam air sungai hingga lebih dari ambang baku kualitas pH air.PP No. 20 Tahun 1990 terkait Pengendalian Pencemaran Air yang dipakai kira-kira tahun 1990-2001 dan dilakukan pembaharuan dengan PP No.82 Tahun 2001. Aturan bersangkutan dibagi dalam 4 golongan dan golongan IV atau D yakni air yang bisa dipergunakan untuk kepentingan pertanian dan untuk bisnis perkotaan, industri, serta PLTA. Realitasnya dalam pemenuhan kebutuhan di waktu kemarau merasa kesulitan dikarenakan terdapat pencemaran domestik, industri dan lainnya, namun juga harus tetap terpenuhi contohnya BODtidak berbau busuk dan mereka mengharapkan bau bersangktuan tidak muncul lagi.[82]

Dalam wawancara dengan saudara helmi aktivis lingkungan menegaskan: ‘*’Pelibatan masyarakat, pemerintah dan swasta penting, memperhatikan daya dukung lingkungan penting. Jika lingkungan rusak bukan masyarakat di bawah saja yang kena imbas.Suatu saat, mereka sendiri juga akan merasakan akibatnya. Dalam kasuspabrik pengolahan udang pemerintah harus bertindak tegas dan pabrik diharuskan untuk mengurangi agar masalh tersebut bisa*

[82]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertangani"(Wawancara : 25 Juni 2021 21:00 WIB Perumahan demganan regency, Kab. Lamongan).[83]

Mengacu masalah bersangkutan, maka pemerintah perlu memanajemen dan mengharuskan dibuatnya RTH untuk masing-masing industry yang ada di area industry. Hal ini digunakan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan dan berkembangnya pembangunan industri di zaman modern.Adanya lingkungan hijau difungsikan untuk memelihara ekosistem yang lestari, serasi dan seimbang. Pada umumnya, tujuan diadakannya RTH di suatu industri yang ada di area indusri ialah:

a. Menangani masalah tata ruang dan sebagai pengendali efek pembangunan pada lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri,
b. Mengendalikan tata air dan sarana keindahan di area industri,
c. Menjadi area mitigasi/evakuasi sewaktu dilanda bencana,
d. Tempat menciptakan iklim yang bisa mereduksi polusi area industri.

Sebagaimana diketahui bersama, yakni suatu bangunan gendung atau pabrik di area industri juga harus dilindungi dari pancaran matahari dan angina kencang. Sehingga tindakan yang praktis dan lebih terjangkau ialah dengan menanam tumbuhan atau pohon untuk meneduhkan di dekat bangunan gedungnya. Melalui tanaman, pohon/vegetasi kayu bisa mematahkan angin atau meredam suara

[83]Helmi, aktivis lingkungan, Wawancara : 25 Juni 2021 21:00 WIB Perumahan demganan regency, Kab. Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga meminimalsir suara bising di industri. Disamping itu pohon/vegetasi kayu yang ditanam di RTH bisa melindungi dari terik matahari. Berdasar paparan bersangkutan, maka bisa diambil simpulannya yakni adanya RTH selaku paru-paru pabrik di area industri.

Adapun pola pemakaian tanah kawasan industri yang tertuang dalam Permen Perindustrian No. 40/M-IND/PER/6/2016 terkait Pedoman Teknis Kawasan Industri ialah:

Gambar 4.43: Pedoman teknis kawasan industri

Jenis Penggunaan	Proporsi Penggunaan (%)	Keterangan
Kaveling industri	Maksimal 70%	Setiap kaveling harus mengukuti ketentuan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) sebesar 60:40
Jalan dan saluran	8-10%	Jaringan jalan yang terdiri dari jalan primer, jalan sekunder, dan saluran *drainase*
Ruang Terbuka Hijau	Minimal 10%	Dapat berupa jalur hijau (*green belt*), taman, dan perimeter
Infrastruktur dasar lainnya, infastruktur penunjang, dan sarana penunjang	8-10%	Infrastruktur dasar lainnya berupa instalasi pengolahan air baku, instalasi pengolahan air limbah, instalasi penerangan jalan

Berdasar Permen Perindustrian No40/M-IND/PER/6/2016 terkait Pedoman Teknis Kawasan Industri, yakni kawasan industri seluas 20-500 ha lebih berkewajiban mempunyai RTH paling sedikit 10%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RTH di lingkup industri hendaknya tertanam dengan tipe tanaman yang selaras dari segi ekologis dengan keadaan lokasinya, mampu melakukan penyerapan cat pencemar, tahan hidup dan mempunyai daya serap air yang baik.

Melalui aturan dan ketentuan RTH, pemda dengan proaktif mengawasi tata ruang lingkup industri berdasar fungsinya. Sehingga dalam membangun RTH harus mendapat perhatian untuk masing-masing pengembang, pemilik, atau pengguna bangunan gedung di lingkup industri ataupun di luar industri.

Oleh karena itu tata ruang tidak sekedar difokuskan terkait masalah tanah, ruang kota, dan pemerintah. Namun politik tata ruanag ialah berkenaan dengan bagaimanakah pemerintah bisa memberi kenyamanan dan keamaanan ke masyarakat atau orang yang menghuninya. Ruang tidak lagi dipandang dari sisi ekonomi, yang mana ruang bisa diperdagangkan dengan actor yang bisa membelinya. Dan bukanlah dimaknai dari sisi politik, yakni selaku tempat untuk melakukan negosiasi. Namun selaku model dan *prototipe* abadi yang mempunyia nilai gunan yang tidak menerima generalisasi nilai tukar pada perekonomian kapitalis dalam sebuah negara dan semestinya dikelola negara.

Pemerintah tidak diperkenankan dalam membuat tata ruang hanya memprioritaskan kepentingan capitalis, dan memberikan ruang dan tempat lebih hanyak untuk pemodal atau investor. Namun tata ruang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan hanya diartikan ruang kosong dan tempat, namun didefinsikan selaku kepentingan hajat khalayak dan bisa menimbulkan kesejahteraan masyakarat. Pemerintah tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi, dalam mengelola tata ruang harus berdasar kepentingan warga. Disamping berdampak sangat positif ke masyarakat Lamongan, di lain pihak ada sejumlah kelompok masyarakat yang merugi dari kerjasama yang pemerintah lakukan.

Istilah sejahtera diartikan bagaimanakah individu bisa memberi keamanan dan kenyamanan ke orang laindengan meningkatkan atau melaksanakan suatu hal ke pihak lain. Dari segi politik, sejahtera tidak terlepas dari definisi hubungannya masyarakat dengan pemerintah, keduanya memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan. Dalam hal ini, pemerintah tidak diperkenankan menciptakan sebuah keadaan yang bisa memuncukan rasa tidak aman dan ketidaknyamanan ke masyarakat dengan perilaku yang kurang menyenangkan dan mengabaikan atau membiarkan. Pemerintah harus melayani public dengan maksimal ke masyarakat sampai mereka merasa puas. Pendapat Midgley (1995:14) kesejahteraan sosial ialaah:

"...kesejahteraan sosial dalam keadaannya meliputi sejumlah unsur, yakni 1) seberapa tinggi masalah sosialnya bisa dikendalikan, 2) seberapa luas pemenuhan kebutuhannya dan 3) besarnya kesempatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk maju difasilitasi. Ketiga unsur bersangkutan diberlakukan untuk perorangan, masyarakat, keluarga dan kelompok[84]''.

Fenomena yang ditemukan di ruang public di Lamongan yakni ruang tidak lagi mengungkapkan demokrasi. Namun sebagai ladang mencari nafkah oleh masyarakat umum. Hal ini menimbulkan pandangan yakni RTH hanya dimanfaatkan oleh beberapa kelompok untuk mencari nafkah, selebihnya hanya untuk memuaskan kepentingan rohani masyarakat. Bagi Carr, Francis, Rivlin, Stone ada 3 jenis dimensi manusia yang mesti melaksanakan ataupun memandu proses dari rancangan dan pengaturan ruang public bersangkutan, yakni:

a. Berkaitan dengan kebutuhan penting penggunanya,
b. hak spasial masyarakat,
c. apa pemaknaan yang dicari.

Proses dalam mengembangkan ketiga dimensi bersangkutan juga membutuhkan pemahaman mendetail dan baik berkaitan dengan bagaimanakah riwayat dari kehidupan public dan ruang public bersangkutan. Ruang public mempunyai beragam dimensi yang berarti selaku tempat dimana konflik tujuan dari budaya dan politik menjadi nyata.

Kesejahteraan masyarakat tidak sekedar berkaitan dengan permasalahan pembangunan raung public, namun ruang public sebagai

[84]Suud, Mohammad. 2006. 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Prestasi Pusaka. Hlm 05

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu cara dari semua masyarakat untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan dari pemerintah. Sehingga bukan beberapa masyarakat yang merasakan efeknya, namun cenderung ke pemerataan. Realitanya, pemerintah tidak bisa melepas koneksinya dengan kelompok marginal yang ada di relokasi seperti pedagang kaki lima. Perlu kita ketahui yakni tata ruang bukan sebagai studi yang menerangkan bagaimanakah pemerintah memberi perlakuan ke warga dengan menindasnya dan secara legal kekuasaan membentuk beragam kebijakan yang membuat sebagian kelompok merugi. Actor politik dan ekonomi tidak bisa berjalan beriringan. Bahkan sewaktu kita mesti menyaksikan, ruang public tidak lagi sebagai ruang untuk masyarakat berdemokrasi, namun hanyalah suatu pengaktualan dari kehendak pemerintah untuk memuaskan masyarakat. Hal inilah yang terjadi di suatu ruang publik di Lamongan.

Sistem atau aspek dari ruang public ini timbul dari praktik pihak yang ada dalam ruang public bersangkutan, dan pihak *designer* yang membuat ruang public bersangkutan. Terkait hal ini, pihak perancang harus betul-betul mengerti apakah yang hendak dibuat dengan tidak mengilangkan fungsi dan makna ruang public bersangkutan. Sejumlah instrument dibuat untuk mencukupi kepentingan masyarakat di ruang public juga harus dimengerti, tidak sekedar perancang, namun juga pemkab untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

furniture yang banyak, pemerintah juga harus memahami yakni ruang public tidak semestinya menimbulkan konflik.

Strategi yang diterapkan pemerintah Lamongan dalam mengendalikan pembangunan yang berimbas pada tata ruang dipandang bernilai positif. Hal ini dikarenakan pemerintah Lamongan disamping melakukan pembangunan ruang yang mengarah pada regulasi pusat, juga memiliki kewenangan untuk mengaruskan ke pihak pengembang, sehingga mereka disyaratkan untuk membuat RTH di perumahan yang hendak didirikan. Berkaitan dengan ruang public akan dibangun dan disiapkan oleh pemerintah, sementara ayang berkaitan dengan swasta sebagai kewajiban dari pengembangnya. Sehubungan dengan perijinannya, IMB tidak bisa diperoleh secara mudah oleh pengembang, ijin ini dicetak bila persyaratan dari pemerintah sudah disepakati oleh actor ekonomi bersangkutan.

RTHselaku elemen ruang public juga sangat mempengaruhi dalam membangun tata ruang di Lamongan juga mesti dipandang dari beragam perspektif. Ruang public dengan semua permasalahannya juga mempunyai sejumlah tujuan atau visi misi dari pemerintah, yakni:

a. Perspektif ekonomi: ruang public yakni RTH juga berdampak ekonomi yang positif. Yang perlu ditekankan yakni dari sisi ekonomi, sudah tentu hanya sejumlah kelompok yang memperoleh efeknya. Sehingga hal ini menimbulkan spekulasi yakni RTH juga memunculkan ketidakadilan dan akan terdapat kalangan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendak memanfaatkan ruang bersangkutan untuk kepentingannya. Dari sisi pengemasan, RTH ialah ruang public sebagaimana seharusnya. Namun dari sisi operasionalnya, ruang ini dikendalikan dan diakses oleh pihak yang mereproduksi ruang terkait.

b. Sosial, yakni ruang public membentuk interaksi dan komunikasi di masyarakat. Perspektif ini dalam kenyataannya, ruang public dengan rancangan yang betul-betul mengacu pada kesetaraan akan membentuk keadaan yang menimbulkan kenyamanan dan berdampak sosial yang positif. Ruang public sebagi tempatnya masyarakat saling berbagi pemikiran dan alat pemerintah untuk memberi pengaruh pada pemikiran masyarakat atas politik.

c. Ekologi, yakni kesadaran akan lingkungan juga berarti di masyarakat. Bila dalam menata ruang public telah dibuat sedemikian sehingga dan tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan, maka fungsi ruang public bersangkutan akan tidak bermakna. Efek bersangkutan akan berhubungan dengan kesejahteraan, keadilan dan lainnya. Khususnya sebagai sanksi bagi pemerintah yakni pemerintah tidak menyiapkan ruang yang menimbulkan kenyamanan dan keamanan untuk masyarakat.

d. Politik, dari perspektif ini kita bisa mengetahui akan dibangunnya ruang public yang tidak lepas dari praktik politik pemerintah. Pada tiap ruang yang dilakukan pembangunan, akan ditemukan kontestasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pemerintah dengan kelompok. Pertama ruang public menjadi kepentingan pemerintah. Kedua, selain pemerintah kita juga harus mempertimbangkan actor ekonomi yakni CSR. Ketika membangun ruang public, disinilah citra pemerintah terbentuk. Ruang terbuka hijau tidak sekedar suatu aktualisasi dari pembangunan ruang terkait. Namun perlu dipertimbangkan yakni ruang public sebagai ruang yang didirikan untuk mencetak budaya politik yang selaras dengan gaya politik terkait.

Pendekatan bersangkutan sebagai serentetan upaya yang bisa dilaksanakan peneliti dalam menggali pemikiran berkaitan dengan praktik politik tata ruang dan efeknya. Disamping itu, kita juga mesti tahu akan adanya hal yang mesti dimengerti. Pada membangun ruang public yang lain, yakni membangun ruang terbuka hijau yang memperoleh perhatian spesifik dikarenakan pemerintah juga melakukan pembangunan dan memposisikan pedagang di area ruang public. Para pedagang kali lima yang mengalami penggusuran akan dipindahkan di bangunan yang pemerintah siapkan. Namun, hal ini hanya dilakukan di Lamongan kota saja. Sedangkan di kecamatan/kota lain belum sepenuhnya terlaksana. Pusat kota sebagai prioritas pembangunan pokok oleh pemda. Sehingga berdampak negative pada kecamatan/kota yang belum seutuhnya dibangun. Keadilan dan kesejahteraan tidak bisa direalisasikan secara berimbang dan hanya diberlakukan bagi pihak yang betul-betul menggunakan ruang public, yakni para aktor ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Furniture kota misalnya serentetan mainan, peralatan olah raga, lampu kota sekedar menjadi nilai keindahan pemerintah. Bahkan, ruang public sekedar dijadikan ruang public yang hanya difungsinikan bagi sejumlah kelompok masyarakat dan pemerintah. Sementara dalam membangun trotoar, menertibkan pedagang kali lama dan dalam menyediakan ruang untuk para difabelitas belum dipertimbangkan secara baik. Khususnya masih banyak trotoar yang dinikmati para pelaku ekonomi, namun tidak ada yang diperuntukkan bagi para difabel, sampai permasalahan yakni fokus pembangunan yang cenderung menekankan ke pusat kota. Renovasi jalan hanya dilaksanakan untuk desa yang mempunyai hasil bumi atau terdapat hal penting yang membuatnya harus dibangun, sehingga dalam hal ini memperlihatkan pemerintah belumsepenuhnya mengimplementasikan keadilan. Pemerintah terfokus untuk menata ruang yang dengan jelas bisa terlihat oleh pengunjung luar daerah. Secara lebih dalam khususnya desa, belum difokuskan secara baik. Praktik politik pemerintah yang memperoleh amanah dari regulasi tidak memperhatikan rasa nyaman dan aman bagi orang yang menghuninya. Dikarenakan berkebalikan dengan prestasi Lamongan dengan kemajuan ekonomi beserta kesejahteraan masyarakatnya, justru ada kelompok yang belum benar-benar tersentuh oleh pemerintah. Lain halnya dengan perlakuan di masyarakat kota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hal yang bisa disimpulkan dari penelitian Pengembangan Ruang Ruang Terbuka Hijau di Kab. Lamongan ialah :

1. Pengembangan RTH di Kec. Lamongan, Kab. Lamongan sampai saat ini masih belum maksimal, kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada program pengelolaan lingkungan masih rendah. Keadaan ini berimbas pada aspek pemeliharaan yang kurang mendapat perhatian. Dari data tabel tersebut Kab. Lamongan masih di dominasi dengan RTH privat yang lebih dari 90%. Sementara alokasi untuk pemanfaatan lahan jalur hijau, Taman dan tempat rekreasi masih kurang maksimal. Jika kita hubungkan dengan Permen PU No 5 Tahun 2008 maka hal ini sangat jauh dari yang diharapkan karena perbandingan RTH ialah 30 persen dari total luas wilayah. Luas pusat kota Lamongan 160, 17 Ha sedangkan jumlah RTH 3, 5669 Ha. Maka prosentase ruang terbuka hijau pada pusat Kota Lamongan adalah 1,98%. Dari hasil luasan tersebut maka kekurangan yang harus dipenuhi adalah 28,12% atau ± 50,7 Ha ruang terbuka hijau.
2. Pemerintahan Kec. Lamongan, Kab. Lamongan saat ini masih fokus terhadap isu ekonomi dan mengesampingkan tentang isu lingkungan khususnya RTH oleh karena itu sustainable development (pembangunan berkelanjutan) sangat sulit di jalankan dengan maksimal di Kab. Lamongan. Pemerintah dalam membuat tata ruang cuma memprioritaskan kepentingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kapitalis, ataupun cenderung menyiapkan ruang dan tempat hanya kepada pemodal dan investornya. Padahal tata ruang melebihi dari sekedar definisi ruang kosong dan tempat, tata ruang didefinisikan sebagai kepentingan hajat public serta bisa membentuk kesejahteraan masyarakatnya.

B. Saran

Dari hasil penelitain yang di uraikan tersebut maka pemerintahan tidak boleh fokus kepada sektor ekonomi saja yang mana ada aspek lain yang harus jadi fokus utama yaitu persoalan lingkungan kbususnya RTH yang wajib di penuhi di daerah Lamongan yaitu sebesar 30% dari luas wilayah Kec. Lamongan Kab. Lamongan. Oleh karena itu pemerintah Kab. Lamongan perlu memperhatikan hal-hal berikut :

1. komitmen politik dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH),Karena pada dasarnya semua regulasi yang berkaitan tentang RTH sudah di tetapkan dengan baik tinggal pelaksanaan yang harus di maksimalkan.
2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya RTH,Dengan bersinerginya masyarakat dengan pemerintah bahu membahu umtuk membangun sustainable development di Kab. lamongan akan mempercepat pengembangan RTH di Kab. ini
3. SDM yang berkualitas untuk terlibat didalampengembangan RTH,Karena kreativitas dan inovasi sangat di perlukan disini oleh karena itu diperlukan SDM yang memumpuni untuk pengembangan RTH.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dan yang terakhir ialah penyeimbangan antara ekonomi-politikdan Minat investasi dalam pengembangan RTH.Keterbatasan alokasi dana oleh Pemerintah yang menjadi penghambat pengembangan RTH, oleh karena itupentingnya kerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini dikarenakan untuk penggunaan RTH yang lebih optimal ke public, tetapi pada prinsipsnya tetap berpijak dan mengarah pada konservasi lingkungan untuk pembangunan wilayah Kab. Lamongan

RTH akan membuat kota Lamongan lebih menarik dan berharga, apabila sanggup merencarakanan untuk kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, seosial budaya ekologis, dan secara estetik dalam bentuk arsitektural yang berfokusdalam terciptanya keseimbangan lingkungan binaannya dan lingkungan hidup secara terlanjutkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aminah, Siti. "Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya." *Jurnal LabSosio* 20.1 (2015): 59-79.

Amirin, Tatang M. "Menyusun rencana penelitian." (1998).

Asnelly, Afri. "Kajian Green Politics Theory Dalam Upaya Menangani Krisis Ekologi Laut Indonesia Terkait Aktifitas Illegal Fishing." *Indonesian Journal of International Relations* 1.2 (2017): 35-53.

David Hizkia Tobing, Dkk. ‘’Metode penelitian Kualitatif’’. Denpasar : Universitas Udayana Bali

Eckersley, Robyn. "Green theory." (2007).

Hasni. ‘’Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah.’’ Jakarta: Rajawali Pers (2010).

Huda, Imam Arifa’illah Syaiful, and Diyah Sari Anjarika. "ANALISIS DAYA DUKUNG DAN KEBUTUHAN LAHAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2035."

Idrus, Muhammad. "Metode penelitian ilmu sosial Edisi Kedua." *Jakarta: Erlangga* (2009).

Imansari, Nadia, and Parfi Khadiyanta. "Penyediaan hutan kota dan taman kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik menurut preferensi masyarakat di kawasan pusat Kota Tangerang." *Jurnal Ruang* 1.3 (2015): 101-110.

Joga, Nirwono. *RTH 30 Persen Resolusi Kota Hijau*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Kharisma, B. (2014). Good governance sebagai suatu konsep dan mengapa penting dalam sektor publik dan swasta: Suatu pendekatan ekonomi kelembagaan. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, *19*(1), 1-34.

PRAMITA, CICI JENY. *Fungsi Ekonomi dan Politik Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Banyuwangi*. Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2019.

Rahardjo, Mudjia. "Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya." (2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahardjo, Mudjia. "Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya." (2017).

Robertua, Verdinand. "POLITIK LINGKUNGAN INDONESIA TEORI & STUDI KASUS." (2020).

Salindri Putri P, Dyah. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARITAS DI KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN." *Swara Bhumi* 5.03 (2017).

Samsudi, Samsudi. "Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta." *Journal of Rural and Development* 1.1 (2010).

Scott, Burchill, et al. "Theories of international relations." New York: Palvrage (2001).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D (Bandung : Alvabeta, 2014)

Sugiyono, Prof Dr. "Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D." Bandung: Alfa Beta (2011).

Sugiyono, Prof Dr. "Metode penelitian pendidikan." Pendekatan Kuantitatif (2010).

Suud, Mohammad. "3 Orientasi kesejahteraan sosial." (2006)

SYAHADAT, RAY MARCH, PRIAMBUDI TRIE PUTRA, and MADE DWI PRATIWI. "Ruang Terbuka Hijau Dan Permasalahan Kesehatan Perkotaan Studi Kasus Di Provinsi Dki Jakarta."

Syamdermawan, Wega, Surjono Surjono, and Eddi Basuki Kurniawan. "Pengaruh Ruang Terbuka Hijau Terhadap Kualitas Lingkungan Pada Perumahan Menengah Atas." *Teknologi dan Kejuruan* 35.1 (2013).

Wati, Leni Fatma. "ADAPTASI MASYARAKAT TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN AKIBAT KEBERADAAN INDUSTRI PENGOLAHAN UDANG DI DESA REJOSARI KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN." *Swara Bhumi* 1.3 (2019).

Yusuf, Muri. "Metode Penelitian Kuantitatif." *Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2017) (2014).

‘’Lokasi dan Fasilitas Sentra PKL Andansari Dinilai Tak Memadai, Pedagang Pilih Jualan di Trotoar’’,Bangsaonline.com. 2 November 2017. 17 September

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2020. https://www.bangsaonline.com/berita/38823/lokasi-dan-fasilitas-sentra-pkl-andansari-dinilai-tak-memadai-pedagang-pilih-jualan-di-trotoar

''Warga Lamongan Protes Pelebaran Pabrik yang Sumbat Irigasi Sawah'', detiknews.com. 10 Mei 2019. 17 september 2020. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4544439/warga-lamongan-protes-pelebaran-pabrik-yang-sumbat-irigasi-sawah

''Satu Bulan Digunakan, Belum Maksimal'', Radarbojonegoro.com. 20 Oktober 2019. 20 september 2020. https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/10/20/161792/satu-bulan-digunakan-belum-maksimal

''PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU PADA PUSAT KOTA LAMONGAN YANG BERBASIS SUSTAINABLE URBAN LANDSCAPE'', ARUNA DP 3211.203.006. 17 September 2020. http://digilib.its.ac.id/public/ITS-paper-28496-3211203006-Presentation.pdf

www.lamongan.go.id. Agustus 2016. 17 september 2020. http://sipsn.menlhk.go.id/sites/default/files/file-lampiran/visi-misi/renstra%20dpuck%20Kabuapten%20Lamongan%202016-2021.pdf

''GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN'', lamongankab.go.id. 17 Okbober 2020. https://lamongankab.go.id/wp-content/uploads/sites/33/2013/05/Gambaran-Umum-Kabupaten-Lamongan.pdf

https://disdukcapil.lamongankab.go.id/pelayanan-online

https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2021/03/15/247140/lamongan-masuk-kawasan-percepatan-ekonomi-nasional

Naskah akademis RTRW lamongan, Rencana tata ruang wilayah kab. lamongan tahun 2011-2030

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan tahun 2020

Wawancara online dengan Ibu Hima (Anggota DLH) tentang Pengolahan RTH, Dinas Lingkungan Hidup di Kab. Lamongan tahun 2020, pada 23 Januari 2021

Badan perencaraan dan pembangunan daerah Kab. Lamongan tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara Ibu Nanik, (anggota DLH) pada 8 Desember 2020,pukul 09:00 WIB Kantor DLH Kec. Lamonga Kab. Lamongan

Wawancara saudara Helmi, (Aktivis Lingkungan) pada 25 Juni 2021, pukul 19:00 WIB Perumahan demganan regency, Kab. Lamongan

Wawancara Ibu Luluk, (Warga Lamongan) pada 9 Desember 2020, pukul 08:00 WIB Ichi susi restauran japeng di Kab. Lamongan

Wawancara saudara Muhammad Nur Habibi, (warga Lamongan), pada 9 Desember 2020 pukul 08:00 WIB Ichi susi restauran japeng di Kab. Lamongan

Wawancara saudara Galaz Anugerah Alifatur Firmansya, (Mahasiswa) pada 11 Januari 2021 pukul 21:22 WIB wawancara online melalui aplikasi whatsApp

Wawancara Amanda Kurniawana (Anggota BAPPEDA), Wawancara : 13 Desember 2020 9:00 WIB wawancara di kantor BAPPEDA Kab. Lamongan

Wawancara Alvis (seorang pedagang), Wawancara : 4 Juli 2021 12:00 WIB wawancara di sidoharjo kec. LAMONGAN, Kab. Lamongan

Dafa (warga Lamongan), Wawancara : 4 Juli 2021 19:00 WIB wawancara di tlogoanyar kec. LAMONGAN, Kab. Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id